

# BAMSOET DORONG PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.04/TH.XVIII/IV/2024



Pemilu 2024 Telah Usai

## MARI MEPERKUAT SEMANGAT Kebersamaan dan Kebangsaan

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

**20** Nasional  
Dukung Smelter Nikel dan  
Pabrik Baja di Sorong

**32** Kajian MPR  
Perjalanan K-3 Memberi  
Dukungan Kepada MPR

**39** Selingan  
Dari Senayan Memperjuangkan  
Nasib Komedian

**60** Sosialisasi  
PPHN Sebagai Roadmap  
Pembangunan Nasional



**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**Buku Digital MPR RI**  
SETJEN MPR RI

# Daftar Isi

EDISI NO.04/TH.XVIII/IV/ 2024



## 08 BERITA UTAMA

### Memperkuat Semangat Kebersamaan

Usai Pemilu 2024, semua pihak hendaknya menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Semua pihak yang “berseteru” dalam Pemilu dan Pilpres 2024 lalu, baik pihak yang menang maupun yang kalah, harus legowo dan kembali merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.



16 Nasional  
Kongres Desa Indonesia 2024



60 Sosialisasi  
PPHN Sebagai Roadmap Pembangunan Nasional



39 SELINGAN  
Dari Senayan Memperjuangkan  
Nasib Komedian



78 Profil  
Amir Uskara

Pengantar Redaksi .....	04
Perspektif .....	06
Kolom .....	36
Aspirasi Masyarakat .....	47
Gema Pancasila .....	49
Varia MPR .....	68
Wawancara .....	72
Figur .....	74
Ragam .....	76
Dari Rumah Kebangsaan .....	82
Rehal .....	84



## COVER

Edisi No.04/TH.XVIII/IV/ 2024

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

# Pengantar Redaksi

## Merekatkan Kebersamaan dan Kebangsaan Usai Pemilu 2024

**P**ADA Rabu, 26 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud Md dan Tim Hukum Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. Gugatan diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024. Namun, TPN Ganjar Pranowo – Mahfud MD dan Tim Hukum Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar menganggap adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024 ini.

Sebelumnya, pada Rabu 20 Maret 2024, dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu 2024, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengumumkan dan menetapkan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden terpilih pada Pemilu 2024. Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memperoleh sebanyak 96.214.691 suara atau 59,59%. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia.

Di posisi kedua, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar meraih sebanyak 40.971.906 suara atau 24,95%. Pasangan yang diusung Koalisi Perubahan (Partai Nasdem, PKB, dan PKS) ini unggul di dua provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat. Di posisi buncit, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD meraih sebanyak 27.040.878 suara atau 16,47%.

Secara umum Pemilu 2024 berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, tanpa gejolak yang berarti. Meski harus diakui ada dinamika-dinamika pada setiap tahapan Pemilu. Usai Pemilu 2024 ini terjadi beberapa kali aksi unjuk rasa yang mengekspresikan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di depan Gedung MPR/DPR/DPD maupun di depan Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa ini tidak sampai

menimbulkan kerusuhan dan anarkis.

Kontestasi dan persaingan dalam Pemilu merupakan hal yang lumrah dan biasa sebagai bagian dari proses demokrasi. Masyarakat Indonesia sudah banyak asam garam mengikuti Pemilu secara langsung pada era reformasi ini. Bahkan, masyarakat pun mengalami masa di titik nadir dalam pelaksanaan Pemilu, yaitu merasakan adanya pertentangan yang mengancam perpecahan bangsa. Masyarakat tentu masih ingat polarisasi atau keterbelahan yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. Keterbelahan itu masih membekas hingga saat ini.

Polarisasi politik atau keterbelahan masyarakat pada Pemilu 2024 ini bisa dikatakan menurun drastis dibandingkan Pemilu 2019. Bagaimana pun, suasana usai Pemilu 2024 masih dirasakan adanya “perseteruan” di antara sesama anak bangsa. Oleh karena itu, kita memang perlu merajut kembali kebersamaan dan kebangsaan usai gelaran Pemilu 2024 ini. Ketika Pemilu usai, semua harus kembali seperti semula. Semua pihak yang “berseteru” dalam Pemilu dan Pilpres 2024, baik pihak yang menang maupun pihak yang kalah, harus legowo dan kembali merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Merajut kembali kebersamaan dan kebangsaan usai gelaran Pemilu 2024 merupakan sebuah keniscayaan. Ada saatnya kita bertanding dan ada saatnya kita bersanding. Semua pihak harus rukun kembali dan bersatu untuk bersama-sama membawa Indonesia menghadapi tantangan menuju kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Ada pepatah Minang yang berbunyi: “biduak lalu kiambang batauik”, yang artinya sampan ketika berlayar dia membelah air, setelah sampan berlalu, air yang terbelah, tanpa diminta dan tanpa terpaksa akan bertaut kembali. Pepatah Minang itu bisa dimaknai setelah Pemilu usai dan terpilih pemimpin bangsa maka hendaknya semua pihak melupakan kontestasi serta bersatu kembali membangun bangsa. □



### PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

### PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

### REDAKTUR PELAKSANA

Raichati M

### KOORDINATOR REPORTASE

Djarot Widiarto

### FOTOGRAFER

Tim Medvis

### STAF DISTRIBUSI

Amelia Rubinta, Ikhwani Bimo F

### TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,  
Ardi Winangun, Budi Suchayho,  
Derry Irawan, M. Budiono

### ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,  
Sekretariat Jenderal MPR-RI  
Gedung Nusantara III, Lt. 5  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,  
Senayan, Jakarta 10270.  
Telp. (021) 57895237, 57895238,  
57895251 Fax.: (021) 57895237  
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



*....Mohon maaf lahir dan batin....*

Pimpinan, pejabat dan seluruh staf Sekretariat Jenderal MPR Mengucapkan:

**Selamat Idul Fitri**  
1 Syawal 1445 H.



**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT



**EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
NKRI Sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

**INDONESIA**

## Peduli pada Stunting, Anak Putus Sekolah dan Kematian Ibu-Bayi

**K**ETIKA hampir semua komunitas bergerak cepat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, negara-bangsa diingatkan untuk terus bekerja sungguh-sungguh menuntaskan pembangunan manusia Indonesia. Negara patut memberi perhatian lebih kepada komunitas warga yang lemah dan berkekurangan, dengan berpijak pada data-data resmi tentang kematian ibu dan bayi, data stunting, hingga data tentang anak putus sekolah.

Kewajiban negara-bangsa bagi pembangunan jiwa-raga segenap warga negara sudah ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menetapkan perintah kepada negara untuk peduli pada komunitas warga yang lemah dan berkekurangan, dengan kewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan dapat hidup layak seturut martabat kemanusiaan.

Kewajiban negara itu sudah dilaksanakan dari waktu ke waktu melalui aneka program pembangunan berkelanjutan. Komitmen untuk melaksanakan kewajiban itu pun terus diperbarui, antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hasil atau progresnya bisa dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Sebagaimana telah dilaporkan, sepanjang periode 2010-2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77% per tahun.

Kerja dan kepedulian terhadap masalah ini tentu saja patut diapresiasi. Apalagi, dilaporkan juga bahwa semua dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang, hidup sehat serta standar hidup layak. Harapan hidup bayi membaik. Begitu juga dengan peluang untuk mengenyam pendidikan atau bersekolah.

Kehidupan layak berdasarkan pengeluaran riil per kapita pun dilaporkan terus membaik.

Namun, kewajiban dan pekerjaan negara membangun manusia Indonesia itu, hingga kini, belum dapat dituntaskan. Itu sebabnya, di setiap lingkungan kehidupan bersama hingga hari-hari ini, masih ada bayi kurang gizi (stunting), anak usia sekolah yang putus sekolah karena beberapa alasan, hingga masalah kematian ibu dan bayi.

Masalah seperti itu umumnya dialami atau dihadapi oleh warga negara yang berkekurangan atau lemah dari aspek ekonomi. Demikian lemahnya sehingga mereka tak mampu untuk sekadar memenuhi kecukupan standar gizi atau membiayai kebutuhan sekolah. Negara harus selalu hadir – bahkan boleh melakukan intervensi— untuk mengatasi persoalan ini agar tidak ada warga negara atau komunitas yang terpaksa ditinggalkan oleh percepatan proses pembangunan yang menjadi tuntutan perubahan zaman.

Ketika peradaban sudah mencapai era digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan seperti sekarang ini, model persoalan seperti bayi kurang gizi, anak putus sekolah, hingga persoalan yang melatarbelakangi kematian ibu dan bayi idealnya bisa diminimalisir oleh tindakan atau kebijakan intervensi negara. Bahkan negara pun hendaknya memrioritaskan masalah ini agar tidak ada komunitas yang tertinggal – apalagi terabaikan – di tengah percepatan proses pembangunan berkelanjutan sebagai tanggapan atas perputaran roda perubahan zaman.

Model persoalan ini bisa ditangani dengan baik sejauh ada kehendak baik, kepedulian, dan kesungguhan dalam menjangkau mereka yang lemah dan berkekurangan, karena mereka ada di setiap lingkungan kehidupan bersama. Bisa tertangani dengan baik karena

**Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.**  
Ketua MPR RI



negara mampu serta memiliki daya dan infrastruktur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini.

Masalah kematian ibu dan bayi menjadi indikator yang menggambarkan baik-buruknya wajah kesehatan suatu negara. Di Indonesia, sebagaimana pernah diungkap oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kematian ibu dan bayi ada di peringkat tiga besar dalam lingkungan ASEAN. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan kematian bayi tercatat mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup.

Masalah stunting tetap menuntut perhatian lebih. Langkah Kemenkes dengan 11 intervensi spesifik patut diapresiasi. Angka stunting di Indonesia dilaporkan telah mengalami penurunan, dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Tahun 2024 ini, angka stunting ditargetkan turun menjadi 14%.

Tantangan riil tentang persoalan stunting bisa dilihat dari hasil survei oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2022. Survei itu menemukan 21 juta keluarga berisiko stunting. Masih menurut BKKBN, jumlah balita berisiko stunting di Indonesia pada 2022 sekitar 4,7 juta jiwa. Sudah barang tentu bahwa potensi masalah ini terdapat di semua daerah. Maka, semua Pemerintah daerah didorong untuk peduli dan lebih

bersungguh-sungguh menangani masalah ini.

Tidak kalah pentingnya adalah memberi perhatian dan peduli pada persoalan anak putus sekolah. Penyebab utama dari kasus anak putus sekolah adalah ekonomi keluarga yang lemah dan berkekurangan. Menurut data Susenas yang diolah Bappenas tahun 2022, anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah mencapai 4.087.288 anak. Jumlah ini menggambarkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang jumlah mencapai 3.939.869 anak.

Dari rinciannya, didapatkan data bahwa sebanyak 491.311 anak usia sekolah drop out pada tahun ajaran baru. Dan, sebanyak 252.991 anak putus sekolah di tengah jenjang, serta 238.320 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran baru. Selain itu, tercatat tak kurang dari 3.356.469 anak usia sekolah sudah drop out pada tahun-tahun ajaran sebelumnya.

Gambaran di atas, plus rangkaian data ini, patut dikedepankan untuk memberi penegasan bahwa kewajiban negara membangun segenap jiwa-raga warga negara belum tuntas. Negara harus lebih agresif melakukan intervensi guna meminimalisir masalah stunting, anak putus sekolah hingga persoalan kematian ibu dan bayi. Mereka yang lemah dan berkekurangan hendaknya tidak boleh tertinggal oleh perubahan zaman, apalagi terabaikan. □

Pemilu 2024 Telah Usai:

# Mari **Memperkuat** Semangat Kebersamaan dan Kebangsaan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Usai Pemilu 2024, semua pihak hendaknya menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Semua pihak yang “berseteru” dalam Pemilu dan Pilpres 2024 lalu, baik pihak yang menang maupun yang kalah, harus legowo dan kembali merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

**K**ETUA MPR Bambang Soesatyo mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya. Sebuah foto yang akhirnya menjadi “berita besar.” Foto yang di-*upload* Bamsuet, panggilan Bambang Soesatyo, adalah momen berbuka puasa di rumah Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani. Dalam foto tersebut Bamsuet mengambil gambar selfi dan diikuti mereka yang hadir dalam buka puasa bersama itu.

“Buka puasa bersama Ketua DPR Puan Maharani dan pengajian di kediaman Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran Rosan, Roeslani dan Ayu Heni Rosan (Tugek),” tulis Bamsuet menyertai foto yang diunggahnya di akun instagram, Sabtu 30 Maret 2024.

Foto itu sebenarnya biasa saja. Namun, menjadi tidak biasa karena dalam foto itu ada sosok tokoh politik nasional. Dialah sosok Puan Maharani, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. Foto yang di-*upload* Bamsuet menjadi semakin menarik karena bisa mengundang beragam tafsir atas kehadiran Puan Maharani di rumah Ketua TKN Prabowo – Gibran. Pasalnya, Puan Maharani sebagai Pimpinan PDI Perjuangan dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) Pemilu 2024 mendukung pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Momen kebersamaan Puan Maharani dan para elite kubu Prabowo

– Gibran tentu saja kontras dengan situasi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud adalah salah satu pihak yang mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK. Tim TPN Ganjar – Mahfud menggugat adanya kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo yang menguntungkan pasangan Prabowo – Gibran.

Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan, sama halnya dengan Gibran, puteranya. Namun, belakangan, hubungan keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan dikabarkan merenggang akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024. Di tengah gugatan terhadap hasil Pemilu yang masih berlangsung di MK itu, Pimpinan PDI Perjuangan justru berbuka puasa di rumah Rosan Roeslani, Ketua TKN Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Bamsuet mengungkapkan, buka puasa bersama dan pengajian kaum ibu di kediaman Rosan bukanlah agenda politik. Puan menghadiri acara tersebut karena bersahabat dengan Nyonya Tugek, istri Rosan. “Tidak ada pembicaraan politik,” ujar Bamsuet seperi dikutip harian *Kompas*.

Meski demikian, Bamsuet bersyukur atas kehadiran Puan. Sebab, langkah yang diambil puteri Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu menunjukkan kematangannya sebagai politisi. “Kehadiran Mbak Puan menunjukkan



kedewasaan kita dalam berpolitik, memisahkan antara kepentingan politik dan pertemanan. Sama seperti semangat yang saya bangun, berpolitik secukupnya, berteman selamanya,” ujarnya.

Bamsuet tidak memungkiri momentum bulan Ramadan juga telah memberikan ruang kepada para politisi untuk berkumpul kembali setelah bertarung pada Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Alih-alih mempertajam perseteruan, para elite justru bisa mulai meluruhkan itu semua. “Ramadan bulan silaturahmi (yang) meredakan ketegangan pascapemilu karena kata kunci dalam politik itu adalah komunikasi,” kata Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

### **Semangat Kebersamaan dan Kebangsaan**

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilu 2024. Setelah sebulan penuh melakukan rekapitulasi suara, KPU akhirnya mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu 2024, Ketua KPU Hasyim Asy’ari didampingi seluruh anggota KPU menetapkan

pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Dalam Pemilu 2024, pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memperoleh 95.214.691 suara atau 58,59%. Pasangan Capres dan Cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini menang di 36 provinsi. Di posisi kedua, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar meraup 40.971.906 suara atau 24,95%. Pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS ini unggul di dua provinsi (DI Aceh dan Sumatera Barat). Sedangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud Md meraih 27.040.878 suara atau 16,47%.

Usai pengumuman dan penetapan secara resmi dari KPU, Prabowo Subianto menggelar konferensi pers. Dia didampingi para Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju, antara lain Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Prabowo Subianto

menyatakan, akan merangkul rivalnya, baik di kubu 01 maupun kubu 03. “Kami mengajak untuk bersama-sama menatap ke depan, dan bergandengan karena tantangan ke depan masih sangat besar,” katanya.

Prabowo mengajak semua pihak bersatu dan rukun untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dengan kemakmuran, bisa membawa keadilan. “Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan serta menghilangkan penderitaan rakyat. Itu adalah cita-cita dan perjuangan Koalisi Indonesia Maju,” ujarnya.

Prabowo juga mengajak semua pihak memperkuat semangat kebersamaan dan kebangsaan. “Marilah kita bersama. Tidak mau menari di gendang orang lain. Jangan mau kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kolonialis. Indonesia harus bersatu kuat dan kita ingin bekerja untuk rakyat. Bukan untuk orang lain,” ucapnya.

Pesan serupa disampaikan Bamsuet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengajak semua pihak untuk menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Semua

pihak yang “berseteru” dalam Pemilu dan Pilpres 2024 lalu, baik pihak yang menang maupun yang kalah, harus legowo dan kembali merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Momentum bulan Ramadan harus dijadikan ruang oleh para politisi untuk berkumpul kembali setelah bertarung pada Pilpres dan Pemilihan anggota legislatif 2024. Jangan pertajam perseteruan di Pemilu yang telah kita lewati. Jadikan Ramadan untuk meluruhkan serta menghapus perseteruan yang ada,” katanya usai menghadiri buka puasa bersama Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Jakarta, Selasa, 2 April 2024.

“Dalam politik tidak boleh ‘baperan’. Kita boleh berseberangan atau berbeda pandangan dalam satu hal. Tetapi, tidak kemudian semua hal lainnya kita jadikan berseberangan juga. Berpolitiklah secukupnya, bertemanlah selamanya. Ada saatnya kita bertempur, ada saatnya kita bersatu kembali. Ada saatnya kita bertanding, dan ada saatnya kita bersanding,” imbuhnya.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., juga sependapat dengan Ketua MPR. Menurut Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, kontestasi dan persaingan dalam Pemilu merupakan hal yang biasa sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun, ketika Pemilu sudah usai maka semua harus kembali seperti semula. “Kontestasi dan persaingan hanya untuk Pemilu saja. Ketika Pemilu sudah usai, kita harus kembali seperti semula,” ujarnya kepada *Majelis*.

Dalam pandangan Syarif Hasan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini gejolak di masyarakat tidak terlalu signifikan. Pemilu 2024 berjalan kondusif. Semula dikhawatirkan Pemilu 2024 ini sama seperti Pemilu 2019 lalu. Banyak pihak mengkhawatirkan timbulnya perpecahan dan polarisasi pada Pemilu 2024. Pada kenyataannya kekhawatiran itu tidak terbukti. “Saya tidak melihat adanya perpecahan di masyarakat akibat Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, salah satu faktor berkurangnya polarisasi di masyarakat pada Pemilu 2024 ini adalah karena kontestasi Pilpres 2024



diikuti tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pilpres pada Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan Capres dan Cawapres, yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Hal ini berbeda dengan Pilpres pada Pemilu 2019 yang hanya diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres, yaitu pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, dan pasangan Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin.

“Memang benar, Pemilu 2024 ini tidak sepanas Pemilu 2019 lalu. Pada Pemilu 2024, masyarakat memiliki alternatif pilihan

sehingga suara tersebar kepada tiga pasang Capres dan Cawapres, dan tidak terjadi polarisasi. Itu sebabnya Pemilu 2024 ini terasa lebih demokratis dibanding Pemilu 2019,” jelasnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyampaikan hal yang sama. Menurut Herman Khaeron, masyarakat Indonesia sudah mempunyai pengalaman dalam beberapa kali mengikuti Pemilu pada masa reformasi. Bahkan, masyarakat punya pengalaman ketika Indonesia berada dalam titik nadir Pemilu, yaitu mengalami pertentangan dan perpecahan bangsa. “Masih teringat sampai saat ini, pengalaman Pemilu 2019 lalu, yaitu



Syarief Hasan



**Herman Khaeron**

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pertarungan antara 'cebong' dan 'kampret, misalnya. Pertentangan itu masih membekas di hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia," katanya.

Pada waktu itu, lanjut Herman, masyarakat Indonesia terbelah, apalagi di media sosial. Pertentangan terkait perbedaan cara pandang dan pemahaman itu seharusnya menjadi 'keberkahan' karena konsepnya akan lebih kaya, banyak ide dan gagasan akibat perbedaan itu. "Namun, yang terjadi lebih ke arah perpecahan, saling ejek mengejek sesama anak bangsa, saling menjatuhkan. Padahal, sesungguhnya kita mempunyai kewajiban yang sama, yaitu bagaimana seluruh anak bangsa ini membangun bangsanya, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, dan tentu kita

ingin sejajar dengan bangsa lain," jelasnya.

"Pengalaman itulah seharusnya menjadi sebuah catatan sejarah bagi siapa pun. Kita punya pengalaman dan Pemilu akan berulang. Seharusnya usai Pemilu ini tidak ada lagi tema-tema yang kontradiktif dan membangun friksi di masyarakat. Justru saat ini temanya adalah bagaimana kita membangun bangsa dan negara ke depan agar lebih baik, bagaimana bangsa Indonesia melanjutkan hasil-hasil pembangunan, dan mengakselerasi pembangunan dalam rangka menuju Indonesia yang lebih makmur, masyarakat yang lebih adil dan sejahtera," imbuhnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PAN, Guspard Gaus, mengakui, setiap penyelenggaraan Pemilu pasti akan

menimbulkan dinamika. Sejak mulai proses dan tahapan Pemilu, pendaftaran, kampanye, hingga pengumuman hasil Pemilu selalu terjadi dinamika. "Sejak awal hingga sampai detik ini banyak persoalan yang terjadi dalam proses tahapan-tahapan Pemilu. Saya tidak perlu mengungkapkan dengan berbagai kalimat dan lainnya. Saya berada di Komisi II DPR, tentu menjadi orang yang ikut bertanggungjawab atas sukses dan tidaknya Pemilu ini," katanya.

Menurut Guspard Gaus, besar dan kecilnya dinamika itu tergantung pada pandangan masing-masing peserta Pemilu dan persepsi dari berbagai elemen masyarakat. Maka wajar bila setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024 menimbulkan dinamika seperti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, ada wacana memunculkan hak angket. "Setelah Pemilu pasti akan menimbulkan dinamika," ujarnya lagi.

Guspard Gaus mengakui, bagaimana pun, setelah Pemilu, ada suasana yang tercabik-cabik akibat berbagai dinamika, persoalan, dan lain sebagainya. Karena itu, perlu merajut kembali kebersamaan usai Pemilu. "Kebersamaan dalam rangka membangun usai Pemilu 2024 merupakan sebuah keniscayaan. Merajut kembali kebersamaan berarti ada sesuatu yang sobek, sesuatu yang tercabik-cabik," tuturnya.

Bahkan, Guspard Gaus menyebutkan bahwa merajut kebersamaan tidak bisa dinafikan, bahkan merajut kebersamaan seperti sudah menjadi sunnatullah. "Saya berasal dari Sumatera Barat. Ada pepatah Minang yang berbunyi: 'biduak lalu kiambang batauik,' yang artinya sampan ketika berlayar dia membelah air, setelah sampan berlalu, air yang terbelah, tanpa diminta dan tanpa dipaksa akan bertaut kembali," ujarnya.

Pepatah Minang itu bisa dimaknai setelah Pemilu usai dan terpilih pemimpin bangsa maka hendaknya semua pihak melupakan kontestasi, serta bersatu kembali membangun bangsa. "Dalam pandangan saya, pepatah Minang itu merupakan sunatullah dan menjadi filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucapnya. □



**Guspard Gaus**

MBO/BSC

# Potensi Polarisasi pada Pemilu 2019 Menurun Drastis

Polarisasi politik atau polarisasi di masyarakat karena perbedaan pilihan politik pernah menjadi mimpi buruk bagi demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 2024, polarisasi di masyarakat menurun drastis dibanding Pemilu-Pemilu sebelumnya.

**P**OLARISASI politik pernah menjadi mimpi buruk bagi demokrasi di Indonesia. Contohnya adalah Pemilu 2019 lalu. Segregasi sosial pada Pemilu 2019 lalu merupakan imbas polarisasi politik pada Pemilu 2014. Situasi Pemilu 2019 berimbas panjang pada Pemilu 2019, ditambah residu kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Ada banyak konflik sosial yang terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017 dan Pemilu 2019 akibat berbeda dukungan politik.

Hal itu terlihat pada kampanye di media sosial. Kampanye di media massa pada waktu itu justru diisi dengan disinformasi dan ujaran kebencian berdasarkan etnis dan agama. Sebuah studi menyebutkan, dalam Pemilu 2019 semua kandidat pasangan Capres yang berkontestasi melakukan kampanye di “bawah tanah”. Kampanye di bawah tanah itu diisi dengan hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas. Akibatnya, kampanye yang seharusnya untuk pertukaran gagasan dan diskusi kehilangan substansinya. Inilah yang memicu polarisasi politik dan ketegangan di masyarakat.

Di Indonesia, kampanye “bawah tanah” di media sosial ini gencar dilakukan oleh *cyber army* atau pasukan siber. Secara definisi, pasukan siber adalah jaringan aktor yang dibayar secara diam-diam dan pada umumnya menggunakan akun media sosial anonim untuk terlibat dalam kampanye terorganisasi guna memanipulasi opini publik. Situasi ini patut dicermati secara seksama karena media sosial menjadi sumber informasi politik.

Dalam penelitian bersama tim peneliti di LP3ES, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan Drone Emprit tentang pasukan siber dalam Pemilu 2019, Wijayanto, staf pengajar Universitas Diponegoro menguraikan, pada Pemilu 2019, pasukan siber (*cyber army*) bekerja untuk



Wijayanto

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dua Capres dan Cawapres yang berkontestasi pada waktu itu, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Pasukan siber itu tidak segan-segan memanfaatkan berita palsu, ujaran kebencian, dan politik identitas. Pada akhirnya, hal itu memicu polarisasi politik. Misalnya, pasukan siber pendukung Prabowo kerap melabelkan Jokowi sebagai komunis dan menonjolkan kedekatan Jokowi dengan Cina. Sementara pasukan siber pendukung Jokowi juga menyerang kubu Prabowo dengan memainkan isu, misalnya mempertanyakan ke-Islaman Prabowo, dan lainnya.

Menurut Wijayanto, politik identitas terkait agama digunakan untuk menyerang satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, elit politik kerap menggunakan sentimen agama berbasis identitas, seperti pada Pemilu 2014, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta tahun 2017, dan Pemilu 2019, yang mengakibatkan polarisasi politik. Tagar#2019GantiPresiden dan tagar#2019TetapJokowi merupakan salah satu wujud polarisasi politik di media sosial yang menimbulkan perdebatan sengit dan permusuhan yang semakin tajam.

“Pelabelan terhadap masing-masing pendukung juga memperlihatkan politik identitas. Satu kubu memberi label kubu lain sebagai “cebong” (mengacu pada kelompok pendukung Jokowi atau pemerintah) dan “kampret” (pendukung Prabowo). Ada pula istilah “kadrun” (singkatan dari kadal gurun) yang merujuk pada kelompok Islam garis keras anti-Jokowi,” tulis Wijayanto dalam artikelnya berjudul “Perang Siber Pemilu 2024: Akankah Mengulang Polarisasi Politik Pemilu 2019?”.

Bagaimana dengan Pemilu 2024? Wijayanto menyebutkan, pasukan siber tetap ada dan terus memproduksi propaganda media sosial. Propaganda tersebut berisi disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas untuk mendukung setiap kubu yang memperjuangkan posisi presiden. Situasi ini hampir serupa dengan pasukan siber dan propaganda media sosial pada Pemilu 2019.

Namun, pada Pemilu 2024 terjadi eksodus pasukan siber. Misalnya, pasukan siber yang sebelumnya mendukung Jokowi pada Pemilu 2019 kini beralih mendukung Capres Ganjar

Pranowo, bukan mendukung Capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, terjadi pula eksodus pendukung PDI Perjuangan dan Ganjar yang kini beralih mendukung Prabowo, karena Gibran menjadi calon wakil presidennya.

Senada, peneliti CSIS Arya Fernandes menyebutkan, potensi polarisasi pada Pemilu 2024 tetap ada, namun sudah menurun drastis dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Berkurangnya potensi polarisasi tersebut karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah petahana tidak ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo sudah dua periode menjabat sebagai presiden. Kontestasi Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan Capres dan Cawapres yang akan menjadi presiden dan wakil presiden baru.

“Karena tidak ada paslon *incumbent*, Pemilu 2024 kali ini relatif lebih tenang. Kompetisinya pun relatif dinamis, karena diikuti tiga paslon,” katanya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema “Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024” beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata Arya Fernandes, polarisasi di masyarakat juga tidak terjadi karena model kampanye mengalami pergeseran dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, termasuk Pemilu 2017, model kampanye berbasis media sosial berperan sangat penting dan sangat memengaruhi orang-orang untuk menentukan dan memilih kandidat.



Saiful Mujani

Pada Pemilu 2024 situasinya agak berbeda. Masyarakat saat ini sudah jenuh dan mulai sadar untuk memverifikasi informasi. “Verifikasi informasi di media sosial itu terbatas, sehingga sekarang beralih ke televisi. Di dua survei terakhir kami, televisi menjadi rujukan sumber utama. Di televisi, proses pemeriksaan data dan lain-lain lebih terverifikasi,” ujarnya.

Ditambah lagi, hoaks yang beredar menjelang Pemilu saat ini tidak semasih seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Penyebabnya, literasi masyarakat sudah cukup baik. Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hoaks telah menurun. Meski demikian, hoaks jangan dianggap remeh, sangat penting untuk mewaspadai hoaks yang menasar pada penyelenggara dan hasil Pemilu lantaran dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu.

Kementerian Kominfo juga mencatat adanya penurunan hoaks di media sosial. Sejak 1 Juli 2023 hingga 24 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi sebanyak 195 temuan isu hoaks terkait Pemilu yang tersebar pada 2.825 konten. Dari jumlah tersebut, Kementerian Kominfo telah menindaklanjuti 1.546 konten.

Namun, ada hoaks yang berbeda pada Pemilu 2024 ini, yaitu penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan pembuatan dan penyebaran konten bermuatan hoaks lebih mudah dan cepat. AI mampu menghasilkan teks juga suara serta gambar sangat *coherence*, *smooth*, sehingga sulit dibedakan dengan yang asli. Pemanfaatan AI untuk pembuatan dan penyebaran hoaks di Indonesia relatif masih baru.

Secara umum, konflik sosial dalam Pemilu 2024 ini memang sedikit lebih lunak karena adanya tiga kandidat peserta Pilpres. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat, jumlah pemilih yang mengalami polarisasi relatif sedikit dibanding orang yang tidak terpolarisasi pada Pemilu 2024. Lebih rinci lagi, SMRC mencatat, dari rata-rata 18% atau 36 juta penduduk Indonesia sebanyak 7% atau 2,5 juta orang secara nasional terpolarisasi atau terbelah akibat perbedaan pilihan calon presiden. Adapun responden yang disurvei terkait perbedaan pilihan calon presiden itu di antaranya dengan orang tua, saudara, teman dekat, tetangga, teman kerja.

Pemilih yang mengalami polarisasi biasanya malas untuk berkomunikasi maupun sekadar tegur sapa dengan anggota keluarga yang berbeda pilihan. Namun, angka pemilih yang mengalami polarisasi ini sangat rendah. “Hanya tujuh dari 100 orang yang terpengaruh oleh perbedaan pilihan politik yang berakibat pada putusnya silaturahmi atau tidak melakukan tegur sapa sesama teman dekat,” kata Saiful Mujani seperti dilihat dalam kanal Youtube SMRC TV.

Oleh karena itu, isu adanya polarisasi politik akibat perbedaan pilihan dalam Pemilu 2024 ini terlalu dibesar-besarkan. Klaim bahwa polarisasi begitu mengkhawatirkan itu berlebihan, menyesatkan, dan menakut-nakuti bahkan bisa menghilangkan daya saing dalam Pemilu dan demokrasi. Padahal kompetisi adalah hakikat dari demokrasi. □



Arya Fernandes

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., Wakil Ketua MPR RI

## Pemilu 2024 Tidak Sepanas Pemilu 2019

**K**OMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) terpilih pada Pemilu 2024. Dalam penetapan hasil Pemilu pada 20 Maret 2024, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengumumkan, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%, sedangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraup 40.971.906 suara atau 24,95%, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,47%. Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka unggul di 36 provinsi. Kini tim pemenangan Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud tengah memproses dugaan terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Secara umum tidak ada gejolak yang berarti dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini.

Pemilu 2024 dapat dikatakan berlangsung aman, tertib, dan damai. Meskipun demikian, usai Pemilu 2024 terjadi beberapa kali demonstrasi dan aksi massa yang mengekspresikan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD dan di depan Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa ini tidak sampai menimbulkan kerusuhan dan anarkis.

Wakil Ketua MPR, Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., menilai, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan kondusif. Ketegangan dan gesekan di masyarakat yang dikhawatirkan menimbulkan perpecahan dan polarisasi tidak terjadi sebagaimana pada Pemilu 2019. Menurut Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, berkurangnya polarisasi di masyarakat pada Pemilu 2024 ini karena kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan calon (Paslon) sehingga masyarakat pemilih mendapatkan alternatif dan tersebar.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Syarif Hasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 ini, berikut wawancara dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, beberapa waktu lalu di Ruang Kerjanya Gedung Nusantara III. Petikannya.

**Pemilu 2024 berjalan dengan kondusif, aman, dan tertib, serta hampir tidak ada gejolak yang berarti. Kekhawatiran adanya gesekan dan ketegangan di masyarakat tidak terjadi. Bagaimana pandangan Bapak melihat pelaksanaan Pemilu 2024 ini?**

Memang benar, Pemilu 2024 ini tidak sepanas Pemilu 2019 lalu. Ada beberapa faktor, di antaranya karena kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 ini diikuti tiga pasangan Capres dan Cawapres. Ini berbeda dengan pemilihan presiden pada Pemilu 2019 yang hanya diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres. Karena itu, pada Pemilu 2024, masyarakat memiliki alternatif pilihan, dan tidak terjadi polarisasi. Itu sebabnya Pemilu

2024 ini terasa lebih demokratis dibanding Pemilu 2019 lalu.

Pemilihan presiden yang hanya diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres bisa membuat masyarakat tidak punya pilihan dan alternatif. Tetapi pada Pemilu 2024 ini, kontestasi Pilpres diikuti tiga pasangan Capres dan Cawapres, sehingga masyarakat mendapatkan alternatif pilihan. Dengan demikian sebenarnya kualitas demokrasi pada Pemilu 2024 ini jauh lebih baik dan membuat masyarakat juga jauh lebih optimistis.

**Apakah ketegangan dan friksi di masyarakat selalu terjadi bila kontestasi Pilpres hanya diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres?**

Saya pikir seperti itu. Sebab, masyarakat hanya fokus pada dua pilihan saja. Perhatian masyarakat hanya tertuju pada dua pilihan itu, sehingga masyarakat pemilih pun terbelah menjadi dua. Karena itu, kalau kontestasi Pilpres diikuti lebih banyak pasangan Capres dan Cawapres tentu lebih baik lagi. Bila *presidential threshold* untuk mengajukan pasangan Capres dan Cawapres dihilangkan maka tentu akan lebih baik lagi.

Bila *presidential threshold* diperkecil atau dihilangkan maka muncul banyak pasangan Capres dan Cawapres. Hal ini bisa membuat masyarakat memiliki kesempatan memilih yang terbaik. Jadi, memang seharusnya *presidential threshold* itu mulai dikurangi, tidak lagi 20% seperti sekarang ini, tetapi bisa 15% atau kurang. Maka koalisi partai atau gabungan partai juga semakin banyak dan karena itu proses demokrasi menjadi semakin baik.

**Apakah Bapak masih melihat adanya potensi perpecahan di masyarakat usai Pemilu 2024 ini?**

Saya pikir potensi perpecahan itu sudah tidak signifikan lagi. Masyarakat sudah optimistis dengan Pemilu 2024 yang sudah berlangsung. Suasana seperti sekarang ini tidak ditemukan ketika kita melaksanakan Pemilu 2019 lalu.

**Setelah melewati kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2024, dan KPU sudah menetapkan pemenang kontestasi itu, apakah perlu upaya rekonsiliasi untuk mengembalikan persatuan dan kebersamaan para elit politik?**



Saya tidak melihat adanya perpecahan di masyarakat akibat Pemilu 2024 ini. Gejala yang tidak signifikan dalam Pemilu 2024 itu merupakan bagian dari proses demokrasi. Sesuatu hal yang biasa adanya kontestasi dan persaingan. Tetapi, kontestasi dan persaingan hanya untuk Pemilu saja. Ketika Pemilu sudah usai, kita harus kembali seperti semula. Jadi, sebenarnya tidak terlalu buang tenaga untuk melakukan upaya rekonsiliasi.

**Bagaimana Bapak melihat gambaran demokrasi setelah pesta demokrasi Pemilu 2024 usai?**

Semuanya sudah gamblang. Memang di



FOTO-FOTO: HUMAS MPR

sana sini tentu masih ada yang kurang dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Itulah yang harus kita perbaiki bersama. Tetapi, secara substansial, Pemilu 2024 ini sudah berjalan dengan baik. Ada proses demokrasi. Ada rivalitas. Sebagai sebuah negara besar, di beberapa tempat memang masih terjadi kekurangan. Meski demikian, kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu itu tidak mengurangi makna dari substansi Pemilu itu sendiri.

**Apakah artinya demokrasi kita semakin bagus?**

Kita berharap seperti itu, karena kita sudah sukses menyelenggarakan Pemilu. Semestinya indeks demokrasi kita juga naik. Tetapi, bukan kita yang mengukur indeks demokrasi itu. Indikator untuk mengukur indeks demokrasi juga banyak. Tetapi, kita harapkan pelaksanaan Pemilu ini bisa mendongkrak indeks demokrasi kita. Semoga saja, transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu bisa meningkatkan indeks demokrasi kita.

**Apa yang masih menjadi catatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu, dan apa masukan dan saran dari Bapak kepada mereka yang masih belum menerima hasil Pemilu 2024?**

Menurut hemat saya, sistem Pemilu kita perlu diperbaiki mulai dari soal *presidential threshold* hingga penyusunan calon legislatif. Sudah saatnya kita pikirkan ulang soal sistem terbuka yang kita pakai sekarang menjadi sistem tertutup. Jadi, semua suara masuk ke partai dan partai yang menentukan Caleg. Sistem terbuka dalam Pemilu sekarang ini perlu dievaluasi, karena Caleg yang tidak dikenal harus berani mengeluarkan banyak uang agar bisa terpilih. Dari sisi demokrasi hal ini tentu tidak bagus. Karena itu, biarkan partai yang menentukan. Atau, dengan sistem kombinasi juga bisa.

Mari kita melangkah ke depan. Yang penting, bagaimana rakyat bisa menikmati hasil pembangunan. Bagaimana presiden terpilih bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekarang waktunya untuk memberi kesempatan kepada presiden terpilih untuk menunaikan janji-janjinya. Pemerintah di bawah presiden terpilih melaksanakan pembangunan sesuai janji-janji kampanyenya. □

## Kongres Desa Indonesia 2024

# Bamsoet Dorong Peningkatan Pembangunan Desa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketahanan sosial dalam kehidupan masyarakat desa menjadi cikal bakal dan simpul penguat ketahanan nasional.

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, secara rasio saat ini diperkirakan jumlah penduduk di perkotaan lebih banyak jika dibandingkan jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan, atau sekitar 52% penduduk tinggal di perkotaan. Kondisi ini salah satunya disebabkan masih belum seimbangny pembangunan di pedesaan. Sehingga kota masih menjadi magnet yang penuh daya tarik mendorong laju urbanisasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, pada tahun 2035 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan meningkat menjadi 66,6%. Bahkan, menurut proyeksi Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan akan mencapai 70% pada tahun 2045.

“Jika tidak diantisipasi maka daya tahan kota akan semakin melemah, sehingga tidak mampu lagi untuk menopang perkembangan populasi yang bertumbuh menurut deret ukur. Sementara di sisi lain, kehidupan desa akan semakin tertinggal dalam laju peradaban, karena tidak tersentuh oleh pembangunan,” ujar Bamsoet dalam Kongres Desa Indonesia 2024 di Jakarta, Sabtu (23/3/24).

Hadir, antara lain Koordinator Nasional Desa Bersatu M. Asri Anas, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Surta

Wijaya, Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indra Utama, Ketua Umum DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia Irawadi, Ketua Umum DPP Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Ferry Radiansyah, Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia Moh. Tahrir, Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia Widhi Hartono, Ketua Umum DPN Persatuan Rakyat Desa Nusantara Arya Jaya Wardana, dan Ketua Umum DPP Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia Dadang Holilluddin

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, realita tersebut harus menjadi pijakan berfikir mengenai urgensi memprioritaskan pembangunan desa. Percepatan pembangunan desa yang menurut BPS tahun 2022 jumlahnya mencapai 83.794 desa, adalah sebuah keniscayaan. Mengingat potensi desa sebagai lumbung pangan yang memiliki kontribusi penting dalam mengatasi kerawanan pangan. Indonesia adalah negara agraris, di mana lahan pertanian hanya dapat ditemukan di daerah pedesaan.

“Kita boleh sedikit merasa lega karena berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia memiliki skor indeks ketahanan pangan 60,2 dan menempati ranking 63 dari 113 negara.



Kondisi ini relatif aman. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa ketahanan pangan di tahun 2024 akan menghadapi tantangan besar di tengah kondisi ketidakpastian glo-

bal. Disamping dampak perubahan iklim yang ekstrim, serta lonjakan harga energi dan pangan dunia,” kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menegaskan, penting disadari bahwa pembangunan desa haruslah bersifat holistik. Tanpa menegasikan pentingnya pembangunan fisik material, pembangunan desa juga tidak boleh melupakan aspek non-fisik. Seperti nilai-nilai kearifan lokal dan wawasan kebangsaan.

“Selain kontribusinya dalam menopang ketahanan pangan, desa adalah sumber peradaban yang kaya akan beragam kearifan lokal. Nilai-nilai gotong royong, kerjasama dan saling tolong-menolong, adab sopan santun, serta penghormatan terhadap norma sosial, adalah nilai-nilai jati diri ke-Indonesiaan yang sudah tergerus di kehidupan perkotaan. Namun, masih tumbuh dan berkembang di pedesaan,” urai Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan

Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, dari desa nilai-nilai luhur Pancasila dapat ditemukan rujukan senyatanya. Kehidupan masyarakat desa yang lekat dengan kehidupan ilahiah, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, guyub rukun dalam kebersamaan, penuh toleransi dan tepa selira, adalah kristalisasi nilai-nilai luhur kearifan lokal yang menjadi inspirasi rumusan sila-sila Pancasila. Dari kehidupan di pedesaan juga dapat diambil pembelajaran untuk hidup bersama dalam keberagaman, di mana nilai-nilai sosial telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan keseharian masyarakat desa.

“Ketahanan sosial dalam kehidupan masyarakat desa inilah yang menjadi cikal bakal dan simpul penguat ketahanan nasional. Dimana desa-desa menjadi himpunan unit pemerintahan terkecil yang akan menjadi perangkai keutuhan NKRI, sekaligus ujung tombak dalam mencegah dan menangkal paham yang menggerus nilai-nilai nasionalisme,” pungkas Bamsuet. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Buat OJK dan Pelaku Industri Keuangan**

# Amir Uskara Mendorong Agar Perkuat Edukasi dan Literasi ke Masyarakat

Industri keuangan jangan hanya berlomba memperbanyak nasabah dan memberi iming-iming untung, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan penambahan wawasan kepada nasabah.



**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes., mengajak dan mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri di sektor keuangan, seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, dan lainnya, untuk memperkuat edukasi dan literasi kepada masyarakat seputar produk-produk industri keuangan di Indonesia.

"Hal itu sangat saya tekankan, sebab saat ini masih banyak permasalahan dan kasus di industri ini. Seperti, kasus gagal

bayar asuransi yang membuat nasabah bingung dan kecewa. Saya khawatirkan seringnya kasus seperti itu akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat. Dampaknya, akan memukul industri keuangan sendiri. Sementara kita ingin industri itu survive," kata Amir Uskara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/3/2024).

Untuk itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Sulsel I, ini memberikan saran agar industri keuangan,

jangan hanya berlomba memperbanyak nasabah dan memberi iming-iming untung. Tapi, juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan penambahan wawasan kepada nasabah.

"Dari hal kecil saja, yakni saat penandatanganan kontrak, industri harus memandu agar nasabah membaca secara seksama dan memahami semua klausul dan isi dari berkas yang akan ditandatangani. Selain itu, industri harus memberikan penjelasan soal keuntungan sekaligus resiko-resiko produk yang akan dibeli nasabah," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.

Hal itu sangat penting, tegas Amir Uskara, sebab selama ini masyarakat sangat minim wawasan seputar produk keuangan yang sudah dan akan mereka beli. Informasi sebagian besar didapat dari agen atau marketing saja.

"Saya berharap, masyarakat juga harus bijak sebelum membeli atau menggunakan produk industri keuangan. Masyarakat mesti memperdalam pengetahuan juga. Antara lain, dengan meminta informasi langsung dari industri atau dengan menghubungi OJK, meminta penjelasan. Pengetahuan yang baik tentang produk industri keuangan akan menjaga masyarakat dari berbagai kejadian negatif saat klaim terjadi, seperti gagal bayar itu," terangnya.

Peran OJK sendiri, menurut politisi PPP ini, cukup baik tapi belum maksimal. Makanya, di setiap Raker DPR dengan OJK, DPR sangat mendorong dan mengupayakan untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja dan peran OJK.

"Salah satu upayanya adalah dengan menambah dua anggota Dewan Komisiner (DK) OJK, dengan tujuan agar OJK lebih kuat lagi, dalam rangka melakukan pengaturan terhadap industri keuangan, khususnya asuransi yang sering banyak masalah. Apa yang dilakukan DPR ini adalah bentuk edukasi juga agar industri sektor keuangan menjadi lebih baik," pungkasnya. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Kualitas Pemberdayaan Perempuan

# Lestari Moerdijat: Melibatkan Peran Perempuan Harus Konsisten Dilakukan

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik harus konsisten ditingkatkan dalam upaya mempersempit kesenjangan gender yang terjadi.

**B**ERBAGAI upaya untuk melibatkan peran perempuan di berbagai bidang harus konsisten dilakukan.

Dukungan pemerintah melalui sejumlah kebijakan dan semangat perempuan Indonesia untuk berkiprah lebih luas bagi bangsa, harus terus ditingkatkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/3).

Badan PBB untuk pemberdayaan perempuan, UN Women, mencatat berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global dari Forum Ekonomi Dunia, kualitas pemberdayaan perempuan di Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara-negara di dunia.

Berdasarkan data 2023 tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki kinerja yang cukup baik dalam pencapaian di sektor pendidikan. Namun, pemberdayaan perempuan Indonesia di sektor ekonomi dan partisipasi politik masih harus ditingkatkan.

Dalam pemberdayaan ekonomi partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia sekitar 53% - 54%, tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir.

Sementara, partisipasi politik perempuan di Indonesia juga lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata global, jumlah perempuan Indonesia di parlemen yang sekitar 22% sedangkan rata-rata global 26%.

Pemberdayaan perempuan, menurut Lestari, bukan sekadar mewujudkan kesetaraan gender dari sisi jumlah. Lebih dari itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, perempuan juga harus berperan signifikan di berbagai aspek kehidupan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dengan keterlibatan perempuan yang cukup baik di sektor pendidikan, ujar Rerie, sejatinya perempuan Indonesia mampu berperan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengingatkan, berdasarkan sejarah, di masa lalu perempuan di Nusantara berperan aktif memimpin kesultanan atau kerajaan, hingga berperang melawan penjajah.

Para pendahulu bangsa kita, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, adalah perempuan pejuang yang tidak ragu berperan aktif memimpin dalam menghadapi berbagai persoalan negeri.

Rerie sangat berharap, semangat heroik perempuan pejuang itu terus tumbuh pada para perempuan di masa kini, sehingga keterlibatan aktif perempuan dalam setiap pengambilan keputusan publik dapat terus ditingkatkan. □

Delegasi Investor Cina

# Bamsoet Dukung Smelter Nikel dan Pabrik Baja di Sorong

Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia pada 2023 dengan perkiraan volume produksi 1,8 juta metrik ton, berkontribusi 50% terhadap total produksi nikel global.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi rencana dua investor asal Cina, PT. Sheng Wei New Energy Technology dan Beijing Jianlong Heavy Industry Group Co, Ltd., (Beijing Jianlong) membangun smelter nikel dan pabrik pembuatan baja dengan metode economic green di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp 75 triliun.

“Keberadaannya akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Papua, khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan 3.000 lebih tenaga kerja akan terserap untuk mengoperasikan smelter nikel dan pabrik baja tersebut,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran PT. Sheng Wei New Energy Technology dan Beijing Jianlong, di Jakarta, Rabu (20/3/24).

Turut hadir, antara lain: Perwakilan PT Shengwei Mr. Ru Guo Sheng, Vice President Profesor Senior Engineer Beijing Jianlong Mrs. Huang Dan, SINO Group Indonesia Randy Irianto dan Dani Peng, serta MCC Group Beijing Mr. Yu Zheng Fei

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Beijing Jianlong merupakan grup perusahaan berskala besar. Beroperasi di berbagai industri yang mencakup eksplorasi sumber daya,



pertambangan, pengolahan mineral, peleburan, pengolahan, manufaktur produk mekanik dan listrik.

“Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi dan penggulangan baja mentah mencapai 35 juta ton, menduduki peringkat kedelapan di dunia, dan kelima di Tiongkok. Perusahaan ini juga menempati peringkat ke-137 di antara 500 perusahaan Tiongkok teratas pada tahun 2020 dan peringkat ke-50 di antara 500 perusahaan manufaktur Tiongkok teratas pada tahun 2020,” jelas Bamsuet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, program hilirisasi sumberdaya alam yang digagas Presiden Joko Widodo akan kembali dilanjutkan oleh Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Sehingga para investor tidak perlu khawatir, karena pemerintahan Indonesia selanjutnya tetap akan memberikan berbagai kemudahan. Baik dari ketersediaan bahan baku, infrastruktur penunjang, maupun berbagai stimulus ekonomi dan kemudahan lainnya.

“Berdasarkan laporan Badan Survei

Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel global diperkirakan mencapai 3,6 juta metrik ton pada 2023. Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia pada 2023 dengan perkiraan volume produksi 1,8 juta metrik ton, berkontribusi 50% terhadap total produksi nikel global. Begitupun dengan potensi industri baja yang sangat besar. Kebutuhan baja nasional diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai 100 juta ton pada 2045 dengan nilai investasi sebesar USD 100 miliar atau Rp1.553 triliun,” pungkaskan Bamsuet. □

## Permasalahan UMKM di Indonesia

# Lestari Murdijat: Hubungan Sektor Industri dan UMKM Harus Segera Diwujudkan

Masalah terbesar dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah tidak adanya koneksi dengan industry sehingga belum terbangun rantai pasok dan transfer teknologi dengan baik.

**H**UBUNGAN yang kuat antara industri dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia harus segera direalisasikan untuk mewujudkan rantai pasok dan transfer teknologi yang baik dalam upaya membangun sektor UMKM yang tangguh.

“Sektor UMKM yang dekat dengan pengembangan ekonomi rakyat harus mendapat perhatian serius sehingga mampu menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3).

Di awal Maret 2024, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mengungkapkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) di Indonesia adalah tidak adanya koneksi dengan industri sehingga belum terbangun rantai pasok dan transfer teknologi dengan baik.

Catatan Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023, kontribusi UMKM mencapai 61%



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PDB Indonesia, dengan serapan tenaga kerja 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Jumlah pelaku usaha sektor UMKM tercatat 67 juta.

Berdasarkan catatan tersebut, ujar

Lestari, terdapat potensi besar untuk mendorong perekonomian nasional melalui sektor UMKM, bila sejumlah kendala bisa segera diatasi.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, sejumlah langkah afirmasi untuk mendukung pendanaan sektor produktif misalnya, dapat direalisasikan dengan segera.

Menurut Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, beragam potensi ekonomi di daerah dengan kearifan lokal yang dimilikinya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan sektor UMKM.

Sedangkan UMKM yang sudah ada, tambah Rerie, dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui pengembangan yang berkelanjutan dengan dukungan jaringan usaha, rantai pasok, dan transfer teknologi yang lebih baik.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, butuh intervensi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem yang mampu mewujudkan pengembangan sektor UMKM nasional yang berkesinambungan. □

Terima Pengurus HIKMAHBUDHI

# Bamsoet Dorong Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda adalah bagian dari sumberdaya potensial yang akan menentukan seperti apa wajah Indonesia di masa depan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menekankan bahwa kemajuan peradaban suatu bangsa tidak semata-mata tercermin dari megahnya gedung-gedung pencakar langit, atau penggunaan teknologi yang super canggih, atau pertumbuhan ekonomi yang melonjak tinggi. Pada hakikatnya, kemajuan peradaban berakar pada mentalitas sumberdaya manusianya, khususnya terhadap para generasi muda bangsa.

“Dari perspektif komposisi demografi, tercatat jumlah pemuda di Indonesia yang berusia 15 sampai 30 tahun pada tahun 2023 mencapai lebih dari 66 juta jiwa. Menunjukkan pentingnya pembangunan mental dan karakter sumberdaya manusia sebagai subyek pembangunan. Hal ini juga yang menjadi salah satu poin terpenting dan menjadi intisari dari Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), di Jakarta, Rabu (20/3/24).

Pengurus HIKMAHBUDHI yang hadir, antara lain : Ketua Umum Wiryawan, Bendahara Umum Candra Aditya, Kabid Kajian Strategis Jan Suarwantono, Ketua Cabang Hikmahbudhi Jakarta Utara Mega Mendung, dan Sekjen Hikmahbudhi Jakarta Utara Ananda Budi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam konteks ke-Indonesiaan, seiring perkembangan zaman, peran pemuda dalam pembangunan juga semakin signifikan. Pemuda dituntut untuk dapat menempatkan diri dalam



menjalankan berbagai peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Sebagai kekuatan moral, pemuda diharapkan mampu memberikan keteladanan akhlak, sikap, dan perilaku yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Penguatan komitmen generasi pemuda sebagai kekuatan moral ini terasa kian penting, karena seiring pesatnya laju modernitas zaman, tantangan dalam menghadapi dekadensi moral generasi muda bangsa akan semakin kompleks dan dinamis,” jelas Bamsoet.

Mantan Presidium Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagai bagian dari agen perubahan, pemuda harus mengawal dan mengambil peran dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat madani yang maju, dengan tetap menjadikan keberadaban dan jatidiri ke-Indonesiaan sebagai dasar pijakan. Sebagai penggerak perubahan, pemuda dituntut untuk dapat bersikap kritis, berfikir visioner dan melihat jauh ke depan, serta mempunyai daya kreasi dan imajinasi yang kuat mengenai kondisi ideal yang dicita-

citakan.

“Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda adalah bagian dari sumberdaya potensial yang akan menentukan seperti apa wajah Indonesia di masa depan. Sebagai bagian dari penerus estafet kepemimpinan nasional, pemuda diharapkan tidak hanya sekedar kompeten dan berdaya saing, tetapi juga ber-karakter dan berwawasan kebangsaan. Generasi muda yang berwawasan kebangsaan adalah generasi yang berhati Indonesia dan berjiwa Pancasila,” pungkask Bamsoet. □

## Diskusi Cuaca Ekstrem

# Lestari Moerdijat: Indonesia Rentan Terhadap Berbagai Bentuk Cuaca Ekstrem

Kolaborasi lintas sektor harus diperkuat untuk memasyarakatkan pentingnya pola hidup keseharian yang bersifat antisipatif dalam menghadapi dampak perubahan iklim di tanah air.

**U**PAYA mitigasi bencana kerap berhadapan dengan siklus bencana berulang seperti banjir di berbagai kota di pantai utara Jawa, serta wilayah Indonesia lainnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi bertema Cuaca Ekstrem dan Ancamannya Bagi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/3).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si., (Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB) dan Dr. Agie Wandala Putra (Kepala Tropical Cyclone Warning Center / TCWC Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Dian Novita Susanto (Ketua Umum DPP Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI) dan Masnuah (Perempuan Nelayan Demak) sebagai penanggap.

Laporan BNPB, tambah Lestari, terdapat 292 bencana alam di Indonesia pada rentang 1 Januari-15 Februari 2024. Bahkan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Bali dilanda longsor setelah hujan lebat, hingga menimbulkan korban jiwa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk cuaca ekstrem, yang dapat memengaruhi kehidupan jutaan orang serta ekosistemnya

yang beragam.

Catatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas), tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, mengestimasi kerugian negara akibat perubahan iklim periode 2020-2024 sebesar Rp 544 triliun. Kerugian lainnya adalah hilangnya nyawa warga negara akibat bencana alam yang terjadi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Berdasarkan kenyataan itu, Rerie berharap, setiap warga negara menyadari bahwa kita adalah bagian dari ekosistem, yang setiap tindakan kita dalam bentuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam menjadi bagian dari penyebab hadirnya cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, berpendapat, pemahaman terhadap dampak hidrometeorologi penting untuk dipahami masyarakat. Dia mengungkapkan, BNPB mengedepankan pemahaman terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak hidrometeorologi itu dan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi atau menyikapi sejumlah risiko yang ada.

Dalam upaya itu, jelas Raditya, membangun sistem informasi yang mumpuni menjadi penting. Dia mengakui, untuk memahami risiko bencana memerlukan sistem informasi yang baik dan data yang akurat. Karena, tambah dia, hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami dampak anomali iklim, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui penguatan mitigasi hingga tingkat paling kecil, seperti di desa-desa.

Kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, dan media massa, tegas Raditya, harus mampu diwujudkan dalam upaya membangun resiliensi masyarakat hingga tingkat desa untuk menghadapi sejumlah risiko bencana dampak perubahan iklim.

Kepala Tropical Cyclone Warning Center Jakarta - BMKG, Agie Wandala Putra, berpendapat, ancaman cuaca ekstrem sangat penting dipahami masyarakat. Sehingga, tambah dia, informasi cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem harus mudah dipahami. Menurut Agie, kondisi cuaca bisa diamati dan dipelajari agar masyarakat siap dan tanggap terhadap ancaman yang ditimbulkannya.

Saat ini, ungkap dia, kita sedang menghadapi dampak perubahan iklim dengan berbagai bentuknya, seperti suhu muka bumi yang terus meningkat, sehingga kawasan es di puncak Jayawijaya misalnya semakin menipis.

Menurut Agie, sesuatu sedang terjadi pada bumi dengan berbagai implikasinya. Dia mengingatkan, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki karakteristik dan kondisi iklim yang sama. Sehingga, tegas Agie, kepedulian

pemerintah daerah dalam memahami risiko bencana di wilayahnya masing-masing sangat penting.

Dalam merespon kondisi tersebut, Agie menyarankan agar masyarakat menjaga karakteristik di lingkungan mereka dengan berbagai upaya seperti antara lain perbaikan drainase.

Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto mengungkapkan, perubahan iklim berdampak serius pada pertanian dengan adanya kekeringan panjang, musim tanam terganggu dan terjadi ledakan penyakit tanaman. Produksi beras pun, jelas Novita, turun 15%-45% dari tahun sebelumnya. Bahkan, tambah dia, ada yang gagal panen.

Dampak perubahan iklim, kata Novita, bukan hanya terhadap cuaca lokal, tetapi juga dalam bentuk pemanasan global. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dan pembukaan lahan, tambah dia, memengaruhi fenomena pemanasan global.

Menurut Novita, sejumlah upaya mitigasi harus dilakukan untuk menyikapi cuaca ekstrem, antara lain dengan pemanfaatan tanaman yang toleran terhadap cuaca dan mengupayakan biodiversifikasi.

### Ancaman Nyata Bagi Nelayan

Perempuan Nelayan Demak, Masnuah, mengungkapkan, ancaman perubahan iklim bagi para nelayan adalah ancaman yang nyata. Hasil tangkapan ikan yang menurun drastis dan air rob yang menenggelamkan desa pesisir, tambah Masnuah, merupakan kenyataan yang dihadapi di keseharian.

Menurut Masnuah, perempuan sampai ikut melaut itu juga karena dampak perubahan iklim. Perempuan terpanggil untuk menjadi nelayan itu, tambah dia, karena jumlah tangkapan ikan yang terus menurun.

Ironisnya, tegas dia, pemerintah tidak memberikan perlakuan yang sama antara perempuan nelayan dan nelayan laki-laki. Selain itu, ungkap Masnuah, sejumlah kebijakan pembangunan di kawasan pesisir juga tidak mendukung perbaikan terhadap lingkungan sekitarnya.

Pembangunan jalan tol dan izin penambangan pasir di kawasan sedimentasi sekitar pesisir Kabupaten Demak, ujar Masnuah, malah mempercepat tenggelamnya desa-desa di kawasan itu. □

## Apresiasi Resolusi DK PBB

# HNW: Gencatan Senjata di Gaza Harus Segera Dilaksanakan

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyambut baik sikap Amerika Serikat yang kali ini memilih abstain dan tidak menggunakan vetonya terhadap rancangan keputusan DK PBB terkait Gaza.

**W**AKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengapresiasi Resolusi No. 2728 (2024) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang sepakat untuk menuntut diberlakukannya gencatan senjata di Palestina (terutama jalur Gaza) untuk segera dilaksanakan di Bulan Ramadan, serta mengarah kepada gencatan senjata yang berkelanjutan atau secara permanen.

“Resolusi DK PBB ini patut diapresiasi, walau sebenarnya sangat terlambat. Namun, yang tidak kalah penting adalah mengawal dan memastikan bahwa tuntutan gencatan senjata dalam Resolusi ini ditaati oleh Israel, karena sudah banyak sekali aksi Israel yang melanggar hukum internasional, dan tidak menaati resolusi DK PBB,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (26/3).

Secara khusus, HNW —sapaan akrab Hidayat Nur Wahid— menyambut baik sikap Amerika Serikat yang sebelumnya sudah tiga kali memveto rancangan keputusan DK PBB terkait Gaza, tapi kali ini AS memilih abstain, dan tidak menggunakan vetonya untuk kepentingan Israel sebagaimana yang dilakukannya selama ini. Dalam Resolusi ini, 14 negara anggota DK PBB menyatakan setuju (Cina, Perancis, Rusia, Inggris, Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia, Korea Selatan dan Swiss), sedangkan Amerika Serikat memilih abstain.

“Tidak digunakannya veto oleh AS kali ini menunjukkan bahwa AS yang dikenal sebagai sekutu sangat dekat Israel mungkin sudah sangat muak dengan kejahatan perang, genosida dan kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina/Gaza. Semoga ini bukan sekedar lips service politik jelang Pilpres di AS, tapi menjadi salah satu langkah serius



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

untuk bertobat, dan untuk ke depan tidak lagi mendukung Israel yang jelas-jelas telah melakukan teror dengan banyak melakukan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM), bahkan genosida terhadap rakyat Palestina/Gaza,” jelasnya.

HNW juga berharap agar PBB bersama OKI, Liga Arab, dan masyarakat dunia, serta organisasi-organisasi internasional lainnya ikut mengawasi pelaksanaan resolusi ini, dan perlu memberikan sanksi hukum yang tegas kepada Israel bila kembali tidak menaati Resolusi yang disepakati oleh PBB. “Selain itu, terhadap kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel juga perlu dipertanggungjawabkan melalui peradilan Internasional,” tukasnya.

Apalagi, lanjutnya, indikasi pembangkangan Israel atas Resolusi PBB kembali dipertontonkan, hanya beberapa jam setelah Resolusi DK PBB itu diterbitkan. Israel masih saja melakukan aksi genosidanya dengan menghujani Rafah (wilayah selatan Gaza,

Palestina) dengan bom yang menyebabkan makin bertambahnya korban dari kalangan sipil, di mana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. “Ini jelas tidak menghormati, bahkan pembangkangan terhadap Resolusi DK PBB yang baru saja diterbitkan. Sekaligus menambah catatan pelanggaran HAM dan hukum internasional oleh Israel,” ujarnya.

Sebagai informasi, setidaknya ada beberapa poin penting di dalam Resolusi DK PBB tersebut. Poin-poin tersebut adalah tuntutan agar dilakukan gencatan senjata di bulan Ramadan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah kepada gencatan senjata yang berkelanjutan. Menuntut pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat, serta memastikan akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan kebutuhan kemanusiaan lainnya, dan tuntutan lebih lanjut agar para pihak mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berkaitan dengan

tahanan.

Poin penting lainnya adalah menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza, dan menegaskan kembali tuntutan untuk menghilangkan hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar yang juga sejalan dengan hukum kemanusiaan internasional, seperti Resolusi 2712 (2023) dan 2720 (2023).

Lebih lanjut, HNW mengatakan, pihak (perlawanan) Palestina (Hamas) juga sudah menyatakan siap mematuhi Resolusi DK PBB ini dengan melepaskan para warga Israel yang ditahan, dan mestinya Israel juga segera membebaskan warga Palestina yang telah ditahan bertahun-tahun secara semena-mena oleh Israel. "Pihak Gaza/Palestina sudah kembali siap mematuhi, tinggal pihak lainnya (yakni Israel) untuk segera mematuhi kesepakatan Internasional

melalui Resolusi DK PBB ini," tegasnya.

HNW menambahkan, agar Pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB juga berperan lebih aktif dan efektif dalam memastikan Resolusi DK PBB ini agar bisa terlaksana dengan benar dan baik. "Hal itu tentu dalam kerangka dua amanat konstitusi kita, yakni menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi dan terlibat aktif mewujudkan perdamaian dunia dengan keadilan," pungkasnya. □

### Buka Puasa Bersama Anak Yatim

# Bamsoet Apresiasi 'Jakarta With Love' (JWL) Santuni 500 Anak Yatim

Sikap tolong-menolong, saling membantu dan berbagi kasih, telah mendarah daging dan menjadi sikap mayoritas yang mewakili arus utama dalam karakter kebangsaan kita.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi konsistensi Yayasan Jakarta Berbagi Kasih 'Jakarta With Love' yang selama 15 tahun berturut-turut selalu menyelenggarakan buka puasa bersama sekaligus menyantuni 500 anak yatim. Sebagai bentuk realisasi Hablum Minannas (meningkatkan

hubungan harmonis manusia dengan manusia), di tengah suasana puasa yang merupakan bagian dari Hablum Minallah (meningkatkan hubungan manusia dengan Allah).

"Santunan terhadap anak yatim bukanlah sekadar acara seremonial yang menjadikan mereka sebagai objek. Melainkan sebagai bentuk uluran tali kasih kita kepada mereka

yang merupakan bagian dari generasi penerus bangsa. Sekaligus uluran tali sayang kita kepada mereka, bahwa walaupun orang tuanya telah tiada, mereka masih memiliki kita semua sebagai saudara seiman sekaligus saudara sebangsa dalam bingkai kasih sayang kemanusiaan," ujar Bamsoet usai menghadiri buka puasa bersama sekaligus santunan 500 anak yatim,



diselenggarakan Jakarta With Love, di Jakarta, Kamis (21/3/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan haus. Melainkan juga melatih dan menajamkan kepekaan sosial, sekaligus momen berbagi kebahagiaan kepada sesama, khususnya kepada anak yatim. Sehingga bisa terjalin

soliditas dan solidaritas yang kuat untuk menghasilkan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“UNICEF mencatat, sedikitnya ada 153 juta anak yatim piatu di seluruh dunia, sekitar 5,2%-nya tinggal di lembaga pengasuhan atau panti asuhan. Sedangkan di Indonesia, jumlah anak yatim piatu diperkirakan mencapai 106.000 anak, tinggal di 4.800 panti

asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak,” jelas Bamssoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kehadiran Jakarta With Love melalui berbagai kegiatan sosialnya telah mencerminkan betapa kuatnya ikatan soliditas dan solidaritas bangsa Indonesia. Tidak heran apabila laporan World Giving Index yang pada tahun 2022 kembali menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Lebih membanggakan, pencapaian sebagai negara paling dermawan tersebut diraih selama lima tahun berturut-turut.

“Artinya sikap tolong-menolong, saling membantu dan berbagi kasih, telah mendarah daging dan menjadi sikap mayoritas yang mewakili arus utama dalam karakter kebangsaan kita. Begitupun pada saat pandemi Covid-19 yang telah menggerus berbagai sendi peri kehidupan, sama sekali tidak melemahkan ikatan kebangsaan kita. Bahkan justru menjadikan soliditas kebangsaan menjadi semakin kuat,” pungkas Bamssoet. □

## Bamssoet Hadiri Buka Puasa Bersama FOCI

# Berikan Bantuan untuk Yayasan Tunanetra dan Rumah Pejuang Kanker

Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk memperbanyak kegiatan sosial. Khususnya, untuk berbagi serta memupuk rasa solidaritas antaranak bangsa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Ketua Dewan Pembina Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Bambang Soesatyo, mengapresiasi pengurus dan anggota komunitas mobil sports Ferrari Indonesia yang mengisi kegiatan di bulan Ramadan dengan melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama. Di antaranya dengan memberikan bantuan uang tunai kepada Yayasan Tunanetra Elfasan dan Rumah Pejuang Kanker Ambu.

“Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk memperbanyak kegiatan sosial. Khususnya, untuk berbagi serta memupuk rasa solidaritas antaranak bangsa. Kegiatan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

buka puasa bersama FOCI yang diikuti dengan memberikan sambutan bantuan sosial merupakan kegiatan positif yang harus terus digalakan,” ujar Bamsuet usai menghadiri buka puasa bersama Ferrari Owners Club Indonesia di Jakarta, Ahad malam (24/3/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Yayasan Elfasan

yang diberikan bantuan oleh FOCI merupakan yayasan pendidikan, pelatihan serta panti tempat tinggal bagi anak-anak tunanetra yang terletak di daerah Jakarta Timur. Yayasan Elfasan berusaha untuk mewujudkan anak tunanetra yang unggul, hidup mandiri, inklusif dan dapat bermanfaat bagi orang lain.

“Sementara Rumah Pejuang Kanker Ambu merupakan rumah singgah bagi pasien

kanker yang tidak mampu serta sedang berobat ke rumah sakit di Kota Bandung. Rumah Pejuang Kanker Ambu memberikan fasilitas secara gratis kepada para pejuang kanker, baik tempat tinggal, makan untuk pasien dan pendampingnya ataupun keperluan obat-obatan yang tidak tercover BPJS,” kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina FOCI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, semangat kebersamaan yang dibangun dalam komunitas otomotif merupakan manifestasi dari nilai kebangsaan yang harus terus diperjuangkan. Karena seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi akan mengubah paradigma, dinamika, serta kompleksitas berbagai tantangan kebangsaan yang dihadapi.

“Semangat persaudaraan yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas otomotif harus dapat dimanifestasikan menjadi semangat dan komitmen kolektif oleh segenap elemen bangsa. Semangat brotherhood yang kuat dari komunitas otomotif, harus dapat dibangun dan dikembangkan agar menjadi modal sosial yang sangat penting untuk merekatkan kohesi ikatan kebangsaan,” pungkas Bamsuet. □

## Suasana Politik di Bulan Puasa

# HNW: Agama adalah Katalisator bagi Pemeluknya

Keberagaman hari-hari besar agama bisa menjadi katalisator atau pintu pembuka bagi setiap pemeluk agama untuk segera bangkit dari kondisi apapun yang terjadi sebelumnya.



**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengajak bangsa Indonesia untuk menyukuri kebhinnekaan yang dimiliki, yang mementingkan “ketunggalikaan,” baik keberagaman dalam hal seni budaya, orientasi politik, maupun keberagaman agama. Tak terkecuali, keragaman hari-hari besar yang dimiliki dan diimani masing-masing pemeluk agama.

Hidayat Nur Wahid, yang akrab disapa HNW, menyatakan hal itu usai gelar acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim di rumah dinas Wakil Ketua MPR di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024). Hadir dalam acara tersebut sejumlah petinggi PKS, tokoh agama, tokoh



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

masyarakat, pengurus masjid dan musala, serta sekitar duapuluhan anak yatim dari Yayasan Al Akhyar Kemang beserta pengurus.

Lebih lanjut, HNW menyatakan, keberagaman hari-hari besar agama itu bisa menjadi katalisator atau pintu pembuka bagi setiap pemeluk agama untuk segera bangkit dari apapun kondisi yang terjadi sebelumnya, menuju ketunggalikaan kita sebagai umat yang berukhuwah, baik islamiyah, basyariyah, maupun wathaniyah. Karena-

nya, agama juga berkontribusi besar menjaga kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk paska pemilihan umum lima tahunan yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

Agama, menurut HNW, selain mengajarkan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran, juga menganjurkan kesabaran, pentingnya kerukunan serta persaudaraan. Agama juga mengajak penganutnya selalu berpandangan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi baik, dan yang sudah

baik agar menjadi lebih baik lagi.

Dalam konteks ini, kata HNW, kita bangsa Indonesia, khususnya Partai Keadilan Sejahtera yang afiliasi politiknya sangat jelas, di satu pihak kami memahami bahwa pemilu sudah berlalu, tetapi hasil dari pemilu itu menyisakan masalah yang disengketakan. Karena itu, partai mempergunakan hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, melalui mekanisme yang dibuka oleh aturan negara, yaitu DPR dan MK," kata HNW menanggapi berbagai dinamika kehidupan berpolitik dan bernegara, paska pemilu yang waktunya hampir bersamaan dengan peringatan hari-hari besar umat beragama, termasuk bulan puasa.

Agama, menurut HNW, juga mengajarkan umatnya melakukan amal ma'rif dengan cara yang ma'rif dan nahyi munkar tidak dengan cara yang munkar juga, dan karenanya berani mengoreksi bila ada kecurangan, ketidakjujuran, pelanggaran hukum, maupun tindak manipulasi. Apalagi, dalam konteks pemilu, upaya melawan kecurangan yang dilakukan melalui MK adalah bagian dari aturan yang dibuat oleh konstitusi. Dan, itu adalah kesepakatan yang harus ditaati bersama.

"Agama menggariskan kita untuk melaksakan kesepakatan bersama, di Muhammadiyah dinamakan darul ahdi atau negara kesepakatan. Karena kita bersepakat tentang konstitusi, dan konstitusi mengatur tentang pemilu, termasuk bila terjadi sengketa berpemilu. Semoga MK diisi oleh para hakim, bukan hanya beragama tapi dipersyaratkan menjadi negarawan," kata HNW.

Karena itu, HNW berharap, para hakim di MK betul-betul berbuat adil, berani menegakkan keadilan dan kebenaran, menolak intervensi dan parsial. Dengan begitu, apapun hasilnya akan lebih diterima oleh siapapun, baik menang maupun kalah. Termasuk mereka yang dinyatakan menang, kemudian terkoreksi, juga akan legowo kalau memang terbukti ada kebohongan.

"Semoga para hakim MK jadi penghuni surga, karena itu penting untuk menghukumi dengan melaksanakan kebenaran dan keadilan, dengan mengoreksi kecurangan dan pelanggaran aturan hukum, serta benar-benar berlaku yang independen," pungkas HNW. □



Delegasi China Energy

# Bamsoet Dukung Investor China Kembangkan Green Energy di Indonesia

Indonesia memiliki potensi dan sumber energi bersih yang berlimpah, seperti panas bumi, tenaga surya, ataupun tenaga air.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi rencana investasi berbagai perusahaan asal China dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan green energy di Indonesia. China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Construction (BUMN asal China), satu di antaranya, akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Tenaga Surya (PLTA dan PLTS) untuk mempercepat migrasi listrik PLN dari PLTU ke PLTA dan PLTS. Juga Huayou Cobalt dan PT Indonesia Pomalaa Industrial Park sebagai bagian dari rantai industri baterai litium yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Indonesia memiliki potensi dan sumber energi bersih yang berlimpah, seperti panas bumi, tenaga surya, ataupun tenaga air. Potensi listrik melalui PLTA mencapai sebesar 76,09 gigawatt. Namun, saat ini kapasitas yang terpasang baru mencapai 5,28 gigawatt atau baru mencapai 6,9% dari kapasitas yang ada. Sedangkan potensi

PLTS sekitar 4.8 KWh/m<sup>2</sup> atau setara 112.000 GWp, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp," ujar Bamsoet usai menerima jajaran China Energy Engineering Group Shanxi Electric Power Construction dan Huayou Cobalt, di

Jakarta, Kamis (21/3/24).

Turut hadir, antara lain Executive Director China Energy Wang XianWen, dan Managing Director Huayou Cobalt Huang YePing.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan berbagai negara lainnya dalam pengembangan PLTS. Di kawasan ASEAN saja, Indonesia masih kalah dengan Vietnam yang telah memiliki PLTS dengan kapasitas mencapai 16.504 MW, ataupun Malaysia sebesar 1.493 MW. Di Asia, India memiliki kapasitas PLTS mencapai 38.983 MW.

“Pemerintah Indonesia sudah menargetkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN (RUPTL PLN) 2021 - 2030, kapasitas PLTS di Indonesia sudah mencapai 4.680 MW. Di satu sisi pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh dukungan dari swasta agar potensi alam yang luar biasa ini bisa dikembangkan

untuk mendapatkan sebesarnya kemakmuran rakyat,” jelas Bamsuet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, pengembangan EBT yang antara lain bersumber dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tenaga angin/bayu (PLTB), ataupun tenaga surya (PLTS), mutlak dilakukan karena tidak bisa lagi selamanya bergantung kepada energi fosil yang semakin menipis.

“Kementerian ESDM menargetkan bauran energi dari fosil ke EBT bisa mencapai 23% di tahun 2025. Sedangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Indonesia menargetkan di usia kemerdekaannya yang ke-100 di tahun 2045, bauran EBT sudah bisa mencapai 30%,” pungkas Bamsuet. □



**Implementasi Sila-sila Pancasila**

- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai  
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan  
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah  
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati  
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
- Berhenti berseteru, mulailah bersatu  
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban  
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat  
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada  
- Berhentilah berstat tidak, mulailah bermusyawarah
- Berhenti malas, mulailah bekerja keras  
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi  
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

**EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
 NKRI Sebagai Bentuk Negara  
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

## Perjalanan K-3 Memberi **Dukungan** kepada MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Setelah setahun bekerja, Komisi Kajian Ketatanegaraan (K-3) menyusun buku laporan. Berbagai rapat dijelaskan di buku itu. Laporan kinerja K-3 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan oleh K-3 selama tahun 2023. Pertanggungjawaban ini disampaikan khusus kepada Pimpinan MPR dan Forum Rapat Gabungan. K-3 juga merekomendasikan perlunya UU Tentang MPR.

**B**ERTEMPAT di Tangerang, Banten, 14 Maret 2024, Komisi Kajian Ketatanegaraan (K-3) MPR menggelar Rapat Pleno. Rapat Pleno yang digelar pada saat itu sangat istimewa, karena Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani hadir. Berbagai agenda dibahas dalam rapat tersebut, salah satunya adalah penyampaian Laporan K-3 Tahun 2023. Laporan setebal 118 itu secara simbolis diserahkan dari Ketua K-3, Ir. H. Daryatmo Mardiyanto, kepada Ahmad Muzani.

Laporan hasil kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun itu terurai dalam enam bab. Pimpinan K-3 yang terdiri dari Ketua Ir. H. Daryatmo Mardiyanto, para Wakil Ketua yang terdiri dari Dr. H. Rambe K. Zaman, MSc., MM.; Martin Hutabarat, SH.; Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., MH.; Dra. Hj. Siti Masrifah, MA.; dan Djamal Aziz, BSc., SH., MH.; dalam kata pengantar menuturkan, kerja pengkajian dilaksanakan oleh anggota K-3 melalui berbagai rapat, yakni Rapat Pleno, Rapat Pleno Khusus, FGD, Rapat Kelompok, Rapat Tim Perumus, dan Rapat Pimpinan.

K-3 selalu berkomitmen untuk memberikan dukungan optimal terhadap MPR sebagaimana amanat Tata Tertib Nomor. 1 Tahun 2019



bahwa kedudukan K-3 sebagai unsur pendukung MPR.

Lebih lanjut dalam kata pengantar dikatakan, pada awal tahun 2023, Pimpinan MPR melaksanakan Rapat Pimpinan yang menghasilkan keputusan, antara lain adalah MPR perlu melakukan kajian dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tersendiri tentang MPR (RUU Tentang MPR) dan Rancangan Tata Tertib MPR. Merespon hal tersebut, Pimpinan MPR, Pimpinan Badan Pengkajian, dan Pimpinan K-3, melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi. Hasil kesepakatan dalam rapat tersebut adalah memberi penugasan kepada K-3 untuk melakukan kajian terhadap naskah akademik dan RUU Tentang MPR.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut, K-3 melaksanakan Rapat Pleno yang hasilnya adalah menerima penugasan dengan sebaik-baiknya dan membuat peta jalan pelaksanaan penugasan kajian RUU Tentang MPR. Peta Jalan yang dimaksud, adalah agar dapat tercapai hasil kajian RUU Tentang MPR yang komprehensif maka kajian dilaksanakan dengan dua tahap: Tahap pertama, yakni tahun 2023 fokus menyelesaikan rekomendasi materi/substansi naskah akademik RUU Tentang MPR yang di dalamnya membahas



delapan sub topik yang strategis dan urgensi RUU Tentang MPR tersendiri.

Selanjutnya tahap kedua, yakni tahun 2024, akan menyelesaikan naskah akademik beserta RUU Tentang MPR. Meski demikian pada bulan Juli tahun 2023, K-3 juga telah menyerahkan laporan perkembangan kajian kepada Pimpinan MPR dan Badan Pengkajian. Laporan ini merupakan laporan lengkap tahap pertama sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam kata pengantar disebut laporan kinerja K-3 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan oleh K-3 selama tahun 2023. Pertanggungjawaban ini disampaikan khususnya kepada Pimpinan MPR dan Forum Rapat Gabungan, serta bentuk koordinasi K-3 kepada Badan Pengkajian. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 62 Ayat (5) Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 20219.

Dalam laporan tersebut dijabarkan mengenai urgensi UU Tentang MPR tersendiri. Dijelaskan, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara bertahap yang berlangsung sejak tahun 1999-2002, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang

fundamental, khususnya terkait dengan struktur dan kewenangan MPR. Perubahan kewenangan MPR yang termaktub dalam konstitusi bertujuan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel.

Tidak hanya perubahan kewenangan, secara kelembagaan MPR juga mengalami

restrukturisasi pelembagaan perwakilan di mana pasca perubahan UUD, MPR tidak lagi terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan, melainkan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Perubahan struktur kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga perwakilan dalam melaksanakan



tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi, *checks and balances*. *Check and balances system* yang dilakukan perlu dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga permusyawaratan yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Perubahan struktur lembaga permusyawaratan ini juga berfungsi untuk memperkuat sekaligus memperkuat legitimasi kedaulatan rakyat. Anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui proses pemilu memiliki pondasi yang kuat dalam

merepresentasikan kehendak dan kedaulatan rakyat. Oleh karena pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat.

MPR dalam UUD memiliki kewenangan tersendiri. Konstitusi mengamanatkan MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut UUD, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden

dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Oleh karena itu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, MPR ditentukan tetap mempunyai pimpinan yang tersendiri yang dipilih dari dan oleh anggota MPR sendiri, terlepas dari pimpinan DPR dan DPD. □

## Alasan Mengapa Perlu UU Tentang MPR

Pengaturan yang secara tersendiri diperlukan untuk memperkuat kedudukan, fungsi, dan wewenang. Jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya yang tercantum dalam konstitusi seperti MK, MA, KY, dan BPK, keempat lembaga tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ENGATURAN yang secara tersendiri diperlukan untuk memperkuat kedudukan, fungsi, dan wewenang. Jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya yang tercantum dalam konstitusi seperti MK, MA, KY, dan BPK, keempat lembaga tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri. Dalam Laporan K-3 Tahun 2023 diuraikan fakta yuridis terkait perlunya UU Tentang MPR. Dijelaskan di buku laporan itu

adanya perbedaan karakteristik kelembagaan antara MPR, DPR, dan DPD membuat pengaturan mengenai ketiga lembaga negara tersebut yang semula diatur dalam satu undang-undang sebaiknya diatur secara tersendiri. Hal ini dikarenakan kedudukan, fungsi, dan wewenang berbeda dengan lembaga negara DPR dan DPD.

Pengaturan yang secara tersendiri diperlukan untuk memperkuat kedudukan, fungsi, dan wewenang. Jika dibandingkan

dengan lembaga negara lainnya yang tercantum dalam konstitusi, seperti MK, MA, KY, dan BPK, keempat lembaga tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.

Sebagai pengaturan dasar, pengaturan terkait MPR dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya berisikan penjabaran wewenang dan beberapa ketentuan pokok saja. Oleh karena itu diperlukan undang-undang yang dapat lebih memerinci aturan-aturan pokok



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dalam UUD.

Bentuk lain rekonstruksi MPR secara kelembagaan dapat dilakukan dengan memformulasikan unsur pendukung MPR hingga penambahan tugas MPR guna memaksimalkan fungsi MPR sebagai lembaga cerminan rakyat dalam hukum tata negara, sebagaimana disebutkan dalam UUD.

Selain itu terdapat beberapa pengaturan penting terkait MPR secara kelembagaan yang diatur dalam peraturan tata tertib MPR, seperti pengaturan terkait keputusan MPR, sidang, dan rapat MPR hingga tugas dan kewenangan lain yang sesuai untuk mengoptimalkan fungsi MPR yang seyogyanya diatur dengan undang-undang agar memiliki daya berlaku yang lebih kuat.

Dasar sosiologisnya, dalam buku laporan K-3 terkait pentingnya UU Tentang MPR dikatakan, pembentukan UU Tentang MPR dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dalam kehidupan ketatanegaraan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan

rakyat yang mampu menjalankan wewenang dan tugasnya secara efektif, transparan, optimal, dan aspiratif.

Kedudukan dan wewenang MPR sangatlah penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran yang sangat besar dan menentukan arah kehidupan ketatanegaraan dan kelangsungan bangsa.

Kehadiran MPR dituntut mampu untuk menjawab segala permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih pasca perubahan UUD, di mana MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi salah satu lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD.

Untuk itu dibutuhkan lembaga MPR yang mampu menjalankan wewenang dan tugasnya secara efektif, transparan, optimal, dan aspiratif sehingga diharapkan dapat menjawab segala tuntutan dan perkembangan dalam dinamika

ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah melalui undang-undang MPR tersendiri.

Di halaman 35 Laporan K-3 diuraikan lembaga-lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD untuk diatur dalam undang-undang. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa seluruh lembaga negara yang diperintahkan oleh UUD untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang telah diatur dalam UU tersendiri, kecuali MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Padahal sejatinya sebagai bagian dari perintah UUD, MPR, DPR, DPD, juga diperintahkan oleh UUD untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang, sementara DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Ayat (3) UUD.

Di sisi lain terdapat pula landasan yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosilogis dalam pembentukan UU Tentang MPR. Disebutkan secara filosofis, pembentukan UU Tentang MPR merupakan upaya untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan melalui suatu lembaga permusyawaratan rakyat yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi permusyawaratan yang sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat tidak dapat dilepaskan dari dasar filosofis mengenai kedaulatan. Dasar filosofis ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD. Dalam Pancasila filosofis kedaulatan terdapat pada Sila IV.

Jika kerakyatan itu secara substansi merupakan jiwa demokrasi di Indonesia maka pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat tidak sepenuhnya benar kecuali jika mengaitkannya dengan kata 'dipimpin' di arahkan oleh hikmah dan kebijaksanaan. Suatu demokrasi tidak hanya didasarkan pada kekuatan akal manusia, melainkan adanya 'hikmah' yang bisa diartikan wisdom, nilai-nilai luhur termasuk ajaran wahyu atau unsur spiritualisme. Pemahaman terhadap Sila IV juga harus dikaitkan dengan Sila I, Sila II, Sila III, dan Sila V. □





**Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.**

Ketua MPR RI

## Tentang Transformasi Orang Muda Merespons Perubahan Dunia Kerja

**T**EKNOLOGI kecerdasan atau artificial intelligence (AI) yang perkembangannya demikian pesat menuntut orang muda Indonesia terus beradaptasi dan berkreasi, terutama karena teknologi kecerdasan berdampak signifikan terhadap proses produksi, bisnis, dan dunia kerja. Negara hendaknya segera memfasilitasi orang muda untuk lebih mendalami pemahaman akan teknologi kecerdasan, guna menghindari kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dengan ketrampilan angkatan kerja era terkini dan di masa depan.

Perkembangan teknologi kecerdasan yang terus berproses tak hanya mengubah mekanisme dalam proses produksi, rantai pasok hingga bisnis dan perdagangan, namun juga terus mengubah kebutuhan dunia kerja pada kompetensi atau ketrampilan pekerja. AI memang diyakini tak akan pernah mampu mengungguli keunggulan komparatif manusia. Namun, demi efisiensi, akurasi dan kecepatan memenuhi permintaan pasar atau konsumen, peran signifikan AI tak terhindarkan lagi.

Konsekuensi logis dari progres berkelanjutan teknologi AI adalah tuntutan kepada semua orang muda untuk terus beradaptasi dan belajar mengikuti perkembangan, serta kreatif mengembangkan keterampilan. Sebab, ketika memasuki dunia kerja nantinya, orang muda era terkini menghadapi tantangan yang sangat berbeda dengan generasi orang tua mereka.

Orang muda terkini sudah berada dalam era teknologi digital, dan dunia kerja sudah mengandalkan teknologi kecerdasan. Dengan pesatnya teknologi kecerdasan, dunia kerja terus berubah, karena banyak pekerjaan dan ketrampilan manual di masa lalu tidak terpakai lagi. Maka, permintaan atau kebutuhan pasar kerja akan ketrampilan pekerja pun tak luput dari perubahan.

Sudah muncul perkiraan atau asumsi bahwa di masa depan, kesenjangan antara keterampilan pekerja dan kebutuhan dunia kerja akan terus terjadi. Perkiraan tentang kesenjangan ketrampilan ini hendaknya ditanggapi sebagai peringatan sekaligus dorongan kepada orang muda untuk tidak pernah lelah beradaptasi dengan roda perubahan.

Pada agenda pertemuannya tahun lalu, Forum Ekonomi Dunia memaparkan The Future of Jobs Report 2023. Paparan ini sudah dipublikasikan dalam skala yang luas dengan harapan mendapatkan perhatian dari semua pihak. Laporan itu memprediksi mahadata (bigdata) menempati peringkat teratas pada jenis teknologi digital yang bisa menciptakan lapangan kerja. Hasil survei juga mengindikasikan sektor bisnis melihat bahwa pekerjaan baru yang berkaitan dengan mahadata akan terus bertumbuh.

Pertumbuhan itu akan ditandai dengan permintaan akan spesialis mahadata, keahlian pengelola data, spesialis analis data, tenaga spesialis pembelajaran mesin kecerdasan buatan, hingga tenaga profesional untuk keamanan siber. Pertumbuhannya diperkirakan

rata-rata 30% pada 2027.

Selain itu, perdagangan elektronik atau e-dagang diyakini akan menjadi sumber keuntungan yang potensial. Oleh karena itu, diperkirakan akan ada dua juta pekerjaan baru yang dibutuhkan, misalnya meliputi spesialis e-dagang, spesialis transformasi digital, serta spesialis pemasaran dan strategi digital.

Itulah gambaran sekilas peran signifikan kecerdasan buatan dan pentingnya pengumpulan serta pengelolaan mahadata pada bidang produksi, bisnis dan perdagangan. Kecenderungan yang sama pun akan terjadi pada sektor lain, seperti penawaran dan permintaan layanan kesehatan, transportasi publik hingga layanan publik yang bersumber dari regulator negara atau pemerintah.

Sejatinya, masyarakat Indonesia pada umumnya sudah tidak asing lagi dengan AI yang penerapannya sudah bersentuhan dengan beberapa aktivitas harian. Saat menggunakan telepon pintar (smartphone), setiap orang sudah bersinggungan langsung dengan penerapan AI, misalnya saat memanfaatkan ChatGPT, Google Assistant dan Siri serta Deepface pada facebook.

Namun, pengenalan dan pemahaman akan AI hendaknya tidak berhenti sampai di situ. Orang muda hendaknya didorong untuk memahami peran signifikan AI terhadap dunia kerja, dan juga tentang betapa penerapan AI menuntut pembaruan kompetensi pekerja sejalan dengan perubahan zaman.

Pesan utama kepada orang muda adalah segeralah bertransformasi. Jika tidak segera beradaptasi dengan progres AI, transformasi akan menjadi sulit dan orang muda tidak mudah untuk masuk dunia kerja di masa depan. Sebab, cepat atau lambat, adalah keniscayaan bahwa tata kelola pemerintahan dan perusahaan harus mengadopsi kecerdasan buatan karena tuntutan perubahan zaman.

Maka, negara harus sungguh-sungguh peduli akan perubahan strategis ini. Negara hendaknya segera memfasilitasi orang muda untuk lebih mendalami pemahaman akan teknologi kecerdasan, guna menghindari kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dengan ketrampilan angkatan kerja era terkini dan di masa depan.

Konsekuensinya, negara harus lebih agresif dalam investasi bagi pembangunan manusia, khususnya orang muda. Untuk tujuan itu, negara juga harus mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dengan semua institusi pendidikan bagi keperluan literasi digital, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Perlunya intervensi dan investasi negara bersifat segera, terutama karena Indonesia sedang dalam proses menyongsong bonus demografi menuju dekade 2045. Pada dekade itu, Indonesia akan memperoleh bonus demografi, yang ditandai dengan 70% dari jumlah penduduk dalam usia produktif (15-64 tahun), dan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun).

Pada rumusan tentang Visi Indonesia Emas 2045 yang bertepatan dengan perayaan 100 tahun usia kemerdekaan, ditetapkan fokus pembangunan nasional pada empat pilar; meliputi pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu agenda penting dari pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja adalah memberi ruang seluas-luasnya kepada orang muda untuk bertransformasi sejalan dengan progress AI agar mereka punya kompetensi merespons dinamika zaman. □

*Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1445 H.*

**Kesenjangan Gender Global**

# Lestari Moerdijat: Keterlibatan Perempuan di Sektor Ekonomi dan Politik Harus Diatasi Bersama

Kesenjangan keterlibatan perempuan di sektor ekonomi dan politik harus mendapat perhatian dan diatasi secara bersama-sama, dalam upaya menjawab tantangan di masa datang.

**B**ERBAGAI upaya harus dilakukan, tidak hanya menghadirkan kebijakan yang mendukung berkurangnya kesenjangan itu, lebih dari itu sangat dibutuhkan dukungan semua pihak dalam merealisasikan peningkatan keterlibatan perempuan di ruang-ruang publik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/3).

Berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global dari Forum Ekonomi Dunia, kualitas pemberdayaan perempuan di Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara di dunia.

Pemeringkatan ini didasarkan sejumlah faktor seperti pencapaian pendidikan, kesehatan, dan kelangsungan hidup, pemberdayaan ekonomi, dan juga partisipasi politik.

Laporan itu mencatat yang masih menjadi tantangan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia adalah dalam pemberdayaan ekonomi dan partisipasi politik.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tercatat sekitar 53%-54%, dan persentase tersebut tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir.

Selain itu, partisipasi politik perempuan di Indonesia tercatat masih di 22%, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata global yang jumlah perempuan di parlemen tercatat 26%.

Menurut Lestari, upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi bisa konsisten dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan wirausaha, baik sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, maupun kemampuan ekspor-impor dan sejumlah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sektor lainnya.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai, kemampuan dasar perempuan yang mampu melakukan banyak hal dalam satu kesempatan merupakan salah satu potensi yang bisa mendorong keberhasilan perempuan di sektor ekonomi. Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, upaya peningkatan kemampuan perempuan di berbagai sektor harus diterapkan sejak dini dengan dukungan keluarga dan sistem pendidikan yang lebih baik.

Selain itu, tegas Rerie, dukungan afirmasi

peningkatan jumlah perempuan di parlemen juga membutuhkan upaya yang menyeluruh dari semua pihak.

Karena, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, selain dukungan kebijakan, kesiapan kemampuan perempuan secara teknis dan mental juga harus diwujudkan dalam proses berkiprah di sektor politik.

Rerie sangat berharap, isu kesenjangan keterlibatan perempuan di sektor ekonomi dan politik dapat segera diatasi secara bersama-sama, dalam upaya menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa datang. □



## *Dari Senayan* Memperjuangkan Nasib Komedian

Apresiasi kepada komedian di tanah air dirasa masih kurang sehingga saat Komeng dan Denny Cagur terpilih menjadi wakil daerah dan wakil rakyat mereka akan mendorong adanya Hari Komedi Nasional. Hari Komedi dirasa perlu sebab peringatan itu untuk memberi apresiasi dan perhatian lebih kepada para komedian. Hari dan bulan jatuhnya Hari Komedi diusulkan dari lahirnya komedian Bing Slamet. Ayah Adi Bing Slamet itu selain penghibur tawa, juga seorang pejuang kemerdekaan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**K**ATA 'uhuyy' memecah keheningan Kantor KPU, Menteng, Jakarta, 20 Maret 2024, saat Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk pemilihan umum (pemilu) anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Jawa Barat. Koor Uhuyy meluncur dari orang-orang yang hadir di ruangan itu ketika nama Alfiansyah Bustami alias Komeng ditetapkan dan disahkan sebagai peserta pemilu anggota DPD yang memiliki raihan suara tertinggi, 5,3 juta suara.

Dalam Pemilu DPD tahun ini, bisa jadi pria kelahiran Jakarta itu tercatat dalam sejarah sebagai peserta pemilu yang bisa meraih suara di luar dugaan banyaknya. Apalagi, di Provinsi yang terbilang padat penduduk itu, selisih raihan suara Komeng dengan raihan suara nomor 2, 3, dan 4, jaraknya terpaut jauh. Peraih suara terbanyak nomor 2, Anya Rina Casmayanti, misalnya, hanya meraih 1.976.561 suara atau terpaut 3 juta lebih di banding Komeng. Begitu pula dengan peraih suara nomor 3, Jihan Farida, dapat 1.823.907 suara. Dan, peraih suara keempat terbanyak, Agita Nurfianti, hanya 1.168.837 suara.

Dengan disahkannya hasil suara Pemilu DPD Jawa Barat maka keempat orang calon anggota DPD terpilih, yakni: Komeng, Anya Rina, Jihan Fahira, dan Agita, maka selanjutnya mereka akan dilantik menjadi anggota DPD dan akan berkantor di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Komeng berhasil memenangkan Pemilu DPD bisa jadi kejutan bagi dirinya. Bisa jadi sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Di salah satu media online, ia mengatakan, tak ada ambisi (untuk menjadi anggota DPD). Bagi dirinya terpilih

*alhamdulillah*, tidak terpilih juga mengucapkan *alhamdulillah*. Selama ini ia menyebut sibuk *shooting*. Bukti dari ketidakambisya dalam pemilu yang memilih wakil daerah itu ditunjukkan oleh alumni HMI Cabang Jakarta itu dengan tidak pasang baliho.

Komeng berhasil memenangi Pemilu DPD disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, dia memang sangat populer. Pria kelahiran 25 Agustus 1970 itu mempunyai banyak talenta. Ia seorang komedian, pembawa acara, penyiar radio, pengisi suara, bintang





iklan, dan kerap tampil dalam berbagai sinetron.

Dari catatan di *Wikipedia*, diketahui bahwa Komeng menjadi penyiar Radio SK Jakarta sejak 1993 hingga 1996, dan Bens Radio Jakarta pada 1996. Pernah membintangi beberapa serial komedi, seperti *Kompur Diamor* (1991), *Akal-Akalan* (1996), *Otak-Otak Kuda* (1996), *Malioboro* (1996), *Putri Duyung* (2001—2002), dan *Lola & Liliput* (2002—2003). Ia juga kerap tampil di televisi sebagai komedian dan juga presenter, salah satunya ia dikenal membawakan acara komedi Spontan dengan jargon “Spontan... Uhuy!”.

Pada pertengahan 2002, Komeng berakting di salah satu komedi situasi berjudul: *Kungfu Komeng*. Di acara tersebut, Komeng berada akting dengan aktris Tessa Kaunang. Komeng juga pernah menjadi bintang iklan produk sepeda motor Yamaha bersama Valentino Rossi.

Faktor *kedua*, kemenangan Komeang dalam Pemilu DPD tahun ini bisa juga disebabkan oleh foto dirinya yang kontras dengan calon anggota DPD lainnya. Di lembar kertas suara Pemilu DPD, Komeng berada pada nomer urut 10, dan fotonya terlihat tak biasa. Pose fotonya terlihat mata melotot dan ekspresi penuh canda. Foto yang *nyleneh* inilah yang mampu menarik jutaan pasang mata tertuju kepada foto dirinya, sehingga sadar atau tidak akhirnya mencoblos nomer 10.

Kejutan pemilu dari Jawa Barat juga muncul dari Pemilu Legislatif (Pileg). Komedian yang lain, yakni Denny Cagur, yang ikut meramaikan pileg di Dapil II Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, juga lolos ke Senayan. Dapil ini merupakan dapil yang terbilang keras, sebab di sana juga ada caleg lain, seperti mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan artis Rachel Maryam, serta Dede Yusuf.

Sebagai calon dari PDI Perjuangan, Denny Cagur dalam pileg tahun ini mampu meraih suara sebanyak 58.043 suara, dan ini merupakan raihan suara tertinggi dari caleg yang maju lewat PDI Perjuangan.

Dari catatan *Wikipedia*, pria yang memiliki

nama asli Denny Wahyudi itu dikenal sebagai *Raja Gombal*. Dunia lawak dirintis bersama Bedu (kemudian digantikan Wendy) dan Narji dalam grup yang bernama Cagur. Grup itu didirikan tahun 1997. Nama Cagur semakin dikenal luas setelah mereka muncul dalam acara *Goyang Inul* yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta, serta bermain dalam acara lawak *Chating (Canda Itu Penting)* yang ditayangkan di stasiun TPI, dan juga *Cagur Naik Bajaj* di ANTV bersama grup lawak Bajaj.

Talenta Denny Cagur semakin eksis ketika kepiawaiannya dalam membawakan acara yang diselengi dengan gaya humornya yang segar. Dalam wawancara dengan Helmy Yahya, Denny menceritakan bahwa ia



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pertama kali menjadi *presenter* saat membawakan acara *Mamamia Show* di Indosiar, setelah sebelumnya tampil sebagai peserta dalam program *Supermama Selebconcert* di stasiun televisi yang sama. Denny didapuk sebagai pembawa acara *Mamamia* bersama dengan Ruben Onsu.

Sudah banyak acara televisi yang dibawakannya. Sebut saja acara musik *Dahsyat*, *Comedy Project*, dan lain sebagainya. Selain itu, Denny juga terkenal lewat goyongannya, yaitu *Goyang Bang Jali*.

Lalu apa yang hendak diperjuangkan oleh Komeng dan Denny Cagur setelah terpilih menjadi anggota DPD dan DPR? “Saya akan

memperjuangkan adanya Hari Komedi Nasional,” ujar Komeng yang termuat dalam berbagai media online. Ia menegaskan hal demikian sebab saat ini belum ada hari untuk memperingati komedi, sedang untuk mengapresiasi kegiatan seni lainnya, seperti musik dan film, sudah ada hari-hari untuk memperingatinya.

Bila penetapan Hari Film Nasional setiap 30 Maret berdasarkan film yang disutradarai dan diproduksi oleh orang Indonesia kali pertama pada 30 Maret 1950 dan Hari Musik Nasional pada 9 Maret yang ditetapkan berdasarkan hari lahir pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R Supratman, 9 Maret 1903. Maka Komeng mengusulkan Hari Komedi pada 27 Septem-

ber. Hari dan bulan itu merupakan hari lahirnya komedian legendaris Indonesia, Bing Slamet. Bing Slamet lahir pada 27 September 1927. Jasa almarhum, selain menghibur masyarakat juga disebut menghibur para pejuang selama periode 1942-1945. Pria yang memiliki nama asal Ahmad Syeh Albar itu merupakan ayah dari Adi Bing Slamet.

Dari catatan *Wikipedia*, diungkap, Bing Slamet pernah bergabung pada Divisi I Brawijaya sebagai Barisan Penghibur. Di sini, kemampuannya bermusik dan melawak mulai terasah. Seolah tanpa pamrih, Bing lalu bersedia ditempatkan di kota mana saja. Bing yang mulai masuk Radio Republik Indonesia (RRI) kemudian ditempatkan di Yogyakarta



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dan Malang. Ia pun sempat bergabung di Radio Perjuangan Jawa Barat. Di balik corong mikrophone radio, Bing bahkan tampil sebagai agitator yang menyemangati pejuang menghalau kaum penjajah.

Keinginan untuk menjadikan 27 September sebagai Hari Komedi juga disampaikan oleh Denny Cagur. "Hari Komedi salah satu hal yang kita dorong," tuturnya dalam salah satu media online. Dirinya senang Komeng terpilih sehingga mereka bisa bersama-sama mendorong lahirnya Hari Komedi.

Diungkap oleh Denny Cagur, keinginan adanya Hari Komedi bukan ide Komeng

semata. Hal itu merupakan ide para komedian yang tergabung dalam Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI. "Di organisasi ini soal Hari Komedi sudah dibahas beberapa kali," ungkapnya. Denny Cagur tidak hanya ingin memperjuangkan adanya Hari Komedi, namun dirinya juga hendak memperjuangkan nasib para komedian di tanah air.

PASKI merupakan organisasi yang bertujuan melindungi, melestarikan, memajukan kesejahteraan, serta membentuk kepribadian seniman komedi Indonesia yang berakhlak mulia, dan berdasarkan pada rasa saling asah, asih, asuh serta berkeadilan.



Kepengurusan (PASKI) Periode 2022-2026 di bawah pimpinan Jarwo Kwat. Pria yang memiliki nama asli Sujarwo itu beberapa tahun yang lalu kerap mengisi acara Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer dikenal dengan Empat Pilar MPR di TVRI.

Disebut, kepengurusan PASKI periode ini terdiri dari seluruh perwakilan dari berbagai lintas generasi (baik senior maupun junior). Mulai dari seniman tradisional, seniman kreatif komedi, pelaku industri komedi, sampai dengan institusi yang mengkaji khusus humor.

PASKI memiliki Dewan Pembina, Letjen (Purn) Agum Gumelar, Erman Suparno, Indrodjojo Kusumonegoro (Indro Warkop), Deddy Gumelar (Mi'ing Bagito), dan Toto Muriadi (Tarzan Srimulat). Dewan Penasihat terdiri dari Rachmat Gobel, Dailami Firdaus, Agi Sugiyanto, dan Dedet R. Bur. Sedang Majelis Kehormatan dan Kode Etik terdiri dari Maman Suherman (Kang Maman), Lies Hartono (Cak Lontong), Derry Sudarisman (Derry 4 Sekawan), Rinaldi Agustaf, dan HM. Nabil.

Meski sebagai organisasi yang anggotanya para pelawak, namun PASKI tetap bisa melakukan kegiatan yang sifatnya serius. Salah satu kegiatan itu adalah Anugerah Komedi Indonesia (ANUKOM). ANUKOM menurut catatan yang ada di *Wikipedia* merupakan penghargaan tahunan bagi insan komedian di Indonesia yang diadakan atau diselenggarakan oleh PASKI. Penghargaan ini pertama kali diadakan pada tahun 2021 dan disiarkan oleh TVRI. Selanjutnya pada tahun 2022, ANUKOM mulai ditayangkan oleh *iNews*.

Lebih lanjut terungkap dalam web itu, PASKI menilai bahwa komedi di Indonesia memerlukan suatu ajang pemberian penghargaan yang dapat menjadi rumah di mana seniman komedian Indonesia mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya dalam menghibur masyarakat Indonesia. Karena sebelumnya, tak pernah ada suatu acara ajang penghargaan yang dikhususkan untuk para komedian Indonesia. □

AWGI dari berbagai sumber



## Ahmad Seniman Serba Bisa

Pria ini memiliki nama asli Ahmad Syech Albar. Talenta yang dimiliki sangat luar biasa. Ia bisa bermain musik, mencipta lagu, menyanyi, akting, hingga melawak. Di masa pendudukan Jepang dan Agresi Militer Belanda, Ahmad yang memiliki nama panggung Bing Slamet itu juga ikut berjuang. Di masa Orde Lama, Presiden Sukarno kerap mengajak Bing Slamet keliling dunia untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Pria asal Cilegon itu juga mentor bagi legenda penyanyi dan seniman lainnya. Kiprahnya dalam dunia seni dan turut membela bangsa menjadikan hari lahirnya diusulkan jadi Hari Komed Nasional.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**K**OMENG, Denny Cagur, dan PASKI mengusulkan Hari Komed Nasional berdasarkan pada hari dan bulan Bing Slamet dilahirkan tentu bukanlah suatu lawakan, meski mereka adalah para komedian atau pelawak. Di sela-sela mereka *cengengesan* dan menghibur orang, para komedian itu bisa berpikir serius.

*Nah* keseriusan melahirkan Hari Komed dengan mengacu pada tanggal dan bulan lahir Bing Slamet pastinya dilandasi suatu alasan yang kuat. Bila kita melihat sejarah hidup Bing Slamet, pria ini memiliki nama asli Ahmad Syech Albar. Ia lahir di Cilegon, 27 September 1927. Cilegon saat ini merupakan salah satu pemerintahan kota yang ada di Provinsi Banten.

Ahmad merupakan buah kasih antara Raden Entik Ahmad dan Hadijah.

Orangtuanya ingin agar anaknya menjadi dokter atau insinyur. Agar tercapai tujuannya, Raden Entik Ahmad menyekolahkan anaknya ke berbagai jenjang pendidikan, mulai dari HIS Pasundan, HIS Tirtayasa, Sjugakko, hingga STM Pertambangan. Sekolah hingga jenjang-jenjang tersebut pada masa itu tidak bisa dilakukan oleh keluarga yang biasa-biasa saja, hanya keluarga yang mampu dan punya tekad membekali anaknya dengan pendidikan.

Tapi, di sela-sela kesibukannya menimba ilmu, Ahmad ternyata mempunyai bakat yang terpendam dalam dunia seni. Di usia 12 tahun, dia ikut grup musik (orkes) yang bernama *Terang Bulan*. Grup musik ini dipimpin oleh Husin Kasimun. Dari sinilah Ahmad belajar dunia seni hingga akhirnya

lihai bermain musik dan menyanyi.

Di tahun 1944, saat berusia 17 tahun, ia tertarik dalam dunia akting hingga akhirnya bergabung dengan kelompok sandiwara atau yang sekarang dikenal teatre yang bernama *Pantja Warna*. Bersama dengan kelompok sandiwara itu bakat terpendamnya dalam dunia akting semakin terasah, bahkan kehadirannya menambah warna di kelompok sandiwara itu, buktinya Ahmad kerap pentas keliling kota.

Pada saat *Pantja Warna* pentas di Semarang, tahun 1944, dunia sedang dilanda Perang II Dunia. Indonesia pun pada masa itu sedang diduduki Jepang. Imbas perang yang terjadi juga berdampak pada para seniman *Pantja Warna*. Sedang asyik-asyiknya pentas, mereka ditahan oleh tentara Jepang yang bermakas di Semarang.

Tak alasan yang jelas kenapa mereka ditahan.

Pada masa-masa itu, para pemuda terpanggil ibu pertiwi untuk ikut membela bangsa dan negara, termasuk si Ahmad. Ia bersama dengan para pemuda lainnya bergabung dalam BKR Divisi I Brawidjaja. Sesuai dengan bakatnya, di cikal bakal TNI itu Ahmad masuk ke dalam Barisan Penghibur. Di kesatuan itu Ahmad bersama prajurit yang lain memiliki tugas untuk menyanyikan lagu-lagu yang menggugah semangat juang. Dari stasiun radio yang ada, Ahmad menyemangati para pejuang yang tengah bertempur di medan perang.

Sebagai tentara, Ahmad kerap berpindah-

dunia tarik suara, penyanyi Sam Saimun banyak memengaruhi dirinya. Ahmad sendiri mengakui bahwa Saimun merupakan penyanyi panutan. Tak sedikit yang menyebut *timbre* vokal Ahmad sangat mirip dengan Sam Saimun.

Dari RRI inilah yang menjadi batu loncatan bagi Ahmad untuk masuk dalam dunia seni dan hiburan di tanah air. Pada tahun 1949 disebutkan untuk kali pertama dia mengisi *soundtrack* film *Menanti Kasih* yang disutradarai Mohammad Said, dengan bintang filmnya A. Hamid dan Nila Djuwita. Saat mengisi *soundtrack*, suara *baritone* Ahmad terdengar.

Dari sinilah selanjutnya ia masuk menjadi

mulai dirilis pada label *Gembira Record* dan *Irama Record*. Ia terampil menyanyikan langgam keroncong hingga pop dan jazz. Selain menyanyi, Ahmad juga memainkan gitar sekaligus menulis lagu. Tembang pertama yang ditulisnya bersama gitaris jazz, Dick Abell, adalah 'Cemas'.

Lalu, bermunculanlah lagu-lagu karyanya lainnya, yaitu: 'Hanya Semalam', 'Risau', 'Padamu', 'Murai Kasih', hingga 'Belaian Sayang'. Lagu yang disebut terakhir dianggap sukses di mata khalayak. Ahmad bisa menyanyikan dengan fasih lagu berbahasa Minang 'Sansaro', dengan luwes Bing menyanyikan lagu 'Selayang Pandang' dari ranah Melayu. Dirinya merupakan penyanyi serba bisa yang memiliki fleksibilitas tak tertandingi.

Rekaman *single* Ahmad pada era 1950-an diiringi oleh Orkes Keroncong M. Sagi dan Irama Quartet yang didukung Nick Mamahit (piano), Dick Abell (gitar), Max Van Dalm (drum), dan Van Der Capellen (bas). Ahmad juga mendirikan kelompok musik yang diberi nama *Mambetarumpajo*, merupakan akronim dari Mambo, Beguine, Tango, Rhumba, Passo Double, dan Joged, yang saat itu adalah jenis musik untuk mengiringi dansa.

Populer dalam dunia musik inilah yang membuat Ahmad menjadi menarik bagi Presiden Sukarno. Untuk itu, dalam setiap lawatan ke luar negeri, Sukarno sering mengajak seniman Indonesia yang di dalamnya ada Ahmad untuk memperkenalkan seni khas Indonesia ([esi.kemdikbud.go.id/wiki/Bing\\_Slamet](http://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Bing_Slamet)).

Terkenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu membuat banyak sutradara dan produser film tertarik pada Ahmad untuk bermain film. Pada tahun 1957, untuk kali pertama dia main film dengan judul: *Tiga Buronan*. Ia berperan sebagai sosok antagonis. Karena dinilai sukses main film dan berakting membuat dirinya semakin banyak menarik perhatian insan film dan masyarakat. *Tiga Buronan* pun dibuat sekuel.

Selanjutnya, berbagai film dibintanginya, yakni: *Bing Slamet Tukang Betjak*, *Amor dan Humor*, *Kisah Pelawak*, *Bing Slamet*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pindah tugas. Dia pernah bemarkas di Mojoagung dan Malang. Di masa aktif di BKR, dirinya ditugaskan di RRI Yogyakarta. Saat menjadi penyiar di stasiun radio milik pemerintah Indonesia itu, Agresi II Militer Belanda pecah. Dirinya pun ditangkap oleh tentara Belanda, namun akhirnya dilepas setelah diketahui sebagai Barisan Penghibur.

Di *Wikipedia* diungkap, karier Ahmad di bidang tarik suara terlecut ketika bekerja di RRI. Di stasiun radio yang saat ini masih eksis itu, Ahmad menyerap ilmu dan pengalaman dari pemusik Iskandar dan pemusik keroncong tenar, seperti M. Sagi, Sjaifoel Bachrie, Soetedjo, dan Ismail Marzuki. Dalam

aktor dan bermain dalam beberapa film. Di tengah awal merintis karier dalam dunia musik dan hiburan, Ahmad tercatat menjadi tentara di Angkatan Laut. Selama satu tahun menjadi tentara, 1951-1952, ia ditugaskan di Surabaya dan Jakarta. Selama satu tahun ini pula, kariernya dalam dunia musik dan hiburan terhenti.

Saat kembali ke Jakarta, lagi-lagi Ahmad bergabung dengan RRI. Di stasiun radio itu bersama Adi Karso mengisi suatu acara.

Dari catatan *Wikipedia* diuraikan, di tahun 1955, Ahmad mulai menoreh prestasi dengan menjadi juara bintang radio untuk jenis hiburan. Piringan hitam suara dirinya pun



*Merantau, Bunga Putih, Hantjurnya Petualang Pejabat, 2 x 24 Djam, Juda Saba Desa, Bing Slamet Setan Djalanan, Ambisi, Bing Slamet Dukun Palsu, Bing Slamet Sibuk, dan Bing Slamet Koboï Cengeng.*

Dunia seni dan hiburan yang digeluti Ahmad bertambah saat dirinya mendirikan grup lawak. Grup lawak yang pernah ia bentuk adalah *Trio Los Gilos, Trio SAE, EBI,*

dan *Kwartet Jaya*. Di antara grup lawak itu yang paling sukses adalah Kwartet Jaya. Di grup ini personilnya adalah Iskak, Eddy Sud, dan Ateng.

Sebagai seniman yang serba bisa, pria yang selanjutnya mempunyai nama panggung Bing Slamet itu juga suka membagi ilmu yang dimilikinya. Dalam *esi.kemdikbud.go.id/wiki/Bing\_Slamet*, disebutkan,

dia menjadi mentor bagi Titiek Puspa dan Benyamin Sueb. Kedua sosok itu juga merupakan legenda musik dan dunia seni hiburan di tanah air. Begitu dekatnya mereka berdua, sampai Benyamin Sueb berwasiat agar dia dimakamkan di sebelah makam Bing Slamet (*Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019*). □

AWG/dari berbagai sumber

## MPR Ajak Komedian Sosialisasikan Empat Pilar

Agar Sosialisasi Empat Pilar MPR tidak membosankan maka MPR mengajak para komedian ikut menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka diwadahi secara bebas dan kreatif untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang ada. Ini adalah bukti bahwa MPR memerhatikan kiprah dan kesejahteraan mereka.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**H**ADIRNYA para komedian di tengah masyarakat bagi MPR merupakan suatu hal yang bisa didayagunakan untuk kepentingan tugas-tugas MPR. Sebagai lembaga negara yang diberi amanah untuk menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih populer disebut Empat Pilar MPR kerap melibatkan para komedian.

Pada masa MPR Periode 2009-2014, lewat program Sosialisasi Empat Pilar MPR yang

rutin ditayangkan di TVRI maupun sosialisasi di berbagai kampus, MPR melibatkan komedian seperti Jarwo Kwat (sekarang Ketua PASKI), Temon, Dibyo, Jaim, serta komedian lainnya. Kehadiran mereka dalam acara tersebut membuat sosialisasi menjadi cair dan tidak indoktriner. Peserta sosialisasi dan penonton pun dibuat betah mengikuti acara itu.

Di masa MPR Periode 2019-2024, melibatkan para komedian untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan

Sosialisasi Empat Pilar masih dilakukan. Kali ini MPR tidak tanggung-tanggung menggelar *Stand Up Comedy, MPR Rumah Kebangsaan*.

Acara yang berlangsung pada Maret 2022 di Loby Nusantara II, Komplek MPR/DPR/DPD., Senayan, Jakarta, diikuti oleh sebanyak 150 komika (komedian tunggal). Plt. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR (saat itu), Siti Fauziah, SE., MM.; mengatakan, sebagai rumah kebangsaan, MPR memerlukan saran, kritik, dan masukan dalam melaksanakan kinerjanya. *Stand up comedy* merupakan salah satu metode yang paling strategis dalam memberikan saran, kritik, dan masukan karena penyampaiannya dilakukan melalui komedi yang dikemas secara ringan, tetapi penuh dengan nilai-nilai moral.

“Semoga acara ini bisa memberi hiburan kepada kita, namun tetap dalam kerangka agar MPR sebagai sebuah lembaga negara terus melakukan perbaikan dan kinerjanya sesuai dengan tugas dan mandat konstitusionalnya”, tuturnya.

Kegiatan yang terjadi pada tahun 2022 itu bukan yang pertama dan terakhir bagi MPR untuk para komika. Di Agustus Tahun 2023, MPR juga menggelar acara yang sama. Dalam rilis yang beredar, pimpinan Badan Sosialisasi MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari, SH., S.Hum.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

LL.M., menyambut baik pelaksanaan lomba *stand up comedy* dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR. “Sudah saatnya sosialisasi tidak melulu dilakukan secara kaku, dengan cara pidato, sarasehan hingga seminar seperti yang dilakukan selama ini,” tuturnya seperti yang ada dalam *mpr.go.id*.

Lebih lanjut dikatakan, cara-cara lain yang lebih santai dan disukai anak muda patut diterapkan. Salah satunya menggunakan metode *stand up comedy*, karena dalam perjalanannya, MPR juga menemukan fakta, penyampaian sosialisasi dengan ceramah serta pidato kerap membuat peserta bosan sehingga mengantuk.

“Baik juga membahas masalah politik hingga tatanegara dengan cara yang lebih

santai, menyenangkan bahkan canda tawa. Bukan tidak mungkin hasilnya akan lebih baik. Pesan yang hendak disampaikan bisa diterima lebih gampang,” ujarnya.

Menjadi komika, menurut Taufik Basari, merupakan orang-orang yang memiliki kecerdasan tersendiri karena dalam waktu yang singkat mereka dituntut menangkap fakta-fakta dan meramunya dengan kata-kata lalu menyampaikannya dengan jenaka. Kalau tidak cerdas mana mungkin mereka bisa menghadirkan kejenakaan itu. “Itu tidak mudah, bahkan para politisi yang sering berpidato pun belum tentu bisa menyampaikan pesan yang membuat orang lain tersenyum. Mudah-mudahan, lomba ini bisa menjadi terobosan, sehingga ke depan

sosialisasi MPR akan lebih berhasil,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam acara itu menuturkan, lomba *stand up comedy* MPR merupakan cara kreatif MPR menyerap aspirasi guna menangkap, mencerna, mengelola, dan merespon berbagai realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dalam melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR tidak hanya mengandalkan cara konvensional, seperti ceramah, forum diskusi, seminar dan lain-lain, yang kadangkala terkesan kaku,” ujarnya seperti termuat dalam *mpr.go.id*.

Lebih lanjut disampaikan, lomba *stand up comedy* MPR 2023 merupakan tahun kedua. Di tahun pertama penyelenggaraan lomba *stand up comedy* kritik MPR dilaksanakan pada Maret 2022.

Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui lomba *stand up comedy* dibuat dengan harapan agar MPR semakin dapat membangun kepercayaan dan informasi dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat semakin mendukung kerja-kerja MPR. Lomba *stand up comedy* MPR ini sekaligus menjadi menjadi ruang bagi public, terutama generasi muda, untuk bisa saling mengedukasi dalam konteks pemahaman terkait Empat Pilar MPR dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang kreatif dan mengena di masyarakat”, tuturnya. □

AWGI dari berbagai sumber



## FGD Unpad Jatinangor

### Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

**W**AKIL Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengatakan, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. Melalui fungsi pengawasan DPD tersebut, DPD menginginkan adanya penguatan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Pengawasan DPD hanya konsentrasi pada masalah-masalah di daerah.

“Fokus pengawasan DPD adalah kita ingin DPD mempunyai keterlibatan dengan pemerintah daerah. Karena itu, dengan fungsi pengawasan DPD, kita ingin penguatan pemerintah daerah. Kita ingin keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional,” kata Fadel Muhammad usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pendalaman Materi dalam Rangka Penyusunan Revisi Peraturan DPD Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI” di Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (28/3/2024).

Pelaksanaan FGD ini merupakan kerjasama antara Panitia Musyawarah DPD dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad). Hadir dalam FGD ini Wakil Ketua III DPD Sultan B. Najamudin yang juga Pengarah Panmus, Dekan Fakultas Hukum Unpad Dr. Sigit Suseno, SH., M.Hum., Koordinator Tim Program dan Mekanisme Kerja DPD RI Ir. H. Darmansyah Husein, dan para anggota Panmus di antaranya KH. Amang Syafrudin, Dr. H. Misharti, H.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sukriyanto, H. Dharma Setiawan. Narasumber FGD ini adalah Prof. Dr. Susi Harijanti, SH (Dosen FH Unpad).

Fadel Muhammad yang juga anggota Panmus DPD RI ini mengatakan, FGD ini membicarakan beragam hal terkait dengan bagaimana penguatan DPD dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. Pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para akademisi dari Universitas Padjadjaran untuk revisi Peraturan DPD No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI.

“Dari FGD ini, para akademisi Unpad memberikan masukan, yaitu pengawasan DPD RI itu harus diatur agar ruang lingkup pengawasan yang dilakukan DPD tidak terlalu luas. Ruang lingkup pengawasan itu perlu disesuaikan dengan kemampuan DPD itu sendiri karena keterbatasan jumlah anggota DPD,” ujar Fadel Muhammad yang juga senator dari Provinsi Gorontalo ini.

Karena itu, lanjut Fadel Muhammad, fokus pengawasan DPD ini adalah agar DPD

mempunyai keterlibatan dengan pemerintah daerah. Sebab, keberadaan DPD adalah untuk memperkuat pemerintah daerah. “Kita ingin keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Fadel Muhammad menambahkan, cakupan pengawasan yang dilakukan DPD berbeda dengan DPR RI. “Berbeda jauh. Pengawasan yang dilakukan DPR RI itu mencakup secara keseluruhan, sedangkan pengawasan yang dilakukan DPD fokus pada pemerintah daerah. Karena itu, memang dibutuhkan adanya pemikiran untuk memperkuat pengawasan ke daerah. DPD hanya konsentrasi pada pengawasan masalah-masalah di daerah saja,” jelasnya.

Berdasarkan Pasal 248 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MRP, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), salah satu fungsi DPD adalah pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan DPD, melalui Tim Program dan Mekanisme Kerja DPD RI akan dirumuskan tata cara pengawasan yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Pengawasan yang dilakukan DPD merupakan pelaksanaan dari UU (UU No. 17 Tahun 2014). Selain untuk memperkuat daerah, pengawasan yang dilakukan DPD juga untuk memperkuat kelembagaan DPD.

Sementara itu, dalam pengantarnya, Koordinator Tim Program dan Mekanisme Kerja DPD, Darmansyah Husein, mengatakan, DPD memiliki fungsi legislasi, budgeting (anggaran), dan pengawasan. Dari ketiga fungsi DPD itu, fungsi pengawasan merupakan yang paling kuat. Sebab, dalam pengawasan dilakukan anggota DPD yang merupakan tokoh-tokoh di daerah.

“Dalam pengawasan yang dilakukan DPD terhadap kinerja pemerintah, kita mewakili kepentingan daerah bukan kepentingan partai politik. Karena anggota DPD terdiri dari tokoh-tokoh di daerah, maka seringkali pengawasan yang dilakukan DPD lebih tajam dan membumi,” ujarnya. □



Asep Fahrurodin

# Mengentaskan Anak-anak Berkebutuhan Khusus



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**B**AGI sebagian orang, anak-anak berkebutuhan khusus sering dianggap sebagai masalah. Tidak ada guna dan menjadi beban tersendiri. Bahkan, ada sebagian kalangan menyebut, kehadiran anak berkebutuhan khusus merupakan aib bagi keluarga. Karena itu, tak jarang kita mendengar kisah tragis yang menimpa anak-anak. Keberadaan mereka terpinggirkan atau malah dikucilkan dari kehidupan sosial, dan menyendiri dalam keterasingan.

Padahal, layaknya mereka yang normal, anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki potensi dan kemampuan sendiri. Tinggal bagaimana keluarga serta lingkungan terdekatnya memberlakukan mereka. Ibarat pencil, semakin sering diraut akan runcing juga, begitu juga anak-anak berkebutuhan khusus ini. Apakah kemampuannya itu ditumbuhkembangkan atau tidak. Apakah kebiasaannya itu diasah atau tidak.

Terbukti, tak sedikit anak-anak berkebutuhan khusus yang sanggup mendayung di tengah samudera kehidupannya dengan baik. Mereka bisa bekerja dan berpenghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kenyataan tersebut salah satunya bisa ditemukan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa barat.

Anak-anak berkebutuhan khusus, utamanya penyandang Tuna Grahita dan Tuna Rungu, di Cianjur bisa berkembang dengan baik, karena mendapat asah, asih, dan asuhan yang baik.. Mereka mampu menjadi pengrajin berbagai aneka kerajinan tangan. Sebagian di antara mereka menjadi karyawan, sebagian lainnya mandiri dengan buah tangan kerajinan mereka sendiri.

Adalah Asep Fahrurodin, seorang seniman kriya yang dengan penuh sabar

dan ikhlas membimbing anak-anak penyandang Tuna Grahita dan Tuna Rungu di SLB Bina Bangsa dan SLB Bina Anak. Dengan tekun, ia mendampingi dan mengajari anak didiknya, dengan berbagai keterampilan agar menjadi manusia yang lebih mandiri.

“Perlu kesabaran ekstra untuk mendidik mereka agar menguasai keterampilan. Apalagi, saya tidak menguasai bahasa isyarat yang mereka gunakan. Tetapi, karena ketidaktahuan saya itu semua malah menjadi menarik dan menyenangkan,” ungkap Asep Fahrurodin kepada majalah *Majelis MPR RI* beberapa waktu lalu.

Berurusan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, menurut Asep, memiliki banyak suka duka. Satu hari misalnya, karena tidak paham dengan bahasa yang mereka gunakan, Asep merasa lucu dengan komunikasi di antara mereka, sampai-sampai ia tertawa. Pasalnya, apa yang diinginkan olehnya diterjemahkan lain oleh murid-muridnya.

Namun, ia sudah diwanti-wanti oleh temannya sesama guru, dan mengingatkan bahwa satu hari anak-anak berkebutuhan khusus itu gantian akan membalas menertawakannya.

“Benar, di lain waktu mereka menertawakan saya. Saat itu mereka bilang





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sesuatu yang tidak saya pahami dengan baik. Apa yang dikatakan, saya terjemahkan dengan keliru, dan mereka pun menertawakan saya,” kata pria kelahiran Cianjur, 09 September 1965.

Sejak berkiprah mengajarkan keterampilan kepada anak-anak penyandang Tuna Grahita dan Tuna Rungu pada 2016, banyak anak didiknya yang sudah bisa mandiri. Tetapi, Asep berharap, ada uluran tangan dari pemerintah, karena sebagian besar anak didiknya berasal dari keluarga tak mampu. Mereka tidak mampu membeli peralatan kerja yang dibutuhkan. Padahal, untuk bisa mandiri dengan ilmu yang dimiliki dan peralatan kerja mutlak harus dimiliki.

“Semoga keluhan ini didengar pemerintah. Saya berharap, mereka mendapat bantuan peralatan kerja yang sangat dibutuhkan. Mereka akan bisa mandiri, tidak lagi menjadi buruh, jika mereka mempunyai peralatan sendiri,” kata Asep lagi.

### Miniatur Drum

Sebagai Seniman Kriya yang memulai usahanya di Yogyakarta, Asep sudah

berpetualang menggeluti profesinya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Berbagai produk dia bikin, dengan bantuan sang istri yang selalu setia menemani. Setelah melalui seleksi alam dan waktu, produk kerajinan Asep berupa miniatur alat musik drum ternyata mendapat apresiasi lebih besar dibanding produk yang lain.

Setelah delapan tahun berkarier sebagai seniman Kriya, Pria yang hanya lulus bangku SLTP, itu mampu menembus pasar lokal dan internasional melalui miniatur drum yang dibuat. Kemudian, pada 2008, Asep merasa pasar produknya perlu dikembangkan, dan tempat yang menjadi destinasi berikutnya adalah Provinsi Bali. Karena itu, Asep pun pindah ke Pulau Dewata.

Seperti yang sudah diduga, di Bali permintaan terhadap barang-barang produksi yang dibuatnya meningkat tajam. Miniatur drum yang dibuatnya sanggup menembus pasar Eropa hingga Amerika. Bahkan, beberapa grup band dunia memesan replika drum mereka. Sejak itu, produksi kerajinan tangan Asep seperti tak terkendali. Padahal saat itu, Asep hanya

mempekerjakan anak dan istrinya untuk membantu proses produksi.

“Saya sampai pada titik tak sanggup memenuhi pesanan. Sehingga muncul ide untuk kembali ke Cianjur, membuka lapangan pekerjaan bagi saudara, kerabat hingga tetangga. Dan, kebetulan di Cianjur saya juga punya kerabat yang butuh pekerjaan,” ungkap Asep.

Sejak itu, Asep pun memindahkan lokasi produksinya ke Ciajur. Ia merekrut banyak tenaga kerja berasal dari saudara dan juga tetangga. Alhasil, pundi-pundi pemasukannya terus meningkat. Sebagai bukti ia bisa membeli rumah dan kendaraan dari hasil pekerjaannya.

Pada 2016, perjalanan spiritualnya merasa ada yang hampa. Dalam hati ia bertanya, sampai kapan akan terus mencari uang. Nyatanya, semakin keras usaha dilakukan untuk mendapatkan uang, semakin banyak uang yang dibutuhkan. Padahal, hari-harinya menuju tua, terus melaju. Pada saatnya, ia juga akan mati untuk memenuhi panggilan Rob-nya.

“Akhirnya saya putuskan untuk mengajari anak-anak, ini sesuai keahlian yang saya miliki, dan bukan untuk mencari uang. Di luar dugaan sambutan para guru sangat antusias. Sudah lama mereka mencari orang yang mau dan bisa memberi bekal ketrampilan, tapi tidak tahu siapa orangnya. Karena itu, mereka sangat menghargai tawaran saya, dan saya pun merasa dihargai,” pungkasnya.

Sejak itu, Asep terus berbagi ilmunya dengan anak-anak Tuna Grahita dan Tuna Rungu. Bahkan bukan hanya berbagi ilmu, tetapi juga membantu memasarkan, jika ada yang kesulitan menjual produknya. Semua itu dia lakukan, salah satunya adalah untuk mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Yang Maha Kekal, bila nanti saatnya tiba. □

MBO

## Memilih Menjadi Oposisi atau Mendukung Kekuasaan?

Pemilu tahun ini penuh dengan dinamika. Ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2024. Setelah ada pemenang, koalisi partai pendukung kekuasaan dan di luar kekuasaan akan muncul. Lalu atas dasar apa partai ikut mendukung kekuasaan dan ada yang memilih menjadi oposisi? Berikut pendapat para politisi Senayan.

**Herman Khaeron** Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat

### Di Luar dan di Dalam Kekuasaan Sama Saja

**D**ALAM pemilu selalu ada dinamika, perbedaan pandangan bahkan pertentangan, hal ini biasa dikatakan oleh politisi, mereka yang kurang puas terhadap hasil pemilu. Kekecewaan biasa ditujukan kepada penyelenggara pemilu atau pihak yang lain. Bangsa ini sudah berpengalaman dalam pemilu, sejak tahun 1955 hingga pemilu tahun 2024, sehingga dari sini semestinya sudah tidak ada lagi friksi yang dibangun atau dikembangkan. Paling penting adalah menatap ke depan agar lebih baik.

Meski demikian perlu ada koreksi terhadap perjalanan pelaksanaan pemilu, sebab tidak ada sistem yang sempurna di dunia sehingga perlu ada perbaikan. Dalam pemilu ada sistem (saluran) yang memungkinkan bagi yang tidak puas menggunakan saluran yang ada. Bila dalam tahapan pemilu ada indikasi kecurangan, penggelembungan suara, pemanfaatan instansi pemerintah ataupun dan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang pemilu ataupun bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur di dalam undang-undang tersebut tentu ada saluran yang telah disediakan.

Kalau ada sengketa, sengketa dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab ada yang mengatakan bahwa pemilu tahun ini brutal. Ada pula yang menyebut pemilu kali ini sangat pragmatis. Terkait hal ini DPR bisa mengubah atau merevisi bila



Herman Khaeron

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

banyak sekali kelemahan di dalam undang-undangnya, sehingga bila dikatakan pemilu dianggap ada masalah ya kita selesaikan dalam media-media yang sudah ditetapkan tadi, dan bahkan kalau kemudian ada persoalan dalam penyelenggaraan pemilu oleh pihak penyelenggara ya nanti kita ubah, dan seperti apa perubahannya ada di dalam revisi undang-undang kepilwaan.

Artinya, banyak persoalan yang semestinya tidak diangkat menjadi sebuah isu politik, apalagi kemudian masalah ini membuat sebuah opini publik, wacana yang sesungguhnya, mendegradasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

Bila ada yang menyebut banyak kecurangan dan menabrak undang-undang

pemilu, sampai saat ini pun belum pernah disampaikan, bahkan salah satu lembaga (KawalPemilu) menyebut tidak ada kecurangan di dalam pelaksanaan pilpres. Merujuk kepada hal tersebut, semestinya tidak ada lagi tema-tema yang kontradiktif, tema-tema yang kemudian membangun friksi. Saat ini adalah temanya bagaimana kita membangun bangsa dan negara ke depan agar lebih baik lagi, bagaimana membangun bangsa Indonesia melanjutkan terhadap hasil-hasil pembangunan sebelumnya dan kemudian mengakselerasi terhadap pembangunan yang baru, dalam rangka menuju Indonesia yang lebih makmur, masyarakat yang lebih adil dan sentosa.

Kita pernah mengalami titik nadir,

pertentangan dan perpecahan bangsa. Masih teringat masa lalu pertarungan antara cebong dan kampret misalnya, itu membekas di hampir seluruh lapisan masyarakat. Hampir 5 tahun kita terbelah apalagi di media sosial, terbelah pertentangan terkait dengan perbedaan cara pandang dan pemahaman, yang semestinya di dalam konsepsi perbedaan cara pandang dan pemahaman, ini menjadi keberkahan karena konsepsinya akan lebih kaya, akan lebih banyak ide dan gagasan akibat perbedaan.

Tetapi kan ini lebih kepada perpecahan, saling mengejek antaranak bangsa, saling menjatuhkan antaranak bangsa. Padahal sesungguhnya kita punya kewajiban yang sama, bagaimana seluruh anak bangsa membangun bangsanya, meningkatkan

martabat bangsa, dan tentu kita ingin sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya.

Atas dasar itulah, menurut saya, semestinya pengalaman ini dijadikan sebuah catatan sejarah bagi siapapun. Politikus, mungkin seperti saya, yang terpilih kembali senang, happy, tapi bagi yang tidak terpilih gundah gulana, bahkan mungkin punya dendam.

Kalau hari ini tidak menang ya masih ada 5 tahun ke depan, insya Allah panjang umur, masih diberi rezeki dan kesehatan sehingga bisa bertanding kembali. Seperti halnya kompetisi di dalam olahraga, liga sepakbola Indonesia, pemenangnya pasti bergilir, pasti berpindah-pindah, karena tidak pernah ada yang menang terus atau kalah terus.

Di dalam atau di luar pemerintahan

merupakan konsekuensi dan realitas. Di luar dan di dalam sama saja. Waktu partai kami di dalam, ya bekerja sungguh-sungguh menyukseskan program pemerintah agar betul-betul berkontribusi positif terhadap peningkatan kemakmuran kesejahteraan rakyat, peningkatan kemajuan bangsa.

Saat di luar, kami juga menjadi kritikus, menjadi pengkritik yang proporsional, mengkritik jika bertentangan dengan harapan rakyat. Bila sejalan dengan harapan dan keinginan rakyat kami berikan apresiasi. Artinya bahwa di luar pemerintahan kami juga mengawal agar pemerintahan yang sedang berkuasa juga bisa menjalankan roda pemerintahannya dan menghasilkan yang terbaik bagi rakyat. □

AWG

**Dr. H. Sukamta** Anggota MPR Fraksi PKS

## Bila Oposisi Lemah, Etika dan Hukum Harus Jadi Panglima



Sukamta

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**P**OLITIK itu tidak mudah diterka. Ada oposisi atau tidak itu juga waktu yang akan menjawabnya. Jika ada oposisi pun kita tidak bisa menerka apakah oposisi akan kuat atau lemah. Yang jelas, pemegang kekuasaan memiliki *power* dan kewenangan yang kuat.

Setelah Pemilu 2014, awalnya kekuatan koalisi dan oposisi relatif berimbang (Koalisi Merah Putih (KMP) vs Koalisi Indonesia Hebat (KIH)), tetapi seiring waktu berjalan,

dengan kekuasaan yang dimiliki koalisi mampu semakin memperkuat dirinya sekaligus melemahkan oposisi. Satu per satu, perlahan tapi pasti, partai politik oposisi bergabung ke dalam koalisi pemerintahan dengan mendapat jabatan-jabatan tertentu. Hingga jelang Pemilu 2019, oposisi tinggal PKS, Gerindra, dan Demokrat yang tersisa.

Pasca Pemilu 2019, sebagian oposisi, yaitu Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Praktis, hanya PKS dan

Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Hingga Pemilu 2024, Demokrat pun mendukung koalisi yang *status quo* terhadap pemerintahan saat ini. Hanya PKS yang sejak 2014 dulu hingga kini setia sebagai oposisi, kekuatan penyeimbang pemerintah, memerankan fungsi penting *checks & balances*. Fungsi ini harus terus ada untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jangan menjadikan argumen oposisi tidak dikenal dalam sistem demokrasi kita sebagai dalih untuk mengerdilkan pentingnya oposisi.

Jadi, pasca Pemilu 2024, kita belum bisa mengatakan apakah akan ada oposisi yang kuat. Jika berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019, dinamika apapun bisa terjadi. Jalan oposisi itu pilihan yang berat, mahal. Logis jika partai politik itu tidak semuanya ingin dan tahan beroposisi. Kekuasaan tentu lebih menarik bagi partai politik.

Lantas, bagaimana jika oposisi lemah? Hanya 1 kuncinya, kembali kepada hukum. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Jadikan etika dan hukum sebagai panglima dalam berdemokrasi. Hanya dengan inilah demokrasi akan sehat. □

AWG

Silaturahmi dengan Imam Palestina

# Bamsoet Tegaskan Bangsa Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kami bangsa Indonesia tidak akan menutup mata, telinga, dan hati kami. Kami akan membantu Palestina, apa yang kami bisa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan, sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan Palestina oleh Israel tetap sama sejak tahun 1962. Presiden Pertama RI Soekarno pada tahun 1962 menegaskan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina maka sepanjang itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel.

"Itulah sikap kami dahulu dan akan tetap menjadi sikap kami sekarang, dan di masa mendatang. Kami akan senantiasa tegak lurus pada amanat UUD NRI Tahun 1945 bahwa penjajahan di atas dunia, apa pun bentuk dan manifestasinya, harus dihapuskan dari muka bumi. Karena melukai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan universal," tegas Bamsoet saat menerima kunjungan para Imam Palestina di Gedung Parlemen, Senin (1/4/24).

Hadir, antara lain para Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Sjarifuddin Hasan, Jazilul Fawaid, Fadel Muhammad, Lestari Moerdijat dan Amir Uskara. Juga hadir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasum

TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Mokhammad Mahdum.

Imam Palestina yang hadir, antara lain Belal N. S. Abujazar, Ibrahim Mahmoud Mustafa Abu Mahmoud, Ahmad Bilal Hashem Abuzaid, Ahmad Hassan Mohammad Husain, Hamza Khaled Mahmoud Abdallah, Ahmad Mohamd Said Moklalaty, Moustasem Nawaf Harafsheh, Fayez S. A. Eslayeh, Sadeq Y L Alqlaae, dan Samih K. A. Hajjaj.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina pun disuarakan MPR RI saat menyelenggarakan Konferensi Internasional Forum MPR/Majelis Syuro/Lembaga Sejenis Lainnya, pada bulan Oktober 2022 di Bandung. Salah satu butir "Deklarasi Bandung" menyatakan bahwa masalah Palestina tetap menjadi isu sentral Forum dan Umat Islam, hingga tercapainya kemerdekaan dan hak penentuan nasib





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sendiri untuk rakyat Palestina, serta berdirinya Negara Palestina merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, sesuai kerangka hukum internasional.

“Apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Sebagaimana ungkapan ‘tidak perlu menjadi muslim untuk menyelamatkan Palestina. Tetapi cukup menjadi manusia’. Tidak ada argumentasi apapun yang dapat membenarkan aksi kekerasan brutal terhadap warga sipil. Bahkan serangan terhadap rumah sakit di mana para tenaga medis menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan

kemanusiaan,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, saat ini rakyat Palestina ditindas dan tanah Palestina luluh lantak digempur zionis Israel. Sayangnya, dentuman suara rudal belum mampu membangunkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari tidur pulasnya. Ribuan mayat para syuhada yang bergelimpangan di sepanjang jalur Gaza belum mampu menyadarkan Dewan Keamanan PBB dari kewajiban moralnya untuk menjaga

perdamaian dunia. Bahkan, ketika pada akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata, Israel tetap bergeming, dan Dewan Keamanan PBB nampak tidak berdaya.

“Karena itu, sekali lagi kami tegaskan, bahwa kami bangsa Indonesia tidak akan menutup mata, telinga dan hati kami. Kami akan membantu Palestina, apa yang kami bisa. Kami menyambut dengan tangan terbuka, kehadiran para Imam Palestina di Indonesia, yang telah melaksanakan safari Ramadan di berbagai wilayah di Indonesia,” pungkas Bamsoet. □



Silaturahmi dengan Imam Palestina

# HNW: Konsitusi Indonesia Menegaskan Tetap Bersama Perjuangan Bangsa Palestina

MPR akan terus memastikan bahwa konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, tetap menegaskan bahwa Indonesia bersama perjuangan bangsa Palestina dan Indonesia aktif menghadirkan perdamaian dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Imam Palestina, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Jakarta, pada Senin, 1 April 2024. Dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa itu Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid, MA., menegaskan bahwa MPR sebagai rumah rakyat dan rumah konstitusi memastikan bahwa konstitusi Indonesia tetap bersama perjuangan bangsa Palestina dan menghadirkan perdamaian dunia.

"Kami di MPR akan terus memastikan bahwa konstitusi kita tetap menegaskan bahwa Indonesia bersama perjuangan bangsa Palestina dan Indonesia aktif menghadirkan perdamaian dunia," kata Hidayat Nur Wahid dalam konferensi pers di sela-sela Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama MPR, MUI, dan Baznas dengan Imam Palestina. Dalam konferensi pers itu, Hidayat Nur Wahid mendampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Menteri Luar Negeri

Retno Marsudi.

Silaturahmi dan Buka Puasa MPR, MUI, Baznas dengan Imam Palestina ini selain dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, juga tampak hadir para Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Sjarifuddin Hasan, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad. Juga dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Ketua MUI Buya Anwar Abbas, dan Wakil Ketua Baznas Mochammad Madhum.

Imam Palestina yang hadir, antara lain Belal N.S. Abujazar, Ibrahim Mahmoud Mustafa Abu Mahmoud, Ahmad Bilal Hashem Abuzaid, Ahmad Hassan Mohammad Husain, Hamza Khaled Mahmoud Abdallah, Ahmad Mohamd Said Mokalalaty, Moustasem Nawaf Harafsheh, Fayez S.A Eslayeh, Sadeq Y.L Alqlaae dan Samih K.A. Hajjaj.

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, mengakui bahwa prakarsa untuk silaturahmi dan buka puasa bersama Imam Palestina ini datang dari MUI dan Baznas. HNW mengungkapkan dirinya dihubungi Ketua MUI

Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prof Sudharnoto yang menawarkan untuk menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dalam penutupan program kegiatan Safari Ramadhan "Membasuh Luka Palestina" yang mendatangkan 11 Imam Palestina.

Tawaran itu pun dikomunikasikan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua MPR mendukung untuk menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama Imam Palestina ini. "Karena itu saya menyambut baik prakarsa dari MU, dari Baznas, untuk silaturahmi dan buka puasa bersama Imam Palestina ini karena MPR adalah rumah rakyat dan rumah konstitusi," tuturnya.

Dalam konferensi pers itu, HNW juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah melaksanakan tugas kenegaraan dan tugas konstitusional membela bangsa Palestina. "Terimakasih Ibu Menteri yang telah melaksanakan tugas kenegaraan, tugas konstitusional, dengan terus menjaga agar konstitusi kita tetap hidup, yaitu membela bangsa Palestina karena dijajah oleh Israel," katanya.

HNW menyebutkan, perjuangan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di PBB dan ditempat-tempat yang lain akhirnya telah berhasil menghadirkan resolusi gencatan senjata PBB. HNW berharap, resolusi gencatan senjata ini agar betul-betul bisa diimplementasikan di wilayah Gaza, Palestina. "Dengan demikian maka masyarakat dunia masih percaya ada tata dunia yang kita jaga dan kita percayain," katanya.

MPR, lanjut HNW, akan terus memastikan bahwa konstitusi UUD NRI Tahun 1945 tetap menegaskan bahwa Indonesia bersama perjuangan bangsa Palestina dan Indonesia aktif menghadirkan perdamaian dunia.

MUI bekerjasama dengan Baznas RI menggelar program Safari Ramadhan bertajuk "Ramadhan Bersama Palestina, Ramadhan Membasuh Luka Palestina". Tema

“Membasuh Luka Palestina” karena sekarang ini warga Palestina di berbagai tempat sedang terluka oleh kejahatan genosida oleh zionis Israel. Program ini mengikutsertakan 11 Imam dari Palestina

yang berkeliling di berbagai tempat untuk menyampaikan dakwah, menjelaskan situasi di Palestina, dan mendorong jamaah memberi bantuan kepada Palestina melalui Baznas RI. Beberapa daerah tersebut, antara lain

Banten, Depok, Bekasi, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Dari program ini terhimpun dana sebesar Rp 5,2 miliar yang akan disalurkan untuk membantu warga Palestina. □

## Silaturahmi dengan Imam Palestina

# Lestari Moerdijat: Dukungan Kemerdekaan Palestina bagian Komitmen Menjalankan Amanah Konstitusi

Dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**A**KSI penjajahan zionis Israel terhadap Palestina, yang menimbulkan korban mayoritas perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus segera dihentikan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/4).

Pernyataan Lestari yang merupakan Wakil Ketua MPR RI koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu diungkapkan di sela acara Silaturahmi dan Buka Puasa MPR, MUI dan Baznas bersama para Imam Palestina di Gedung Nusantara IV MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/4) sore.

Hadir pada acara tersebut, antara lain Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, beserta

sejumlah pimpinan MPR, Dr. H Anwar Abbas (Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali (Kepala Staf Angkatan Laut), Letjen TNI Bambang Ismawan (Kepala Staf Umum TNI) serta jajaran pimpinan Baznas dan sejumlah perwakilan ormas Islam.

Syekh Dr. Samih Kamil Ahmad Hajjaj, salah satu Imam Palestina yang hadir menceritakan kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, yang memakan korban perempuan dan anak-anak.

Aksi keji Israel, menurut Syekh Samih, ikut menghancurkan 1.000 masjid dan kini menyisakan 200 masjid di tanah Palestina. Serangan zionis Israel juga tak menyisakan rumah sakit memperpanjang penderitaan

rakyat Palestina.

Pada sambutannya, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyebutkan apa yang terjadi di tanah Palestina adalah sebuah tragedi kemanusiaan.

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, kepedulian masyarakat Indonesia terhadap penderitaan yang dialami masyarakat Palestina sangat tinggi.

Hal itu, tambahnya, terlihat dari solidnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, para ulama dan sejumlah organisasi kemasyarakatan di tanah air dalam merespon setiap perkembangan konflik antara Israel dan Palestina.

Kolaborasi antara kementerian dan lembaga, serta masyarakat, dalam upaya penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina, ujar Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, mampu berjalan dengan baik.

Kehadiran Baznas, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sebagai salah satu lembaga yang menampung dana bantuan untuk Palestina mempermudah masyarakat untuk mewujudkan kepedulian mereka.

Demikian juga, tambah Rerie, dengan keterlibatan TNI dan Kementerian Luar Negeri yang berperan aktif mengantarkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia sampai ke rakyat Palestina.

Rerie sangat berharap, sikap masyarakat dan pemerintah Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diamanatkan konstitusi kita dapat terus ditumbuhkembangkan menyikapi dinamika dalam berbangsa dan bernegara. □

Mudik yang Aman dan Nyaman

# Lestari Moerdijat: Persiapkan Langkah Antisipasi dengan Baik

Upaya antisipasi sejumlah potensi kendala di masa mudik Lebaran harus dipersiapkan dengan baik oleh semua pihak untuk mewujudkan mudik yang aman dan nyaman.

**M**UDIK merupakan kegiatan tahunan yang sudah menjadi tradisi luar biasa, sehingga perlu diantisipasi berdasarkan pengalaman tahun lalu, agar masa mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan nyaman," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema 'Mudik Aman dan Nyaman Menyambut Idul Fitri 2024' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (27/3).

Diskusi yang dimoderatori Hamdan Alkafie (News Anchor Metro TV) itu, dihadiri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso, S.H., S.I.K., (Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas /Korlantas Polri), Ririn Widiastuti (Executive Vice President Passangers and Sales PT Kereta Api Indonesia/KAI), dan Arief Hermawan (Group Head Pelayanan Kapal, PT. Pelabuhan Indonesia Persero/Pelindo) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Chadie Nurtjahyadi (Wartawan Otomotif Media Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, mudik yang aman dan nyaman selalu menjadi dambaan masyarakat setiap tahun dengan beragam jenis transportasi yang dipilih, mulai angkutan darat, laut, sampai udara.

Di sisi lain, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, masih kerap terjadi kecelakaan, kejahatan, dan potensi ancaman cuaca ekstrem di masa mudik Lebaran yang meningkatkan risiko dalam perjalanan.

Menyikapi kondisi tersebut, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, kesiapan para pemangku kepentingan dalam mengantisipasi sejumlah potensi risiko yang dihadapi para pemudik itu harus dilakukan dengan baik berdasarkan pengalaman tahun lalu.

Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam, tambah Rerie, harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ancaman bagi para pemudik.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, keamanan dan kenyamanan perjalanan mudik Lebaran dapat terwujud melalui dukungan kesiapan semua pihak, termasuk masyarakat.

Di samping kesiapan para aparaturnya pemerintah pusat dan daerah, serta para operator transportasi, tambah Rerie, kesiapan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik memegang peranan penting untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di jalan.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, mengungkapkan, pada masa mudik tahun ini tercatat potensi pergerakan 193,6 juta orang dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Raden mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan, antara lain dengan didasari evaluasi pelaksanaan mudik tahun lalu.

Pihak kepolisian, ujar Raden, akan terus berupaya menekan jumlah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang berpotensi terjadi di masa libur mudik Lebaran.

Kepolisian, ungkap Raden, konsisten melakukan survei jalur mudik via darat, jalan tol, jalur sebidang rel kereta api, dan sejumlah potensi titik macet akibat pasar tumpah.

Selain itu, tambah dia, keamanan jalur menuju penyeberangan dan pelabuhan laut juga menjadi perhatian, karena sejumlah jalur penyeberangan masih alami kerusakan.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, ujar Raden, pihaknya memperkirakan puncak arus mudik pada H-3 Lebaran dan arus balik diperkirakan terjadi dua tahap, yaitu H+2 dan H+7.

Diakui Raden, strategi pemberian diskon tarif tol sebelum puncak arus mudik yang diberlakukan pada tahun lalu belum mampu mengendalikan jumlah arus pemudik.

Executive Vice President Passangers and Sales PT KAI, Ririn Widiastuti mengungkapkan, angkutan Lebaran merupakan hajatan besar bagi PT KAI.

Seluruh jajaran PT KAI, jelas Ririn, akan terlibat aktif pada posko-posko angkutan Lebaran. Karena, tambah dia, bisnis KAI itu sejatinya adalah bisnis keselamatan.

Karena itu, ungkap Ririn, jajaran PT KAI juga sudah melakukan ramp check seluruh

kereta dan kelayakan stasiun, serta sarana dan prasarana lainnya, bekerjasama dengan Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI.

Selain itu, tambah dia, langkah menginspeksi jalur-jalur kereta api di jalur Utara dan Selatan Jawa juga sudah dilakukan pada 5-7 Maret 2024 lalu. Secara umum, hasil inspeksi tersebut menunjukkan jalur Utara dan Selatan aman untuk menghadapi arus mudik.

Pada kesempatan itu, Ririn mengungkapkan, PT. KAI juga melakukan sejumlah penambahan kereta untuk mengantisipasi potensi peningkatan permintaan di masa mudik Lebaran.

Grup Head Pelayanan Kapal PT. Pelindo, Arif Hermawan, mengungkapkan, dalam menghadapi masa mudik Lebaran tahun ini PT. Pelindo menyediakan 75 bus untuk 12 rute mudik gratis.

Saat ini, tambah Arif, 63 terminal penumpang di wilayah Indonesia yang dikelola PT. Pelindo sudah siap melayani para pemudik.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, jelas dia, puncak arus mudik di pelabuhan

diperkirakan terjadi pada H-2 dan puncak arus balik diperkirakan pada H+8.

Dalam upaya mengantisipasi kepadatan di penyeberangan Merak-Bakuheuni, Arif mengungkapkan, pihaknya akan memanfaatkan Pelabuhan Ciwandan (dermaga kargo) untuk penyeberangan di masa mudik.

Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, tambah dia, PT Pelindo juga sudah melengkapi sejumlah pelabuhan sarana ruang tunggu yang nyaman dan alat pemindai penumpang.

Wartawan Otomotif Media Indonesia, Chadie Nurtjahyadi mengingatkan agar perjalanan mudik berjalan dengan aman dan nyaman masyarakat diharapkan memperhatikan kelayakan kondisi kendaraan.

Cek kondisi mesin, keseimbangan dan kekerasan roda kendaraan, tambah Chadie, merupakan langkah penting sebelum melakukan perjalanan mudik.

Karena, tambah Chadie, peristiwa pecah ban setingkali terjadi pada pengguna jalan tol. Ban yang kurang angin, jelas dia, rawan pecah karena terjadi difleksi pada ban.

Chadie menyarankan penambahan angin

4 psi dari tekanan normal ban dan membawa kompresor portabel untuk mengantisipasi ban kekurangan angin di perjalanan.

Selain itu, Chadie juga mengingatkan agar sebelum berangkat mudik bahan bakar kendaraan dipastikan penuh, agar mengurangi potensi antre di rest area.

Pada kesempatan itu, wartawan senior, Saur Hutabarat juga mengingatkan agar sebelum melakukan perjalanan mudik pengemudi dipastikan cukup istirahat untuk menghindari terjadi kecelakaan.

Kemacetan yang timbul karena serentak istirahat di rest area, menurut Saur, juga harus menjadi perhatian di masa mudik Lebaran.

Terkait penyeberangan antar pulau antara Jawa dan Sumatera, Saur menyarankan penyelesaian yang permanen dengan membangun jembatan antarpulau.

Menurut Saur, kisah sukses penyeberangan antara Inggris dan Perancis dengan kereta api melalui terowongan bawah laut sepanjang 50,46 Km bisa menjadi contoh, daripada setiap tahun menghadapi permasalahan yang sama jelang masa mudik Lebaran. □

## Terima CEO Aspen Medical Group Indonesia

# Bamsoet Dukung Pembangunan Rumah Sakit Internasional di Indonesia

Kehadiran rumah sakit internasional di Indonesia diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada warga Indonesia untuk berobat di dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung Aspen Medical untuk mendirikan serta mengembangkan rumah sakit internasional di sejumlah wilayah di Indonesia. Ditahap awal Aspen Medical tengah membangun rumah sakit Internasional di Depok, Jawa Barat. Menyusul pembangunan rumah sakit internasional di Cikarang dan Karawang Jawa Barat, serta Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kehadiran rumah sakit internasional di Indonesia diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada warga Indonesia untuk



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berobat di dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Selain untuk mengembangkan wisata medis di Indonesia, di mana warga negara lain mau datang ke Indonesia dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya,” ujar Bamsuet usai menerima CEO Aspen Medical Group Indonesia Andrew Rochford di Jakarta, Senin (25/3/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Aspen Medical merupakan perusahaan Australia, penyedia layanan kesehatan yang didirikan pada tahun 2003. Pelayanan yang diberikan mencakup bidang desain, konstruksi, dan manajemen rumah sakit, klinik serta sistem perawatan kesehatan.

“Selama lebih dari 20 tahun, Aspen Medical telah beroperasi di sejumlah negara. Di antaranya, Australia, Inggris Raya, Eropa,

Timur Tengah, Amerika Utara, Afrika, Asia, serta kawasan Indo-Pasifik. Kini Aspen Medical akan mengembangkan layanan kesehatan berupa rumah sakit internasional di sejumlah wilayah Indonesia,” kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menuturkan, pada tahun 2020, Aspen Medical dan Docta menandatangani kesepakatan untuk menginvestasikan 1 USD 1 miliar atau setara Rp 14 triliun di Indonesia, dan bekerja sama dengan BUMD Jawa Barat PT Jasa Sarana mendirikan perusahaan joint venture Sanusa Medika. Sanusa Medika menargetkan untuk membangun 23 rumah sakit internasional dan 650 klinik kesehatan di Provinsi Jawa Barat dalam 20 tahun ke depan.

“Tahap pertama Sanusa Medika tengah melakukan pembangunan Rumah Sakit

Internasional Aspen Medical Hospital Depok Jawa Barat. Rumah sakit ini didirikan di lahan seluas 12.500 meter persegi di kawasan Shila at Sawangan Depok, dengan investasi sebesar Rp 600-750 miliar. Pembangunan Rumah Sakit Internasional Aspen Medical Hospital Depok telah diresmikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pada Juni 2023 lalu,” kata Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini memaparkan, kerjasama pembangunan rumah sakit internasional tersebut merupakan hasil nyata dari pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Anthony Norman Albanese ketika acara G20 tahun 2022. Sekaligus merupakan wujud kemitraan antara Indonesia-Australia yang tertuang pada Program Kerjasama Ekonomi dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

“Aspen Medical Hospital Depok merupakan rumah sakit tipe B berstandar internasional dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 200 unit. Mengusung konsep green hospital dengan fasilitas bangunan modern yang mengedepankan berbagai teknologi yang berkaitan dengan industri hospitality. Ke depan Aspen Medical juga akan membangun dan mengembangkan rumah sakit internasional di wilayah Indonesia Timur yang akan dimulai dari Makassar,” pungkas Bamsuet. □



## Abdullah Muhammad

Tokoh Masyarakat Islam Bali

### Toleransi Mesti Dijaga



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**EBAGAI warga masyarakat Islam yang berdomisili di Pulau Bali mesti menjaga hubungan baik dengan masyarakat lokal yang tentunya mayoritas menganut agama yang berbeda. Kami hidup membaur dengan masyarakat lokal sudah bertahun-tahun terjadi dan tidak ada masalah.

Masyarakat lokal di Bali juga sangat menerima keberadaan kami. Sehingga selama bertahun-tahun kami hidup di tanah perantauan Bali ini harmonisasi tetap terjaga dengan baik. Kehidupan kami seperti biasa, jika ada perayaan keagamaan masyarakat lokal kami ikut gembira.

Itu yang seharusnya terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, Indonesia memang dibentuk dari keberagaman rakyatnya. Indonesia sangat kaya dan beragam, mulai dari agama, suku, ras, bahasa dan lainnya. Tapi, semua bersatu dalam wadah NKRI, satu sama lain harus saling menghormati.

Yang mayoritas menerima perbedaan saudara sebangsa yang lain, dan yang minoritas berbaur dengan masyarakat lokal.

Kami berharap pemerintah daerah, bahkan pusat melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat agar hubungan yang harmonis antar-rakyat yang berbeda, terutama agama, semakin terjaga dan kuat, tidak mudah diprovokasi pihak yang tidak ingin Indonesia bersatu. □

DER

## Saman Ma'ruf

Masyarakat Gorontalo

### Pemimpin Daerah Mesti Memahami Masyarakatnya

**M**ASYARAKAT pasti akan memilih kepala daerah, Bupati atau Gubernur, yang memahami rakyatnya. Memahami dalam hal ini dia tahu betul apa dan bagaimana kebutuhan dan kegelisahan rakyatnya.

Jika pemimpin daerah sudah memahami seperti itu maka kepala daerah akan sangat mudah mencari solusi yang terbaik untuk semua permasalahan warganya. Ini adalah yang terbaik yang harus dipahami para kepala daerah atau calon kepala daerah.

Saya sendiri berpendapat bahwa kepala daerah mesti jauh-jauh hari turun ke lapangan, ke desa-desa, cari tahu apa yang terjadi dengan rakyatnya. Istilahnya jemput bola, jangan hanya menunggu saja. Ketika hal tersebut terjadi maka akan terjadi sinergi yang baik antara pemimpin dan rakyatnya secara harmonis, sehingga apapun program pemimpin akan lancar terlaksana. □



DER

Amir Uskara Bicara Soal PPHN:

# PPHN **Sebagai** Roadmap Pembangunan Nasional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**W**AKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes., sangat mendukung munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang digagas MPR RI. Dengan PPHN, semua perencanaan pembangunan nasional, mulai dari pembangunan ekonomi, politik, demokrasi, budaya, dan lainnya bisa terlaksana dengan terarah dan berkesinambungan.

“Pasca saya dilantik menjadi Wakil Ketua MPR beberapa hari lalu, saya belum begitu memahami MPR. Kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman Pimpinan MPR lainnya. Dari Ketua MPR, saya mengetahui perihal PPHN ini. Saya pikir ini luar biasa. Bisa menjadi solusi segala permasalahan bangsa ini ke depan,” katanya, saat ditemui di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/4/2024).

Lebih jauh, Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ini mengungkapkan bahwa jika PPHN terwujud nanti, arah pembangunan nasional tidak lagi disesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih. Tapi, berpedoman dan mengacu kepada PPHN dan terus bersambung sampai ke daerah-daerah.

“Ini yang saya suka dari PPHN, siapapun pemimpinnya akan mengacu kepada PPHN. Sehingga tercipta keselarasan yang sempurna dari pusat ke daerah. Jika masih mengacu kepada visi

misi Presiden terpilih maka lima tahun akan terus berganti arah pembangunan nasional. Menurut saya, itu malah akan memboroskan anggaran negara, karena banyak program yang tidak berjalan karena berganti kepemimpinan,” terang politisi PPP ini.

Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Amir Uskara, karena banyak program yang tidak berkesinambungan dan tidak berjalan maksimal maka akan menggerus bahkan menghabiskan potensi-potensi kekayaan negara dan kekayaan sumber daya alam yang ada, serta akan merugikan masa depan generasi muda Indonesia.

Lebih lanjut, Amir Uskara mengungkapkan bahwa PPHN melalui perencanaan pembangunan demokrasi, politik, dan ketatanegaraan Indonesia, juga bisa menjadi acuan mau dibawa ke arah mana bangsa dan negara ini ke depan. Hal tersebut, menurut Amir Uskara, sangat penting untuk negara Indonesia. Contohnya, di PPHN akan dirumuskan tentang kontinuitas sistem Pemilu. Apakah masih dilanjutkan pemilihan langsung atau tidak.

“Itu hanya salah satu contoh saja. Banyak hal lainnya dalam perencanaan pembangunan politik dan demokrasi serta ketatanegaraan Indonesia, yang bisa dirumuskan dalam PPHN,” ujar dia.

Pada intinya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari dapil Sulsel I’ ini menegaskan bahwa PPHN sebagai patron atau acuan dalam



perencanaan pembangunan nasional di semua bidang, sangat penting untuk segera diwujudkan. Kalau bisa di periode MPR 2019-2024 sudah selesai. Sebab, PPHN akan menjadi rel yang harus diikuti oleh siapapun

pemimpin, baik pemimpin nasional dan daerah.

Ditambahkannya, di PPHN juga mesti dirumuskan target-target dalam menjalankan pembangunan, yang harus dicapai oleh

siapapun yang mengelola daerah atau negara ini. Misalnya, akan ditetapkan dalam PPHN target pertumbuhan ekonomi berapa persen. Pemimpin akan melakukan sesuatu agar target itu tercapai.

Target sangat ditekankan Amir Uskara. Sebab, selama ini hanya berkutat seputar asumsi. Kalau cuma asumsi, jika tidak tercapai tidak akan menjadi beban buat pemimpin. Namanya juga asumsi, dugaan atau perkiraan. Kinerja pemimpin akan dikunci oleh target. Jika sampai tidak mencapai target yang ditetapkan, maka kepemimpinannya dianggap tidak sukses atau tidak berhasil.

Dia berharap, dengan adanya target ini akan muncul gairah dalam kinerja dan kerja-kerja pemimpin dan pemerintahannya. "Tentu saja, dalam menyusun target itu akan dipertimbangkan secara matang seluruh aspek yang memengaruhi dalam pencapaian target," tandasnya. □



## Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama HIKMAHBUDHI

# Bamsoet: Pentingnya 'Kepemimpinan Berkelanjutan' dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, gagasan Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi ideal dan cita-cita luhur yang tidak mungkin bisa dicapai secara instan. Tetapi membutuhkan proses serta menuntut kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan. Saat ini masih ada rentang waktu 21 tahun untuk menuju Indonesia Emas 2045. Artinya, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas setidaknya bangsa Indonesia masih harus melampaui hingga empat periodisasi pemerintahan.

"Di sinilah pentingnya gagasan 'kepemimpinan keberlanjutan'. Pembangunan, khususnya dalam jangka panjang, harus diselenggarakan dengan mengedepankan aspek kesinambungan dan dibangun di atas visi bersama yang telah dirumuskan secara matang, dan disepakati sebagai konsensus nasional oleh segenap pemangku kepentingan. Ini penting untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi perubahan atau pergeseran orientasi pembangunan jangka panjang yang telah disepakati. Termasuk ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), di Jakarta, Jumat (29/3/24).

Hadir, antara lain Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) Wiryawan, Sekretaris Presidium Pusat HIKMAHBUDHI Agustina, serta jajaran pengurus dan keluarga besar HIKMAHBUDHI.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sedemikian pentingnya konsep 'kepemimpinan berkelanjutan' sehingga survei Institutional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Global EY tahun 2021 mencatat bahwa sekitar 74% investor akan mengalihkan investasi dari perusahaan yang memiliki nilai 'kinerja keberlanjutan' yang buruk. Senafas dengan hasil survei tersebut, survei GlobeScan Sustainability yang dilakukan ERM tahun 2023 juga mengungkapkan persepsi para pakar global yang menganggap isu

'keberlanjutan' sebagai isu prioritas tinggi dalam jangka panjang.

"Gagasan 'kepemimpinan berkelanjutan' meniscayakan bahwa kepemimpinan harus berfokus pada terciptanya nilai jangka panjang dan tidak tergiur untuk mengejar keuntungan atau pragmatisme sesaat. Artinya, dibutuhkan pandangan





visioner agar mampu melihat masa depan yang berkelanjutan, memiliki komitmen, dan tanggung jawab sosial, serta kepedulian pada kondisi lingkungan,” kata Bamsot.

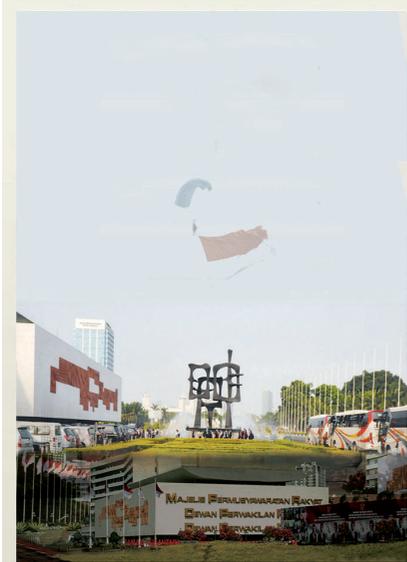
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan tahapan-tahapan pembangunan yang berproses secara berkesinambungan. Dalam kaitan ini, penting dibangun sebuah komitmen kebangsaan bahwa ketika

implementasi pembangunan jangka panjang akan melampaui batasan-batasan periodisasi pemerintahan maka segenap pemangku kepentingan harus tetap menghormati orientasi pembangunan yang telah menjadi konsensus bersama.

“Komitmen kebangsaan ini penting agar kita memiliki wawasan, cara pandang dan persepsi yang sama. Baik dalam memetakan dan merespon berbagai persoalan kebangsaan, maupun dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Bamsot. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Menerima Pelajar Teladan

# Bamsoet Dukung Event SKYNATION 2024 SMA Labschool Kebayoran



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersama OSIS SMA Labschool Kebayoran akan bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam rangkaian event SKYNATION 2024. Di dalamnya juga terdapat berbagai rangkaian lomba, seperti lomba paskibraka ketangkasan baris-berbaris (LKBB), variasi, dan formasi. Target peserta 40 tim Paskibra SMP dan 40 tim Paskibra SMA.

“Lebih dari sekadar ajang lomba, SKYNATION juga dirancang untuk memperkuat kedisiplinan dan menciptakan pengalaman berharga bagi para siswa. Sehingga diharapkan dapat membentuk jiwa kepemimpinan sekaligus memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme generasi muda agar semakin kuat,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus OSIS SMA Labschool Kebayoran, di Jakarta, Kamis (14/3/24).

Hadir, antara lain: Ketua OSIS SMA Labschool Kebayoran Amia Kirana, Ketua

Bidang 1 OSIS SMA Labschool Kebayoran Melati Herawati, Ketua Pelaksana SkyNation 2024 Ruby Aliya, dan PO Teknis SkyNation 2024 Severnaya Alifa.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, Indonesia memiliki momentum emas dengan hadirnya bonus demografi. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% atau sebanyak 227 juta jiwa adalah





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kelompok usia produktif.

“Bonus demografi adalah momentum penting yang tidak boleh begitu saja kita lewatkan. Kita perlu belajar dari pengalaman berbagai negara yang telah sukses

mengoptimalkan periode bonus demografi, seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang. Setiap negara tersebut berhasil memanfaatkan momentum bonus demografi dengan cara masing-masing,” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan, masih adanya fenomena kekerasan dan vandalisme, paham radikal, sikap intoleran, dan berbagai arus pemikiran yang menegaskan ideologi serta menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa. Berbagai virus ideologi tersebut jika tidak ditangkal sejak saat ini dapat membuat bonus demografi berubah menjadi bencana demografi.

“Hadirnya berbagai virus ideologi yang merongrong kehidupan generasi muda memang tidak mudah untuk kita diagnosa secara kasat mata, namun dapat kita rasakan dalam kehidupan keseharian. Misalnya, dalam gaya hidup, cara berpakaian, bersikap dan bertingkah laku, di mana kecenderungan menjadikan budaya asing sebagai kiblat dan rujukan. Karena itu, membekali generasi muda kita dengan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan, untuk melindungi jatidiri dan identitas kebangsaan kita di masa depan, menjadi sebuah keniscayaan,” pungkas Bamsuet. □





**Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.**

Ketua MPR RI

## Merawat Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga

**K**ONSUMSI masyarakat atau rumah tangga sebagai faktor yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi jangan diperlemah. Sebaliknya, negara patut menjabarkan dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada merawat dan memperkuat daya beli masyarakat. Karena itu, kecenderungan naiknya harga bahan pangan akhir-akhir ini harus direspons dengan kebijakan yang tepat guna menghindari peningkatan laju inflasi.

Inflasi yang jauh dari takaran moderat selalu menghadirkan kesulitan bagi kehidupan semua orang. Sebab, saat inflasi tampak begitu ekstrim, semua orang, tanpa kecuali, dipaksa harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan atau membeli barang dan jasa, sementara pada saat yang sama nilai pendapatan atau penghasilan per orang maupun keluarga tetap alias tidak mengalami kenaikan.

Ketika regulator terlihat tidak sungguh-sungguh mengendalikan laju inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa, setiap orang atau keluarga akan sampai pada keputusan untuk menahan diri dengan mengurangi pengeluaran atau belanja konsumtif. Artinya, konsumsi masyarakat menurun karena melemahnya daya beli akibat naiknya harga barang dan jasa. Ketika setiap orang atau keluarga terdesak untuk memenuhi kebutuhan yang tak terhindarkan, dia akan menguras tabungan atau mencari pinjaman dengan bunga tinggi.

Hari-hari ini, ketika harga beras dan beberapa bahan pangan lainnya mengalami kenaikan, semua keluarga tentu harus mengeluarkan lebih banyak uang atau biaya (cost push) untuk bisa menyediakan kebutuhan makan di rumah. Selain mendengarkan keluh kesah ibu rumah tangga. Kekhawatiran yang segera mengemuka adalah perhitungan atau perkiraan dampak kenaikan harga bahan pangan itu terhadap laju inflasi. Menteri Keuangan dan juga Bank Indonesia terus mewaspadai kecenderungan itu.

Perkembangannya cenderung mencemaskan jika mengacu pada pernyataan resmi Badan Urusan Logistik (Bulog). Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, pada Senin (18/3), mengungkapkan bahwa harga beras kemungkinan bertahan dan tidak serendah seperti yang diperkirakan semula. Artinya, harga beras sulit turun. Dia juga menjelaskan bahwa biaya produksi petani sekarang sudah naik. Ada sejumlah faktor yang membentuk harga gabah; antara lain biaya tenaga kerja yang porsinya paling besar, kemudian biaya sewa lahan, pupuk dan benih.

Persoalan riil yang mengemuka adalah seberapa besar dampak tingginya harga beras saat ini terhadap laju inflasi sekarang dan bulan-bulan mendatang. Mahalnya harga beras dan bahan pangan lain saat ini sudah pasti berkontribusi pada laju inflasi. Faktor ini tidak boleh disederhanakan karena pada akhirnya akan berdampak negatif pada kesejahteraan

masyarakat. Sebab inflasi yang tinggi akan mereduksi kekuatan perekonomian nasional untuk terus bertumbuh. Dan, faktor inflasi tinggi juga memperlemah atau menggerus daya beli masyarakat, karena tingginya harga bahan pangan tidak diikuti oleh kenaikan penghasilan konsumen atau keluarga.

Kekuatan konsumsi rumah tangga dalam menyumbang dan merawat pertumbuhan ekonomi nasional sudah terbukti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian nasional pada kuartal IV tahun 2023 bisa tumbuh 5,04% berkat kekuatan belanja rumah tangga, meliputi konsumsi, transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel. Kontribusi belanja rumah tangga terhadap pertumbuhan pada kuartal IV-2023 itu mencapai 2,36%.

Kalau sebagian besar belanja rumah tangga hari-hari ini harus dialokasikan untuk beras dan bahan pangan lain yang harganya sedang mahal, kebutuhan lainnya tentu saja tidak diutamakan atau ditunda. Dampak negatifnya akan langsung dirasakan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM). Produktivitas sektor industri juga menurun karena melemahnya permintaan pasar.

Selain memperhitungkan dampaknya terhadap laju inflasi, kenaikan harga beras dan bahan pangan lain saat ini tentu saja mengeskalasi kesulitan hidup keluarga-keluarga miskin atau mereka yang berkekurangan. Masih berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga program bantuan sosial (Bansos) menjadi bukti yang menjelaskan tentang fakta kehidupan warga miskin.

Data Kementerian Keuangan cukup detail menjelaskan fakta tentang kemiskinan itu. Tahun lalu, Pemerintah mencairkan dan mendistribusikan dana Rp 492 triliun untuk mengatasi ragam masalah yang dihadapi warga miskin. Untuk PKH dialokasikan Rp 14,7 triliun bagi 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Alokasi untuk kartu

sembako mencapai Rp 22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM. Inilah dua Bansos yang berdampak langsung bagi konsumsi makanan keluarga miskin di Indonesia. Dengan kenaikan harga bahan pangan saat ini, manfaat nilai Bansos itu tidak akan dapat mengatasi ragam kesulitan hidup warga miskin.

Selain warga miskin, perhatian juga patut diberikan kepada angkatan kerja yang masih menganggur serta para pekerja (buruh) berpenghasilan rendah. BPS mencatat, pengangguran terbuka per Agustus 2023 sebesar 5,32%, dan rata-rata upah buruh pada Agustus 2023 sebesar Rp 3,18 juta. Tentu saja kenaikan harga bahan pangan menimbulkan kesulitan hidup bagi para buruh dan keluarganya.

Karena dampak negatifnya yang demikian luas itu, kenaikan harga beras dan bahan pangan lain saat ini hendaknya segera ditanggapi dengan kebijakan serta langkah-langkah yang tepat guna. Ingat bahwa penghasilan per kapita masyarakat tidak naik di tengah kenaikan harga bahan pangan.

Salah satu opsi yang paling mungkin untuk merespons persoalan ini adalah intervensi pemerintah dengan mensubsidi harga beras. Kalau pemerintah bisa mensubsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi bahan pangan tentunya jauh lebih penting.

Upaya menjaga harga bahan pangan pada tingkat yang wajar tidak semata-mata untuk menahan laju inflasi. Jauh lebih penting adalah merawat daya beli masyarakat dan kekuatan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu faktor penyangga pertumbuhan ekonomi nasional.

Kalau Bulog sudah menyatakan harga beras tidak akan turun karena beberapa alasan, diperlukan kerja nyata lintas sektoral untuk segera mengatasi persoalannya. □

## Evaluasi Kinerja dan Penyampaian LKIP Tahun 2023



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**LT. Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Siti Fauziah, SE., MM., didampingi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Hentoro Cahyono, SH., MH.; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Dra. Triyatni; dan Kepala Biro Pengkajian Konstitusi, Heri Herawan, SH., menghadiri acara 'Evaluasi Kinerja dan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.'

Acara yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024), ini juga dihadiri para pejabat eselon III dan IV, serta pegawai di lingkungan Setjen MPR RI.

Plt. Sesjen MPR, Siti Fauziah, dalam pengarahannya, memberikan apresiasi atas seluruh capaian kinerja dari seluruh deputi, biro, bagian, subbagian, badan, dan unit. "Saya apresiasi kepada tim penyusun LKIP yang tepat waktu telah menyelesaikan laporan," ujarnya.

Siti Fauziah mengakui, dalam

melaksanakan kinerja pasti ada berbagai kendala dan tantangan sehingga membuat beberapa kinerja mengalami penurunan. "Kekurangan yang ada akan kita perbaiki di

tahun 2024," tegasnya. Hambatan yang membuat kinerja menurun, tegas Ibu Titi, sapaan Siti Fauziah, bisa dimaklumi namun tidak bisa ditoleransi.



Lebih lanjut Ibu Titi menyatakan, kinerja di tahun 2023 menurun dibanding pada tahun 2022. Pada tahun 2022 nilai RB (Reformasi Birokrasi) adalah BB, namun pada tahun 2023 nilai RB-nya menjadi B. Melihat capaian yang demikian, Ibu Titi mengajak kepada semua untuk instropeksi. "Mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa menaikkan kembali capaian yang ada," imbuhnya.

Ibu Titi juga mendorong seluruh pegawai di MPR untuk meningkatkan kinerja agar indikator kinerja yang ideal bisa dicapai. Indikator kinerja, RB di tingkat nasional rata-rata 76.81, sementara RB

MPR pada angka 69,11. "Bagus atau tidak, itu semua merupakan hasil dari kerja kita," katanya.

Salah satu kiat untuk meningkatkan kinerja, menurut Ibu Titi, penting adanya mutasi dan rotasi. Dengan adanya rotasi dan mutasi diharapkan muncul semangat baru. Dia menyebutkan, dalam melakukan rotasi dan mutasi melibatkan tim penilaian kinerja. Dengan melibatkan tim penilaian kinerja, di sana ada pertimbangan-pertimbangan dalam memutasi dan merotasi pegawai.

Dalam rotasi dan mutasi pegawai digunakan metoda tidak memindahkan

pegawai dalam satu ruangan secara keseluruhan. Masih ada pegawai lama yang dipertahankan agar bisa menularkan ilmunya kepada pegawai yang baru.

Siti Fauziah dalam kesempatan itu juga mengingatkan, di tahun ini, MPR banyak melaksanakan berbagai sidang. Antara lain, Sidang Tahunan MPR, Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, Sidang Pelantikan Anggota Baru MPR, Sidang Pelantikan Pimpinan MPR, dan Sidang Pelantikan Presiden. "Tahun ini kita tidak berhenti pada satu kegiatan," ungkapnya. □

DER

## MPR Mendapat Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VII



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EKRETARIAT Jenderal (Setjen) MPR RI mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VII, sebagai Lembaga Negara yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam bertransaksi.

Penghargaan disampaikan saat berlangsungnya kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan KPPN Jakarta VII Award Tahun 2023 di Aula Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Rabu (21/

2/2024). Penghargaan diterima langsung oleh Siti Fauziah, SE., MM., selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI.

Mengomentari penghargaan yang diterimanya, Siti Fauziah mengucapkan syukur dan terimakasih atas prestasi yang didapat. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja yang selama ini sudah dilaksanakan. Dan, penghargaan ini akan memacu MPR untuk lebih meningkatkan penggunaan KKP di setiap transaksi, sebagaimana dianjurkan.

"Saat ini kita baru peringkat dua. Artinya, banyak yang masih bisa ditingkatkan untuk mengejar prestasi yang diraih sekarang. Kami juga menyadari, banyak transaksi yang bisa dilakukan dengan non tunai. Intinya, kita akan terus berusaha hingga seminimal mungkin mengeluarkan uang cash," ujar Ibu Titi, sapaan akrabnya.

Menurut Ibu Titi, penggunaan KKP akan meminimalisir risiko yang bisa timbul, termasuk masalah keamanan. Selain itu, pembayaran menggunakan KKP mudah untuk dilakukan pengecekan dan sampai ke sasaran yang tepat.

"Di MPR, pembayaran gaji dan tunjangan sudah tidak memakai uang tunai. Tetapi, pembayaran kegiatan yang sifatnya langsung kepada masyarakat, kita masih terkendala. Contohnya, pembayaran transport peserta kegiatan sosialisasi. Sulit rasanya, kita meminta nomer rekening seluruh peserta," ungkapnya..

Ke depan, Siti Fauziah berharap, seluruh jajaran MPR bisa memperketat pemakaian uang tunai. Karena sudah terbukti, pemakaian KKP lebih aman dan efisien. "Saya yakin, ke depan kita mampu membatasi pembayaran secara tunai, dan menggantikannya dengan cara cashless. Apalagi, dalam pengerjaannya pembayaran nontunai itu lebih aman, efisien, dan mudah dipertanggungjawabkan," pungkasnya. □

DER

Delegasi Sekretariat Parlemen Korsel

Diterima Plt. Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE., MM.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**ELAKSANA tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., Senin (1/4/2024), menerima kunjungan Sekretaris Parlemen Korea Selatan (Korsel). Delegasi dari Negara Ginseng yang dipimpin oleh Park Tae-hyung, Sekretaris Parlemen Korea Selatan, itu diterima di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selalu pimpinan delegasi, Park Tae-hyung menyampaikan ucapan terima kasih atas penyambutan yang diberikan oleh Setjen MPR kepada rombongan yang dipimpinnya. Ia berharap, kunjungan tersebut bisa mempererat hubungan kedua negara, khususnya antara Sekretariat Jenderal Parlemen Indonesia dan Parlemen Korea Selatan (Korsel).

Untuk mempererat kerja sama sekretariat parlemen kedua negara, Park Tae-hyung dalam kesempatan itu mengundang Plt.

Sekretaris Jenderal MPR berkunjung ke Korsel. Park Tae-hyung menyatakan, akan sangat senang jika undangan tersebut





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

benar-benar bisa dipenuhi.

Dalam kesempatan itu, Park Tae-hyung mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Siti Fauziah, menyangkut tugas dan kewenangan MPR, serta syarat amandemen konstitusi hingga masalah pemakzulan Presiden. Park Tae-hyung juga bertanya tentang organisasi Setjen MPR yang saat ini dipimpin Siti Fauziah.

Menjawab harapan tamunya agar Plt. Sesjen MPR bisa memenuhi undangan berkunjung ke Korea, Ibu Titi, sapaan akrab Siti Fauziah, menyatakan, akan mempertimbangkan matang-matang undangan tersebut. Karena saat ini, menurut

Ibu Titi, Setjen MPR tengah mempersiapkan berbagai agenda penting yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Setjen MPR sudah pernah menerima kunjungan Sekretariat Parlemen Korsel. Saat itu, mereka juga menyampaikan undangan untuk kunjungan balasan, tetapi kunjungan balasan tersebut tak kunjung terlaksana,” ujar Ibu.

Menyangkut organisasi Kesetjenan MPR, Ibu Titi menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal MPR terdiri dari Aparatur Sipil Negara. Untuk bisa menjadi ASN di Setjen MPR, mereka harus mendaftar dan mengikuti tes masuk ASN, sebelum akhirnya diterima

dan ditempatkan di MPR. Saat ini jumlah ASN di lingkungan MPR sekitar 700 orang.

“Ini sedikit berbeda dengan sekretariat parlemen di Korsel. Di sana, pegawai sekretariat bisa berasal dari kalangan parlemen yang merekomendasikan sejumlah nama untuk diterima menjadi pegawai di Sekretariat Parlemen Korsel,” ungkap Siti Fauziah.

Sedangkan menyangkut tugas dan wewenang MPR, Ibu Titi menyampaikan bahwa MPR memiliki wewenang, antara lain: Mengubah dan menetapkan konstitusi, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberikan keputusan terhadap usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden.

Sedangkan tugas MPR, lanjut Ibu Titi, adalah memasyarakatkan Empat Pilar MPR, menyerap aspirasi masyarakat, daerah dan lembaga terkait pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menyelenggarakan sidang dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas MPR,” pungkas Ibu Titi.

Usai pertemuan antara Sekretariat Parlemen Korsel dan Sekretariat Jenderal MPR dilanjutkan sesi saling tukar cinderamata, dan foto bersama. Setelah itu, rombongan tamu dari Korsel ini pamit meninggalkan MPR dengan diantar oleh Ibu Titi. □





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Firman Subagyo, SE, MH**, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

## UU DKJ untuk Memperjelas Status Provinsi Daerah Khusus Jakarta

**D**EWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang. Pengesahan RUU DKJ ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani, ini dihadiri 69 anggota yang hadir fisik. Sementara 234 orang izin, dan 272 sisanya absen. Rapat dinyatakan kuorum.

"Apakah RUU Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan jadi undang-undang?" tanya Puan Maharani kepada anggota dewan. "Setujuuuu...," jawab anggota dewan yang hadir. "Tok", Puan Maharani mengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Sepekan sebelumnya, pada 18 Maret 2024, Badan Legislatif (Baleg) dan pemerintah telah menyepakati RUU DKJ dalam pembicaraan tingkat satu. RUU DKJ ini terdiri atas 12 bab dan 73 pasal. RUU itu berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota negara. Jakarta

tak lagi menyandang gelar sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI setelah lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). UU ini telah diubah dengan UU No 21 Tahun 2023.

UU IKN telah memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini membuat perubahan status, kedudukan, dan fungsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Beberapa poin penting dalam RUU DKJ ini di antaranya soal pemilihan Gubernur DKJ, dan juga Jakarta sebagai bagian dari kawasan Aglomerasi bersama dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Untuk membahas lebih lanjut UU DKJ ini, berikut penuturan anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo. SE., MH., yang juga anggota Baleg yang terlibat langsung dalam pembahasan RUU DKJ. Petikannya.

**Apa inti dari RUU Daerah Khusus Jakarta yang telah disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR akhir Maret 2024?**

Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ini menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak dan mendasar karena memang sudah diamanatkan UU IKN. Dalam UU IKN disebutkan selambat-lambatnya dua tahun setelah UU IKN diundangkan maka status dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta harus bisa dundangkan. Kita bersepakat agar UU DKJ segera diundangkan karena status dari Provinsi DKI Jakarta harus memiliki kejelasan setelah terbentuknya Ibu Kota Nusantara.

Kita syukuri karena hasil pendekatan dengan pemerintah dan semua fraksi-fraksi, akhirnya kita bersepakat untuk menyetujui beberapa poin penting, misalnya, Gubernur DKJ yang sebelumnya ditunjuk kemudian disepakati dipilih melalui Pilkada yang diselenggarakan secara langsung. Ini dimaksudkan agar demokrasi kita tetap dan memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat Betawi agar dapat menjadi calon dalam Pilkada.

**Bagaimana dinamika pembahasan tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKJ ini, karena sebelumnya pemilihan dilakukan secara langsung, gubernur dan wakil gubernur ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (satu putaran), kemudian berubah menjadi 50% + 1 (kemungkinan dua putaran)?**

Awalnya, semua bersepakat untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan suara terbanyak atau satu putaran. Tetapi injury time, pemerintah mengubah sikapnya, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus memperoleh suara 50% + 1 (kemungkinan dua putaran). Alasan pemerintah adalah agar ada stabilitas sehingga legitimasi kepala daerah yang terpilih menjadi kuat. Sebetulnya, bagi kami Partai Golkar, alasan itu belum bisa diterima oleh logika karena selama ini Pilkada yang dilakukan secara langsung di tingkat provinsi masing-masing juga aman-aman saja.

Pada waktu fraksi menyampaikan pendapat soal ini, dari 9 fraksi yang menolak penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah memperoleh suara 50% + 1 adalah Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB. Pada pengambilan keputusan terakhir Partai Golkar tetap mengusulkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan suara terbanyak, PKB juga dengan suara terbanyak, PKS bahkan menolak keseluruhan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di Baleg adalah dengan suara terbanyak maka kami (Partai Golkar) kalah suara.

**Bagaimana dengan usulan agar bupati dan walikota dalam UU DKJ ini juga dipilih secara langsung bukan melalui proses penunjukan seperti selama ini?**

Memang itu adalah sebuah pilihan. Dalam diskusi tentang status provinsi Daerah Khusus Jakarta ini harus betul-betul sesuai dengan konstitusi negara kita. Kalau Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara, ada teman-teman di Baleg berpendapat seharusnya Jakarta dikembalikan menjadi otonomi penuh. Artinya, gubernur dipilih langsung, bupati dan walikota juga dipilih langsung. Bupati dan Walikota dipilih melalui Pilkada, termasuk nanti di masing-masing kabupaten dan kota ada DPRD Kabupaten/Kota.

Ini sebetulnya bagus. Tetapi, mengingat

Pilkada tinggal beberapa bulan lagi, cukup sulit untuk menyiapkan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota, karena membutuhkan satu fasilitas yang harus tersedia dan dipersiapkan secara matang. Akhirnya, jalan yang ditempuh adalah usulan fraksi Partai Golkar, yaitu Pilkada dipilih langsung oleh rakyat di tingkat provinsi, namun tidak menutup kemungkinan nanti di kemudian hari dilakukan revisi-revisi sesuai kebutuhan. Ini solusi yang diusulkan Partai Golkar.

**Apakah dengan demikian Pilkada di tingkat kabupaten/kota Daerah Khusus Jakarta dilakukan pada Pilkada 2029?**

Kemungkinan untuk Pilkada langsung bupati dan walikota DKJ tetap terbuka sesuai dengan kebutuhan. Nanti DKJ bukan menjadi ibu kota negara. Jakarta akan menjadi pusat perekonomian global, seperti New York, dan kota-kota besar negara lain. Kemungkinan



Pilkada langsung untuk bupati dan walikota itu terbuka, dan sebenarnya jauh lebih bagus dibanding sekarang ini. Nanti tergantung pada kemauan politik. Tentu bagi partai politik lebih senang karena akan ada kader-kader partai politik yang juga duduk di DPRD, menjadi walikota atau bupati. Putera-putera Betawi ini juga bisa direkrut dalam kontestasi di DPRD maupun menjadi bupati atau walikota.

**Salah satu poin penting dari UU DKJ ini adalah soal aglomerasi. Nanti Wapres memiliki kewenangan dalam aglomerasi ini. Bukankah kewenangan Wapres ini akan mengambil-alih kewenangan Pemda?**

Aglomerasi hanya untuk mengoordinasikan terkait rencana pembangunan di wilayah aglomerasi. Selama ini ada pengalaman bahwa menyangkut masalah banjir dan sebagainya, memang sulit untuk dilakukan penyelesaian dari hulu hingga hilir. Masing-masing daerah mempunyai perencanaan pembangunan yang berbeda-beda sehingga tidak sinkron. Karena itu, koordinasi sangat diperlukan. Tata kelola pemerintahan nanti tetap ada di masing-masing provinsi, namun koordinasi dilakukan oleh Wakil Presiden.

Dalam RUU DKJ ini, untuk aglomerasi akan dibentuk dewan kawasan yang ditunjuk oleh Presiden. Jadi, kewenangan dewan kawasan itu tidak melangkahi kewenangan Pemda. Wakil Presiden yang berperan dalam aglomerasi ini bertanggung jawab kepada Presiden. Alasannya, Wapres memiliki keleluasaan untuk lintas sektoral. Itu yang menjadi argumentasi pemerintah. Kalau tujuannya baik, kita tentu akan menyetujui aglomerasi ini. Mayoritas fraksi juga menyetujui soal aglomerasi ini.

**Ada kesan pembahasan RUU DKJ ini terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Apa pendapat Bapak?**

Bukan terburu-buru. RUU ini sebetulnya sudah lama, tapi ketika kita melakukan harmonisasi di Baleg terbentur dengan pelaksanaan Pemilu. Hampir enam bulan anggota dewan berjibaku di daerah pemilihan ikut proses Pemilu ini. Hal ini menyebabkan UU DKJ ini terlambat dari ketentuan UU IKN. Dalam UU IKN semestinya dua tahun setelah diundangkan sudah ada UU DKJ. Pada 15 Februari 2024 itu, kemarin tepat dua tahun. Sebagai jalan keluarnya, ibu kota negara akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Jadi, UU DKJ berlaku setelah dikeluarkan Keppres tentang ibu kota negara.

Untuk partisipasi masyarakat, kita sudah mengikutsertakan partisipasi masyarakat sejak inisiatif RUU ini. Bahkan, tokoh masyarakat Betawi memberi masukan, seperti aspirasi masyarakat Betawi terhadap alokasi anggaran untuk lurah 5% dari APBD, kemudian juga terkait dengan masalah budaya Betawi. Budaya Betawi ini dilestarikan dan dilindungi dalam UU DKJ ini. □



# Jadi Model Koleksi Tradisional

*Futuristik*



*Jefri Nichol*

**A**KTOR **Jefri Nichol** tampil sebagai model yang turut mewarnai runway Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Ahad, 31 Maret 2024. Aktor kelahiran Jakarta, 15 Januari 1999, tampil dengan balutan busana tradisional Jawa, berupa kain batik Jawa klasik berwarna hitam dengan motif tradisional dipadu atasan desain futuristik. Penampilannya terkesan mewah, membawa aura Kerajaan di Surakarta.

Aktor yang memulai debut keartisannya pada tahun 2013 ini mengenakan koleksi House of Radinindra yang terkenal dengan koleksi busana tradisional Jawa yang dipadukan dengan unsur masa depan.

“Saya rasa koleksi ini luar biasa ya, perpaduan tradisional Indonesia yakni Jawa dan bersinergi dengan masa depan sangat futuristik,” kata aktor pemeran tokoh Ali Topan ini sumringah. □

DER



# Putri Indonesia Lingkungan 2024

**A**RTIS, model dan aktivis lingkungan **Sophie Kirana** terpilih sebagai Putri Indonesia terpilih sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2024 perwakilan Yogyakarta. Perhelatan yang digelar di Jakarta Convention Center, Jumat, 8 Maret 2024, diakui artis kelahiran Yogyakarta, 5 Agustus 2000 ini, sebagai hasil manis dari perjuangannya.

Mendapat mandat baru dengan tanggung jawab yang lebih luas, Sarjana Ekonomi UGM, ini mengaku akan terus berupaya melestarikan alam. Dia juga ingin menjadi ikon bagi para generasi muda yang punya kepedulian tinggi akan lingkungan.

“Saya akan terus mendukung dalam upaya pelestarian alam dan menjadi teladan bagi generasi muda untuk peduli pada lingkungan sekitar. Dan saya berharap juga dapat memberikan manfaat dan turut membantu program pemerintah sesuai kemampuan saya,” ujarnya. □

DER



*Sophie Kirana*



*Tina Toon*

## Turun Langsung Pantau Banjir Jakarta

**B**ILA menyebut nama Agustina Hermanto mungkin tak banyak mengenalnya. Tapi, begitu menyebut nama **Tina Toon**, langsung terbayang dia dulunya penyanyi cilik, gemuk, pipi tembam. Jika menyanyi selalu berucap 'bolo-bolo' seraya kepalanya digelengkan ke kiri dan kanan.

Dia kini bukan lagi artis cilik nan lucu, tapi dia sekarang anggota DPRD DKI Jakarta. Sebagai wakil rakyat, Tina Toon selalu sigap memantau dan membantu rakyat yang diwakalinya, yang tak lain warga DKI Jakarta, dalam menghadapi bencana banjir.

Februari 2024, ketika terjadi banjir di Jakarta, Tina Toon terlihat turun langsung di beberapa tempat. Titik utama pantauannya adalah proses penyedotan banjir. Dengan memakai mantel dan sepatu boots, ia menerobos genangan banjir dan memantau pompa-pompa penyedotan di beberapa tempat, seperti Pulogadung dan Cilincing.

“Ya, monitor dan koordinasi pompa sejak subuh jam 3.00, kita turun langsung cek semua pompa on dan maksimal. Tapi, karena cuaca gak terang-terang jadi surutnya agak lambat ... trus kita upayakan juga pintu air semua dimaksimalkan,” katanya menjelaskan. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Masjid Laweyan Mengenal Masjid Tertua di Kota Surakarta

**K**OTA Surakarta memiliki berbagai peninggalan bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Salah satunya adalah Makam Ki Ageng Henis. Si empunya nama merupakan salah satu penasihat Kerajaan Pajang pada masa Sultan Hadiwijaya.

Meski sudah ratusan tahun lalu, nama Ki Ageng Henis tetap harum hingga saat sekarang. Semua itu tak lepas dari jasa-jasa yang pernah diukirnya semasa masih hidup. Salah satu keberhasilan Ki Ageng Henis — yang bisa disaksikan hingga kini — adalah keberadaan Masjid Laweyan.

Masjid Laweyan menjadi penanda bahwa Ki Ageng Henis adalah sosok seorang pendakwah, ia senantiasa mengajar dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh pelosok, tak terkecuali kepada Ki Beluk, seorang pemuka agama Hindu.

Siapa Ki Beluk? Selain dikenal sebagai pemuka agama Hindu, Ki Beluk merupakan seorang saudagar batik. Ki Beluk sempat membangun dan memimpin pura di pinggir Kabanaran, sungai yang digunakan untuk lalu lintas perdagangan batik. Lazimnya

pemuka agama, Ki Beluk juga memiliki banyak murid.

Singkat cerita, Ki Ageng Henis berkenalan dengan Ki Beluk. Dan, sejak perkenalan itu keduanya jadi semakin sering bertemu. Mereka sering membahas berbagai hal, tak terkecuali soal agama Islam. Ibarat pepatah Jawa “Witing Trisno Jalaran Soko Kulino”



(cinta muncul karena sering bersamaan), Ki Beluk pun menaruh hati dengan dakwah yang disampaikan Ki Ageng Henis. Semakin lama semakin suka, hingga akhirnya Ki Beluk pun mengikrarkan dua kalimat syahadat, diikuti murid-muridnya.

Setelah menganut agama Islam Ki Beluk mendukung penuh upaya dakwah yang dilakukan Ki Ageng Henis. Salah buktinya adalah ia mewakafkan pura yang dibangun dan dipimpinnya untuk diubah menjadi masjid, dan masjid itu kemudian dikenal dengan nama Masjid Laweyan.

Saat ini, Masjid Laweyan tercatat sebagai salah satu masjid tertua di Kota Solo. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 162 meter persegi dan dibangun sekitar tahun 1546. Nama Laweyan merupakan nama daerah tempat masjid ini berdiri. Yaitu, Jalan Liris I, Pajang, Laweyan. Dan, warga masyarakat Solo kerap menyebutnya dengan nama Masjid Ki Ageng Henis.

Masjid Laweyan memiliki konstruksi laiknya Pura, dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Arsitekturnya unik, di bagian dalam masjid terdapat dua belas pilar utama



FOTO-FOTO: STIMEWA

terbuat dari kayu jati kuno, dan tampak masih kokoh berdiri. Keduabelas pilar itu, empat di antaranya menyangga bangunan utama masjid, sedangkan delapan pilar lainnya terdapat di bagian belakang.

### Berkhalwat

Sebagai sebuah masjid berusia ratusan tahun, Masjid Laweyan memberi kesan tersendiri bagi para pengunjung. Tak jarang, terutama bagi mereka yang baru pertama datang ke sana, merasakan keheningan yang teramat. Keheningan itu pula yang dirasakan Majalah *Majelis* ketika mengunjungi masjid tersebut beberapa waktu lalu.

Saat itu pagi baru saja beranjak, kehangatan sinar matahari terasa membelai. Suasana tersebut dimanfaatkan unggas dan kucing untuk berjemur, mengeringkan

bulu sembari menikmati mandi sinar matahari yang terasa hangat.

Awalnya Majelis sempat tertahan, tidak bisa langsung masuk area masjid, karena pintu utama masih terkunci. Kesempatan itu kami manfaatkan berkeliling di sekitar masjid. Khususnya samping kiri masjid yang langsung berbatasan dengan pintu menuju makam Ki Ageng Genis. Dengan cara mengintip, kami melihat di sana (makam) terlihat ada beberapa peziarah yang tengah khusuk memanjatkan doa. Tenang dan nyaman sekali suasananya, membuat kantuk bisa datang tiba-tiba.

Belum lagi menjelajah semakin dalam, terdengar suara deru mesin motor di halaman masjid. Suara tersebut memaksa kami mendekat, dan ternyata pilihan tersebut benar. Marbot masjid yang juga pembawa kunci datang, dan membukakan pintu. Kami

pun membuntuti sembari meminta izin untuk menyalakkan kamera, mengabadikan spot-spot yang ada di sana.

Sesaat kami memanfaatkan waktu untuk fokus mengabadikan setiap jengkal bagian masjid. Mulai dari mihrab yang terlihat mungil, laiknya masjid-masjid zaman dulu. Mimbar berwarna hijau, yang terlihat sangat berumur hingga empat tiang yang berdiri tepat di tengah masjid menopang bagian lainnya.

Keseluruhan bangunan masjid ini memastikan bahwa Laweyan adalah masjid yang sudah sangat berumur, dengan segala ciri yang dimiliki. Mihrab misalnya, ukurannya sangat sempit dan pendek, praktis hanya cukup untuk satu orang, imam. Sedangkan mimbar memiliki bentuk menyerupai kereta kuda, memiliki kekhasan tersendiri. Ada juga bedug bulat tidak rata, dengan kulit yang tampak makin kusam. Di sebelahnya terdapat kentongan, sebagai pasangan yang tampak serasi, meski sudah dimakan waktu.

Seluruh penampakan di masjid adalah pemandangan yang makin susah di temukan di tempat lain, seiring menjamurnya surau dan musholla baru dengan gaya arsitektur dan bentuk yang modern. Namun, sebagai peninggalan masa lampau, Masjid Laweyan menawarkan eksotisme tersendiri, terlebih bagi pelancong religi. Apalagi bagi mereka yang memerlukan tempat untuk berkhalwat, menjauh dari duniawi dan mendekatkan diri kepada Sang Khaliq, bisa jadi Masjid Laweyan adalah tempat yang tepat. □



MBO

Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes

# Gagal Jadi Tentara Sukses Jadi *Politisi*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**ESUAI janji, wartawan Majalah *Majelis* datang menemui sosok Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Muhammad Amir Uskara, M.Kes., di ruang kerjanya di lantai 7 Gedung Nusantara III, Komplek MPR/ DPR/ DPD Senayan Jakarta. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini seminggu sebelumnya (8 Maret 2024) dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI menggantikan Dr. Arsul Sani yang menduduki jabatan baru sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Saat ditemui, sosok sederhana ini baru saja bangkit dari kursi tempat duduknya. Agaknya, dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. “Apa kabar mas?” spanya ramah. Tanpa membuang waktu, *Majelis* langsung menyentil tentang pekerjaannya. “Ah, ini cuma adaptasi saja, sembari mempelajari tentang lembaga MPR RI. Saya kan baru dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI,” katanya memulai pembicaraan. Selanjutnya obrolan pun mengalir santai.

Amir Uskara lalu bercerita tentang masa kecilnya, di kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Lahir dari pasangan Makkaraus Daeng Tayang dan Hj. Ma’alumah Daeng Kanang, di Desa Sungguminasa, Sulawesi Selatan, 59 tahun lalu. Persisnya 9 Desember 1965. Ayahnya adalah seorang petani dan aktif sebagai pengurus PPP tingkat Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Maka tak heran bila Amir Uskara meneruskan garis organisasi politik dari ayahnya, yakni PPP.

Meski mengaku tak banyak ingat lagi seputar masa kecilnya, tapi ada beberapa peristiwa yang membekas, sampai-sampai membangkitkan rasa kangennya pada kampung halamannya. Apa itu? “Ya, bermain di Sungai Jeneberang bersama teman-teman,” kenang Amir Uskara. Kebetulan, cerita Amir Uskara, dulu rumahnya dekat sekali dengan sungai itu. “Itulah yang membuat saya akrab

dengan kehidupan sungai,” papar Amir Uskara.

Peristiwa masa kecilnya itulah yang membuat Amir Uskara tak bisa melupakan kegemaran masa kecilnya, berenang di sungai. “Bagaimana pun kondisi sungai itu, selalu saja ada permainan yang bisa kami lakukan. Kalau airnya sedang pasang kami jadikan arena lomba berenang. Jika di musim kemarau, airnya surut, kami sulap pinggiran sungai itu menjadi lapangan sepakbola. Tapi, itu dulu, kami lakukan di saat kondisi air sungai itu masih bersih, tapi sekarang jauh berubah. “Dulu air sungai itu jernih sekali, tapi sekarang sudah berubah jadi keruh,” katanya.

Selain bermain di tepian sungai, Amir Uskara juga tak bisa melupakan kegiatannya setelah pulang sekolah atau di saat libur sekolah, yaitu menjaga toko kelontong milik keluarga besarnya. Amir menunggu toko itu bergantian dengan neneknya. “Kalau nenek sedang ada keperluan, tidak bisa menunggu toko, maka sayalah yang menunggu toko itu. Jadi, kalau tidak nenek, ya sayalah yang dipercaya menunggu toko. Praktis kegiatan saya semasa SD itu pulang sekolah langsung jaga toko,” ujarnya mengenang masa kecilnya.

## Sempat galau di masa remaja

Siapa sangka, anak kecil yang dulunya gemar bermain di sungai dekat rumahnya, dan ikut membantu neneknya menjaga toko sembako itu kini, puluhan tahun kemudian, bermetamorfosis menjadi seorang politisi yang sangat disegani. Dia dipercaya menjadi pejabat teras salah satu partai politik yang melegenda di Indonesia. Dan, lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dia menjadi anggota parlemen, dan terbaru menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Untuk sampai pada titik seperti saat ini, Amir Uskara mengaku,



FOTO-FOTO: STIMEWA

sempat galau di saat usianya masih remaja. Galau tentang cita-cita yang ingin diraihinya. Ketika masuk SMA, Amir Uskara malah ingin menjadi seorang dokter. Namun, setelah menyelesaikan SMA, Amir Uskara urung masuk Fakultas Kedokteran, tapi malah lebih tertarik menjadi seorang tentara. Oleh karena itu dia pun mendaftar menjadi Taruna AKABRI.

Amir Uskara ternyata punya alasan kenapa punya keinginan menjadi seorang tentara. "Karena saya berasal dari keluarga biasa-biasa saja di kampung, saya melihat saat itu nyaris hanya dari kalangan ABRI yang bisa menjadi Bupati. Makanya, saya memilih pendidikan di AKABRI agar tujuan saya, ingin menjadi Bupati, bisa terwujud," ujar dia.

Tekad Amir untuk menjadi tentara begitu besar. Begitu lulus SMA dia langsung mendaftar AKABRI dan mengikuti tes sampai ke Magelang, Jawa Tengah. "Itulah pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Jawa," imbuhnya.

Amir Uskara sudah berusaha keras dan maksimal mengikuti tes masuk AKABRI, namun keberuntungan tak berpihak kepadanya. Amir gagal dan terpaksa mengubur dalam-dalam cita-cita besarnya menjadi tentara. "Saya waktu itu tidak ada kekecewaan. Karena

namanya anak kampung sudah sampai di Magelang pun sudah senang sekali," jelasnya.

Gagal di Magelang, Amir Uskara kembali ke tanah kelahirannya di Sulawesi Selatan. Tak lama kemudian, dia menerima pemberitahuan bahwa dia diterima di Fakultas Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin. Ternyata, sebelum mengikuti tes masuk AKABRI, Amir Uskara juga mendaftar dan mengikuti tes masuk Fakultas Teknik Perkapalan Unhas dan dinyatakan diterima. Di sini, dia sempat menjalani kuliah selama empat semester, dari tahun 1985 hingga 1987.

"Ada yang lucu waktu kuliah pertama kali. Maksud saya memilih Fakultas Teknik Perkapalan, karena waktu itu ekspektasi saya untuk belajar pesawat terbang. Sebab, waktu itu, pesawat identik dengan Bapak Habibie yang sangat dikagumi masyarakat, termasuk saya. Saya berpikir pesawat itu teknologi tinggi. Ketika masuk semester kedua, saya mulai bertanya-tanya dan resah. Kok, ini kapal laut ya bukannya pesawat. Dari situlah saya sudah mulai kehilangan gairah kuliah," ujarnya seraya tertawa.

Amirpun memutuskan keluar dari kuliah. Tapi, dia tak patah semangat. Pada tahun 1987, Amir Uskara kembali ikut tes Sipienu



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PTN. Kali ini, dia memilih untuk ikut tes di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. “Karena saya malu dengan kawan-kawan kalau masih di Unhas, ya saya coba peruntungan tes di Padjadjaran, dan lulus. Sempat kuliah selama 4 tahun, tahun kelima yakni tahun 1992 saya transfer kuliah kembali ke Unhas,” kenangnya.

Aktif kembali di Unhas, Amir bertemu teman-teman lama. Selain bicara dan diskusi soal pelajaran kuliah, Amir dan teman-temannya mulai melirik membangun usaha atau kegiatan yang menghasilkan uang. “Saya berpikir, wah bagus juga kalau cari duit. Bertahap, saya mulai serius membangun usaha, tapi dengan tetap tidak melupakan kuliah saya,” katanya.

### Aktif di organisasi dan politik

Amir Uskara juga termasuk seorang aktifis organisasi, baik organisasi pelajar, mahasiswa, dan juga pengusaha. Dia mulai berkecimpung dalam organisasi taktala masih berstatus siswa di SMA Negeri di Sungguminasi. Di SMA ini dia bergabung di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan dia menduduki jabatan Wakil Ketua IPNU Kabupaten Gowa.

Begitu pula tatkala masih kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung, Amir berkecimpung di organisasi intra kampus. Di sini dia aktif di kepengurusan Senat Mahasiswa Kedokteran dan dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia untuk Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Masih di Bandung, Amir Uskara juga aktif sebagai pengurus Masjid Assyifa Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Berbekal pengalaman yang diperoleh di organisasi pelajar dan mahasiswa, Amir Uskara mencoba terjun ke ranah politik dan organisasi lebih serius lagi. Keinginan itu didasari oleh satu niat, untuk memperjuangkan nasib masyarakat. Akhirnya, Amir Uskara memilih untuk berlabuh di PPP, mengikuti jejak ayahnya yang pernah menjadi pengurus PPP tingkat Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

“Waktu zaman reformasi, saya diajak untuk bergabung di PPP membantu mengurus partai. *Alhamdulillah*, pada Pemilu 1999 saya terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowa. Dari situ ternyata saya mulai menikmati dunia politik. Sedikit demi sedikit kegiatan usaha malah menjadi sampingan,” ungkap dia. Perlu diketahui bahwa menjelang reformasi, Amir Uskara adalah seorang pengusaha yang menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Gowa (1996–1998).

Sejak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Gowa, karirnya di bidang politik terus menanjak. Di DPRD Kabupaten Gowa, dia

menduduki posisi mulai dari Sekretaris Komisi Pembangunan, selanjutnya menjabat Ketua Komisi Bidang Ekonomi. Di periode kedua, yakni 2004–2009, Amir kembali terpilih dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa.

Di periode 2009–2014, Amir kembali maju tapi kali ini “naik kelas” menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan terpilih, dan kepadanya diberi tugas sebagai Wakil Ketua Komisi. Kemudian untuk beberapa pemilu selanjutnya, Amir selalu terpilih. Pada periode 2014–2019 dia terpilih menjadi anggota DPR RI, dan ditugaskan sebagai Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI.

Begitu pula pada Pileg 2019, dia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI untuk periode 2019–2024. Pada periode ini Amir mengemban tugas sebagai Ketua Fraksi PPP MPRRI, tapi menjelang akhir periode, tepatnya 8 Maret 2024, Amir dipercaya menjadi Wakil Ketua MPR RI, menggantikan koleganya Arsul Sani, yang diberi amanat untuk menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi.

“Yang patut saya syukuri adalah waktu awal-awal masuk ke DPR RI itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat saya dan keluarga. Karena, waktu itu, belum ada di keluarga saya yang masuk di pemerintahan ataupun menjadi ASN. Setelah saya berkecimpung di DPR baru ada keluarga yang menjadi ASN dan lain-lain,” katanya.

### Kekuatan itu datang dari ayahnya.

Karakter kuat dan tangguh dari Amir Uskara dalam menjalani profesi sebagai politisi tak lepas dari pengaruh ayahnya. “Kekuatan itu berasal dari ayah saya. Beliau hanya menjadi pengurus partai, tapi





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bukan pengurus teras. Beliau hanya setia mengurus partai tanpa ada keinginan untuk menjadi anggota DPRD atau DPR. Yang saya kagumi, orang yang sanggup mengurus PPP saat itu adalah pemberani dan tahan banting, serta tahan tekanan. Mentalnya kuat. Karena, saat itu, dominasi rezim dan partai penguasa sangat kuat. Jadi, ayah saya termasuk pemberani kala itu,” paparnya.

Pendidikan yang ditanamkan orang tuanya juga sangat memengaruhi jalan kehidupan yang diarungi Amir Uskara. “Bapak dan Ibu kalau di rumah sangat menekankan soal agama. Pendidikan agama sangat dipentingkan, bahkan lebih diprioritaskan dari pendidikan umum. Itu yang saya rasakan dan itu barangkali yang menempe saya sampai seperti sekarang ini,” pungkasnya.

Sebagai Wakil Rakyat di Komisi XI DPR, Amir Uskara dikenal sangat vokal menyuarakan aspirasi rakyat dalam permasalahan lingkup tugas di bidang Keuangan dan Perbankan. Di antaranya, Amir menyorot soal masih minimnya wawasan masyarakat terkait industri sektor keuangan, khususnya asuransi, sehingga banyak terjadi kasus gagal bayar yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap asuransi.

Untuk itu, Amir Uskara meminta agar industri keuangan, jangan hanya berlomba memperbanyak nasabah dan memberi iming-iming untung. Tapi, juga harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan penambahan wawasan kepada nasabah.

“Dari hal kecil saja, yakni saat penandatanganan kontrak, industri harus memandu agar nasabah membaca secara seksama dan memahami semua klausul dan isi dari berkas yang akan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ditandatangani. Selain itu, industri harus memberikan penjelasan soal keuntungan sekaligus resiko-resiko produk yang akan dibeli nasabah,” ujarnya.

Sebagai Pimpinan MPR yang baru dilantik, Amir Uskara juga sangat serius menyoroti soal gagasan MPR dalam hal perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Amir melihat, PPHN sangat penting untuk keberlangsungan arah, sinergitas, dan kontinuitas perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang, mulai dari ekonomi, politik, demokrasi dan budaya.

“Karena begitu pentingnya PPHN untuk masyarakat dan negara Indonesia, saya berharap agar diwujudkan secepatnya. Kalau bisa sebelum periode MPR 2019-2024 ini berakhir,” tandasnya. □

DER

## Biodata

Nama Lengkap : **Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes**  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa, Sulawesi Selatan,  
 9 Desember 1965  
 Istri : Hj. Tenriadjeng

### Riwayat Pendidikan

- SD , SDN 2 Sungguminasa. Tahun: 1974 - 1979
- SMP , SMPN 1 Sungguminasa. Tahun: 1979 - 1982
- SMA , SMAN 1 Sungguminasa. Tahun: 1982 - 1985
- S1 Ekonomi, YPUP Makassar. Tahun: 2002 - 2005
- S2 Kesehatan Masyarakat, Pasca Sarjana UNHAS. Tahun 2005 - 2010
- S3 Ekonomi Bisnis, Univ. Padjadjaran. Tahun 2016 – 2019

### Riwayat Pekerjaan

- DPR RI, Sebagai: Ketua Fraksi. Tahun: 2019 - 2024
- DPR RI, Sebagai: Sekretaris Fraksi. Tahun: 2014 - 2019
- DPRD Prov. Sulawesi Selatan, Sebagai: Wakil Ketua Komisi. Tahun: 2009 - 2014
- DPRD Kab. Gowa, Sebagai: Wakil Ketua DPRD. Tahun: 2004 - 2009
- DPRD Kab. Gowa, Sebagai: Ketua Komisi. Tahun: 2002 - 2004
- DPRD Kab. Gowa, Sebagai: Ketua Komisi Bid. Ekonomi. Tahun: 2002 - 2004
- DPRD Gowa, Sebagai Sekretaris Komisi Pembangunan. Tahun: 1999 - 2002
- PT Makassar Multi Niaga, Sebagai: Dirut. Tahun: 1997 - 1999
- PT. Triputra Gowa Mandiri, Sebagai: Dirut. Tahun: 1996 – 1999

### Organisasi

- Wakil Ketua IP NU Kabupaten Gowa (1984–1989)
- Ketua HIPMI Kabupaten Gowa (1996–1998)
- Ketua GP Ansor Kabupaten Gowa (2000–2005)
- Ketua DPC PPP Kabupaten Gowa (2004–2009)
- Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan (2009–2014)
- Wakil Ketua PBSI Sulawesi Selatan (2010–2015)
- Ketua Umum Sitoryu Indonesia Karatedo Sulawesi Selatan (2010–2020)
- Wakil Ketua Umum DPP PPP (2016–2021, 2021–2026)

### Penghargaan

Penganugrahan DPP Awards 2021 sebagai Tokoh Nasional Penuh Inspirasi Pemuda Indonesia oleh DPP KNPI

## Pemilu 2024 dalam Pusaran Krisis Etika

**P**EMILIHAN Umum (Pemilu) sering disebut pesta demokrasi, hajatan lima tahunan yang kerap ditunggu-tunggu oleh khalayak, termasuk rakyat, untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan peradaban, mewujudkan cita-cita proklamasi dan reformasi, dengan memilih pasangan presiden dan wakil presiden, serta para wakil rakyat di lembaga legislatif. Belasan kali pula pemilu telah dilaksanakan di Indonesia. Namun, ada yang berbeda dengan Pemilu 2024 dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, yakni adanya krisis etika yang terbuka terjadi sejak sebelum pemilu, yaitu pada saat pendaftaran pasangan capres/cawapres hingga saat kampanye berlangsung. Bahkan sesudah pencoblosan, saat publik mempermasalahkan "SIREKAP" yang dipergunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ironisnya, persoalan pelanggaran etika itu justru dimulai pada sejak masa tahapan-tahapan pemilu dimulai. Yakni, ketika proses pendaftaran calon. Ketika pendaftaran calon telah dibuka muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (pilpres), selama yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Hal ini menabrak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang sebelumnya secara tegas membatasi usia minimal 40 tahun dalam kontestasi pilpres.

Meski dianggap berlaku untuk setiap orang, tetapi semua pihak bisa memahami bahwa putusan itu seakan memberikan jalan kepada putera Presiden Joko Widodo (Jokowi), Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres. Nama

Gibran pun secara spesifik disebutkan dalam permohonan yang dikabulkan oleh MK tersebut. Bahkan, belakangan Gibran sendiri digugat oleh salah satu pemohon yang permohonannya dikabulkan karena dinilai melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak mengucapkan terima kasih kepada pemohon karena telah berhasil mempermulus jalannya menjadi cawapres.

Putusan MK itu sendiri menjadi kontroversi di mata publik. Adanya conflict of interest sangat kuat terjadi karena MK dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi atau paman dari Gibran Rakabuming Raka selaku pihak yang paling diuntungkan oleh putusan tersebut. Benar saja, ketika Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dibentuk dan mengadili dugaan pelanggaran etik, MKMK akhirnya memutuskan ada pelanggaran kode etik oleh seluruh hakim konstitusi, serta yang lebih parah adalah Ketua MK Anwar Usman yang dinyatakan melanggar kode etik berat dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK, serta dilarang mengadili perkara sengketa pemilu yang ada hubungan dengan keluarganya.

Apakah itu cukup? Belum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belakangan juga memutuskan hal yang sama. Yakni, memutuskan para komisioner KPU melanggar kode etik karena mengabulkan pencalonan Gibran sebagai cawapres tanpa merevisi peraturannya terlebih dahulu. Lebih parah lagi, putusan itu merupakan yang keempat kalinya Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar kode etik.

Sebelumnya, persoalan etika juga dipertontonkan dalam salah satu debat cawapres. Dimana, salah seorang cawapres menunjukkan gimmick tubuh yang merendahkan calon lain, seakan-akan mencari jawaban sang cawapres yang menurutnya tidak

Oleh:  
**Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.**  
Wakil Ketua MPR RI



ditemukan. Aksi tersebut bukan hanya memalukan, tetapi juga membuat malu sendiri orang yang melihat tontonan tersebut, atau secara psikologis disebut 'secondhand embarrassment' atau rasa malu yang tidak langsung, di mana seseorang merasa malu, tidak nyaman, atau bersalah karena adanya perilaku memalukan dari orang lain.

Selanjutnya, dalam proses penghitungan suara, masyarakat juga kembali dipertontonkan oleh 'ketidaketisan' penyelenggara pemilu yang menampilkan hasil penghitungan suara sementara yang banyak berbeda dengan kenyataan di lapangan, yang kemudian berujung kepada ditutupnya informasi tersebut dalam website resmi KPU.

Padahal, apabila kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi etika ini sangat penting dalam kehidupan bernegara. Salah satu rujukan yang sering digunakan adalah TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih berlaku hingga saat ini. Padahal, TAP ini sangat jelas mengatur bagaimana dalam kehidupan berbangsa, etika harus benar-benar diutamakan. Oleh karena itu, ke depan, sepertinya perlu secara spesifik menyosialisasikan TAP MPR ini (bersama dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI) kepada bukan hanya kepada masyarakat, tetapi terutama kepada para penyelenggara negara.

Selain TAP MPR tersebut, kesadaran untuk mengedepankan etika – sebelum penerapan hukum – sejatinya sudah disadari dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terbukti dengan bermunculan peradilan-peradilan etika (seperti mahkamah kehormatan) di masing-masing lembaga negara. Sayangnya, kemunculan lembaga-lembaga penegak etika ini tidak sejalan dengan kesadaran segelintir pihak dalam menghormati etika.

Etika memang bukan hukum. Namun, etika seharusnya digunakan bersamaan dengan penerapan hukum. Oleh karenanya, ketika pelanggaran etika tersebut seakan diabaikan maka upaya membawanya ke proses hukum yang lebih keras sangat dimungkinkan. Misalnya, dengan adanya pelanggaran etik dua kali dalam pencalonan Gibran selaku cawapres maka ada pihak yang berencana mengajukan gugatan hukum baik kepada Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dengan pencalonannya yang sudah dua kali dinyatakan bermasalah secara etika (saat putusan MKMK dan putusan DKPP).

Segala upaya untuk menegakkan etika memang perlu kita dukung bersama. Tujuannya, tentu bukan untuk menghambat salah satu calon masuk ke dalam kontestasi pilpres, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap tindak tanduk calon penyelenggara negara, apalagi di level tertinggi di eksekutif seperti cawapres, hendaknya bisa dilaksanakan dengan menghormati etika.

Akhir kata, apabila kita melihat lebih dalam, etika itu sejatinya memiliki makna yang mirip dengan akhlak. Dalam khazanah bahasa Inggris ke bahasa Arab, ethics sendiri kerap ditafsirkan dengan akhlak. Oleh karena itu, melihat segala rangkaian dalam Pemilu 2024 ini, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dalam berbagai kesempatan dan kepada banyak orang yang berbeda bahwa krisis terbesar negara ini adalah krisis akhlak, hal yang sebelumnya juga dinyatakan oleh Wapres KH Makruf Amin. Dan, itu yang harus pertama kali dibenahi oleh para pemimpin yang terpilih melalui Pemilu 2024, ya agar PEMILU yang sangat mahal, tapi disebut pesta demokrasi itu tidak jadi olok-olok karena dia adalah juga kependekan dari PEMbuat piLU. □

## Agar Generasi Muda **Paham** Demokrasi Pancasila

Badan Pengkajian MPR membuat kajian akademik tentang penegasan demokrasi Pancasila. Langkah yang demikian penting, sebab salah satu alasan yang dikemukakan adalah, dengan tidak adanya penegasan demokrasi Pancasila dalam UUD maka akan ditafsirkan keliru oleh generasi mendatang dan akan semakin tidak dipahami.

**B**UKU yang mengupas tentang Penegasan Demokrasi Pancasila banyak tersaji dalam berbagai pustaka, salah satunya terbitan Badan Pengkajian MPR RI. Buku ini merupakan salah satu bentuk dari Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Empat Pilar MPR. Suatu amanat yang diberikan oleh UU MD3 (Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) kepada MPR. Hadirnya buku ini sangat istimewa, sebab dalam penyusunan melibatkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Dalam sambutan pimpinan Badan Pengkajian MPR (di halaman v) dikatakan, UUD setelah perubahan sangat berbeda. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Idealnya muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara. Lebih lanjut dalam sambutan itu dikatakan, UUD yang telah diubah, beberapa tahun terakhir ini banyak mendapat tanggapan dari masyarakat dan daerah.

Pimpinan Badan Pengkajian menuturkan, penerbitan buku ini merupakan salah satu upaya untuk memperkaya hasil rumusan atau materi yang sedang disusun oleh Badan Pengkajian tentang Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tentu dilandasi oleh demokrasi Pancasila.

Dijelaskan, dalam penelitian yang dilakukan, antara lain memuat rekomendasi penting tentang konsep demokrasi Pancasila sebagai berikut: (1). Berkaitan dengan konsepsi ideal demokrasi Pancasila, sebaiknya termaktub di dalam batang tubuh UUD secara tegas. (2). Aktualisasi penegasan demokrasi Pancasila harus sesuai dengan konsepsi ideal demokrasi Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial, baik dalam seluruh regulasi, kelembagaan, maupun praktik kehidupan

berbangsa dan bernegara. (3). Sehubungan dengan upaya penegasan Pancasila dalam demokrasi maka peranan lembaga pendidikan harus lebih aktif untuk menginternalisasikan makna dan praktik berdemokrasi yang sesuai dengan Pancasila. (4). Perlu bab tersendiri yang mengatur demokrasi Pancasila dalam pasal-pasal UUD.

Buku setebal 160 halaman itu terbagi dalam lima bab. Dalam bab-bab yang ada, tentang demokrasi dan hukum dijelaskan secara sederhana sehingga pembaca sangat mudah untuk memahami maksud dari para penyusun buku itu.

Setelah kita membaca secara runut dari uraian yang ada kita bisa menyimpulkan tulisan itu, seperti dalam Bab V Penutup, halaman 147.

Di antara kesimpulan yang ada adalah, upaya penegasan Pancasila dalam demokrasi dapat dilakukan melalui penegasan secara objektif dan subjektif. Penegasan secara objektif adalah penegasan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, bidang politik, ekonomi, dan hukum dalam berdemokrasi. Sedangkan penegasan secara subjektif, yaitu penegasan Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam berdemokrasi.

Kesimpulan lain menyebutkan, dengan tidak adanya penegasan demokrasi Pancasila dalam UUD maka akan ditafsirkan keliru oleh generasi mendatang dan akan semakin tidak dipahami,

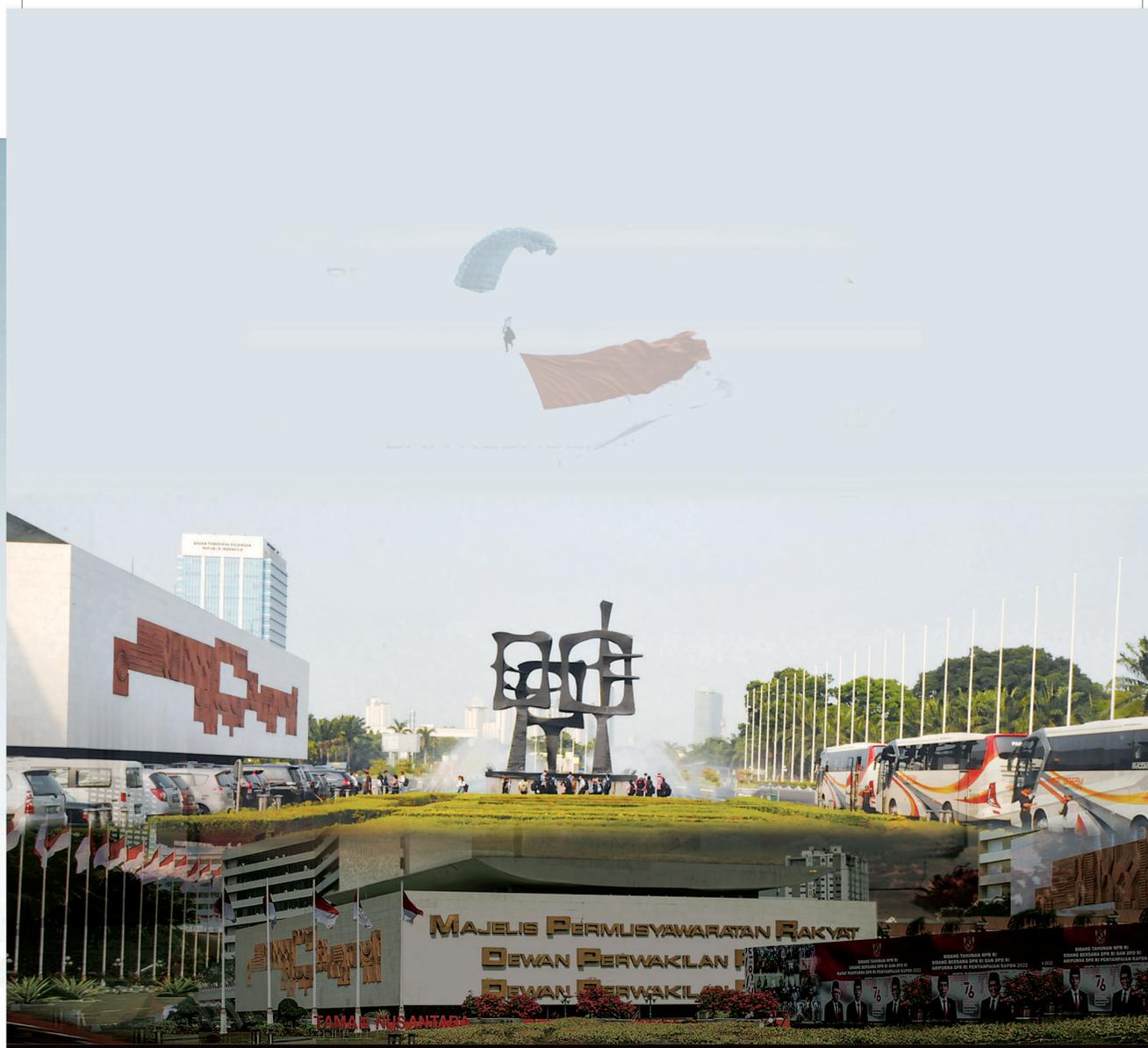
Agar buku itu berdaya guna maka Badan

Pengkajian MPR (di halaman 148) mengeluarkan rekomendasi, di antaranya adalah, sehubungan dengan upaya penegasan Pancasila dalam demokrasi maka peranan lembaga pendidikan dan lembaga yang dibentuk pemerintah yang khusus menangani pembinaan Pancasila, seperti BPIP, menjadi *avan garde* dan harus lebih aktif untuk menginternalisasikan makna dan praktik berdemokrasi yang sesuai dengan Pancasila.

Ditambahkan, sehubungan dengan kesimpulan di atas maka perlu bab tersendiri yang mengatur demokrasi Pancasila dalam batang tubuh UUD. □

AWG





**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**Buku Digital MPR RI**  
SETJEN MPR RI

**MPR**  
**RUMAH KEBANGSAAN**  
**PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA**  
**DAN KEDAULATAN RAKYAT**



# PANCASILA

